



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dengan menggunakan Lampiran I yang merupakan SAP berbasis Akrua. Pada dasarnya LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama Tahun Anggaran 2016.

LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Balikpapan;
- n. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi; dan
- o. Peraturan Walikota Balikpapan No. 38 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II : Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Pencapaian target kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah

- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Bab V : Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - 5.2.1. Perubahan SAL
- 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1. Pendapatan LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Pos Luar Biasa
- 5.5. Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1. Perubahan Ekuitas
- 5.7. Pengungkapan Informasi Lainnya

Bab VI : Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2016. RPJMD Kota Balikpapan memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu **“Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman”**. RPJMD juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur/Renstra Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJP Nasional. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam APBD Kota Balikpapan setiap tahun.

Dalam tahun 2016 APBD disusun berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

Kebijakan keuangan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sangat dipengaruhi dengan kondisi dan posisi keuangan tahun 2016. Implementasi kebijakan keuangan erat kaitannya dengan posisi saldo kas yang dicerminkan dalam Laporan Arus Kas maupun Neraca Pemerintah Kota Balikpapan.

Berikut dijelaskan beberapa kebijakan keuangan yang dilaksanakan pada tahun 2016.

- a. Sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2016 diproyeksikan dari pendapatan sebesar Rp2.234.750.897.296,11 dan dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA tahun 2015 sebesar Rp935.696.004.130,80. Penerimaan pendapatan direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp555.970.991.413,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.675.779.905.883,11 dan dari Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah sebesar Rp3.000.000.000,00.
- b. Pengeluaran Daerah dibagi kedalam tiga bagian yaitu Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp2.458.557.377.868,20 yang dibagi kedalam Belanja Operasi sebesar Rp1.701.977.805.318,20, Belanja Modal sebesar Rp749.079.572.550,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp7.500.000.000,00. Untuk Transfer dialokasikan sebesar Rp1.085.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3.000.000.000,00.

2.2. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang menggambarkan Kinerja APBD menurut urusan pemerintah daerah secara rinci dapat dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Balikpapan Tahun 2016.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara rinci dapat dijelaskan dalam LKPJ Walikota Balikpapan Tahun 2016.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Peraturan Walikota (Perwali) Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 adalah Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu Pemerintah Kota Balikpapan memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Berikut disampaikan dasar-dasar pengukuran penyusunan Laporan Keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

- a. LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/(defisit) dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu tahun periode.
- b. LPSAL memberikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada tahun pelaporan.

PENDAPATAN-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BELANJA

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU.
- c. Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- f. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- g. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan dan aset tak berwujud.
- h. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

SURPLUS/(DEFISIT)

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- c. Selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/(Defisit).

PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- c. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
- d. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- e. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- f. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

- h. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
- i. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- j. Selisih lebih/(kurang) antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

- a. Sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga memberikan informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

- a. LO memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
- b. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti persediaan dan revaluasi aset tetap.

PENDAPATAN-LO

- a. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- d. Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BEBAN

- a. Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- b. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.
- c. Dalam hal BLU, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- d. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi
- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- f. Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya di atas kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

- a. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
- b. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

POS LUAR BIASA

- a. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
- b. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar

- a. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka.

Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- b. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid/mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
- c. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

- d. Kas di Pemegang Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat transaksi.

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjualbelikan/dicairkan dan dilakukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah, antara lain Deposito Berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*), Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Piutang

- a. Piutang merupakan hak dan klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari: piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, piutang lain-lain dan sebagainya.
- b. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- c. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

Penyisihan Piutang

- a. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- b. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- c. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0.5%
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Belanja Dibayar Dimuka

- a. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.
- b. Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- b. Persediaan meliputi:
 - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, bibit tanaman, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- d. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak disajikan sebagai persediaan.
- e. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- f. Persediaan dalam neraca disajikan sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Investasi Jangka Panjang dibagi menjadi investasi permanen dan non permanen.
- c. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan.
- d. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- f. Investasi non permanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- g. Investasi jangka panjang diakui pada saat pengeluaran kas atau aset apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- h. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - 1) Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.
 - 2) Metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba (kecuali deviden) atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

i. Dasar investasi Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan dasar pembagian laba dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemkot Balikpapan kepada BPD Kaltim.
- 2) PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal daerah pada PDAM Kota Balikpapan.
- 3) Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan.

Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan menjadi:
- 1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 2) Peralatan dan Mesin
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Gedung dan Bangunan
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 5) Aset Tetap Lainnya
Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun, dan untuk periode setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, maka digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- d. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- e. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- f. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset

yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

- g. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- h. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- i. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Disusutkan mengikuti masa manfaat aset induknya.
- j. Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
- k. Penyusutan aset tetap dimulai saat perolehan dan siap digunakan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*)

Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- b. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Aset Lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.
- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan aset tetap yang diserahkan.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

- a. Kewajiban jangka pendek (utang lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka pendek terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan Perhitungan Pihak Ketiga

Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang

- a. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

- b. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban perhitungan pihak ketiga (PFK)

- a. Kewajiban perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Kewajiban lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Pendapatan Diterima Di Muka

Merupakan Pendapatan yang diterima dari pihak ketiga namun manfaatnya akan diberikan di periode berikutnya.

Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Utang Dalam Negeri

- a. Utang Dalam Negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- b. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

Utang Luar Negeri

- a. Utang Luar Negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- b. Utang Luar Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

EKUITAS DANA

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Balikpapan Per 31 Desember 2015, bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris. Dalam penyajiannya, Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

- a. Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Aktivitas investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset tetap, investasi jangka panjang, dana cadangan dan Aset lain-lain.
- c. Aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- d. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah
 - 2) Pendapatan Transfer
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 3) Belanja Subsidi
 - 4) Belanja Hibah
 - 5) Belanja Bantuan Sosial
 - 6) Belanja Tak Terduga

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

- a. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Penjualan investasi jangka panjang (saham, obligasi)
 - 2) Penjualan aset tetap
- b. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal
 - 2) Penyertaan Modal

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

- a. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Penerimaan Pinjaman
 - 2) Penerimaan dari Utang Obligasi
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Pokok Pinjaman
 - 2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

- a. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:
 - 1) Penerimaan PFK.
 - 2) Penerimaan Panjar
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Pengeluaran PFK.
 - 2) Pengeluaran panjar

Arus Kas Mata Uang Asing

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal neraca.

Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas dikeluarkan dari Laporan Arus Kas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1.	Pendapatan	2.234.750.897.296,11	1.993.392.905.725,29	89,20	2.229.965.797.217,84
2.	Belanja	2.458.557.377.868,20	2.114.716.897.992,83	86,02	2.906.591.513.980,55
3.	Transfer	1.085.000.000,00	998.806.796,00	92,06	998.806.796,00
3.	Pembiayaan	224.891.480.572,09	224.891.480.572,09	100,00	905.516.004.130,80

Berikut penjelasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 untuk pendapatan :

5.1	PENDAPATAN	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		2.234.750.897.296,11	1.993.392.905.725,29	2.229.965.797.217,84

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun 2016 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2.234.750.897.296,11 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.993.392.905.725,29. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp(236.572.891.492,55) atau (10,61)% dari realisasi TA 2015 yang berjumlah Rp2.229.965.797.217,84 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2016

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	%	Kenaikan/Penurunan
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	555.970.991.413,00	560.365.008.676,29	578.959.818.473,84	(3,21)	(18.594.809.797,55)
2.	Pendapatan Transfer:	1.675.779.905.883,11	1.427.957.897.049,00	1.649.820.978.744,00	(13,45)	(221.863.081.695,00)
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3.000.000.000,00	5.070.000.000,00	1.185.000.000,00	327,85	3.885.000.000,00
	Jumlah	2.234.750.897.296,11	1.993.392.905.725,29	2.229.965.797.217,84	(10,61)	(236.572.891.492,55)

5.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		555.970.991.413,00	560.365.008.676,29	578.959.818.473,84

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp560.365.008.676,29 mengalami penurunan sebesar Rp(18.594.809.797,55) atau (3,21)% dibandingkan dengan realisasi TA 2015, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	TA 2016 (Rp)	TA 2015 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	403.690.047.708,65	385.432.289.529,31	18.257.758.179,34	4,74
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	46.624.692.440,79	48.132.803.944,63	(1.508.111.504)	(3,13)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.051.835.627,69	25.716.622.557,65	(10.664.786.929,96)	(41,47)
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	94.998.432.899,16	119.678.102.442,25	(24.679.669.543,09)	(20,62)
	Jumlah	560.365.008.676,29	578.959.818.473,84	(18.595.555.016,55)	(3,21)

Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp555.970.991.413,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp560.365.008.676,29 dengan persentase sebesar 100,79%.

5.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		393.608.000.000,00	403.690.047.708,65	385.432.289.529,31

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2016 adalah sebesar Rp403.690.047.708,65 terdiri dari pajak-pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.257.758.179,34 atau 4,74% dari realisasi TA 2015 yang berjumlah Rp385.432.289.529,31. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016		TA 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
		Anggaran	Realisasi			
1.	Pajak Hotel	38.100.000.000,00	39.393.467.912,95	37.490.029.446,39	1.903.438.466,56	5,08
2.	Pajak Restoran	60.000.000.000,00	59.523.017.719,28	57.868.949.637,92	1.654.068.081,36	2,86
3.	Pajak Hiburan	21.000.000.000,00	19.877.898.518,00	16.871.731.854,00	3.006.166.664,00	17,82
4.	Pajak Reklame	10.000.000.000,00	8.628.558.268,48	7.920.666.241,00	707.892.027,48	8,94
5.	Pajak Penerangan Jalan	93.200.000.000,00	94.427.087.967,74	89.296.856.315,00	5.130.231.652,74	5,75
6.	Pajak Parkir	15.000.000.000,00	14.592.708.349,00	11.668.389.770,00	2.924.318.579,00	25,06
7.	Pajak Air Tanah	2.756.000.000,00	2.204.629.208,20	2.021.195.332,60	183.433.875,60	9,08
8.	Pajak Sarang Burung Walet	52.000.000,00	24.740.551,00	29.528.750,00	(4.788.199,00)	(16,22)
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	3.232.672.150,00	410.367.300,00	2.822.304.850,00	687,75
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	75.000.000.000,00	79.128.220.150,00	79.066.864.994,00	61.355.156,00	0,08
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	78.000.000.000,00	82.657.046.914,00	82.787.709.888,40	(130.662.974,40)	(0,16)
	Jumlah Pajak Daerah	393.608.000.000,00	403.690.047.708,65	385.432.289.529,31	18.257.758.179,34	4,74

Dari rincian diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan TA 2016 dibandingkan dengan TA 2015 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hiburan meningkat karena adanya penambahan Wahana Hiburan dan Ketangkasan yang baru di Transmart yang beroperasi Tahun 2016.
2. Pajak Parkir meningkat karena bertambahnya Objek Pajak Parkir karena adanya Mall baru dan Hotel baru.
3. Pajak Air Tanah meningkat tidak terlalu signifikan karena pengguna air tanah harus dengan Rekomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pada PERDA yang baru yang sedang dibahas, rencana tarif dinaikkan agar masyarakat tidak/mengurangi penggunaan air tanah.
4. Pajak Sarang Burung Walet terjadi Penurunan dari tahun lalu dikarenakan Peternakan Burung walet semakin berkurang disebabkan harga burung walet dipasaran menurun drastis.

5. Peningkatan Pajak Mineral bukan logam dan batuan meningkat drastis dikarenakan adanya proyek Pembangunan Waduk Teritip yang mendorong penerimaan pajak ini.
6. Pajak Bumi dan Bangunan hampir tidak meningkat karena kesadaran masyarakat untuk membayar PBB masih kurang, juga disebabkan karena data PBB yang masih terus dilakukan perbaikan.
7. BPHTB juga tidak melampaui penerimaan tahun lalu dikarenakan Pola Pembayaran dilakukan tanpa perlu di verifikasi terlebih dahulu oleh Dipsenda sesuai SE Kepala BPN Kota Balikpapan.

5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
	51.300.972.013,00	46.624.692.440,79	48.132.803.944,63

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2016 adalah sebesar Rp46.624.692.440,79 dimana mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp48.132.803.944,63 atau (3,13)%. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016		TA 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
		Anggaran	Realisasi			
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.606.673.000,00	4.184.686.504,79	4.084.513.696,63	100.172.808,16	2,45
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	8.079.792.993,00	8.489.984.116,00	8.163.545.538,00	326.438.578,00	4,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.198.639.000,00	1.172.261.000,00	26.378.000,00	2,25
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	3.224.040.000,00	3.417.337.618,00	3.171.849.760,00	245.487.858,00	7,74
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.366.820.000,00	1.984.155.000,00	2.237.882.600,00	(253.727.600,00)	(11,34)
6.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	500.000.000,00	545.949.368,50	426.274.234,00	119.675.134,50	28,07
7.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	250.000.000,00	178.591.250,00	189.018.750,00	(10.427.500,00)	(5,52)
8.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	21.677.500,00	37.048.250,00	19.911.375,00	17.136.875,00	86,07
9.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	187.937.080,00	187.937.080,00	472.270.100,00	(284.333.020,00)	(60,21)
10.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.999.975.440,00	3.434.093.703,00	3.136.881.591,00	297.212.112,00	9,47
11.	Retribusi Terminal	165.000.000,00	62.292.000,00	79.597.000,00	(17.305.000,00)	(21,74)
12.	Retribusi Rumah Potong Hewan	550.000.000,00	363.076.000,00	439.740.950,00	(76.664.950,00)	(17,43)
13.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	86.196.000,00	69.768.000,00	91.410.000,00	(21.642.000,00)	(23,68)
14.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.500.000.000,00	1.456.950.000,00	1.423.850.000,00	33.100.000,00	2,32
15.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	18.000.000.000,00	13.973.184.605,50	15.321.988.236,00	(1.348.803.630,50)	(8,80)
16.	Retribusi Izin Gangguan	6.000.000.000,00	6.694.974.345,00	6.982.803.814,00	(287.829.469,00)	(4,12)
17.	Retribusi Izin Trayek	57.860.000,00	47.372.500,00	51.662.500,00	(4.290.000,00)	(8,30)
18.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	105.000.000,00	119.805.000,00	492.677.800,00	(372.872.800,00)	(75,68)
19.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	100.000.000,00	178.848.100,00	174.665.000,00	4.183.100,00	2,39
	Jumlah Retribusi Daerah	51.300.972.013,00	46.624.692.440,79	48.132.803.944,63	(1.508.111.503,84)	(3,13)

Dari rincian diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan TA 2016 dibandingkan dengan TA 2015 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor menurun karena banyaknya kendaraan batu bara dan sistem kendaraan wajib datang ke tempat pengujian karena digunakannya aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran meningkat signifikan dikarenakan adanya sosialisasi Perda dan Pemeriksaan ke tempat-tempat tersedianya Alat Pemadam Kebakaran.
3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang semakin membaik dengan adanya sosialisasi dan usaha jemput bola ke tempat-tempat objek potensial Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
4. Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekom sebenarnya adalah Pembayaran Piutang tahun lalu, sedangkan tahun 2016 belum ada penerimaan karena belum di Sakhkannya Perda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, setelah Perda yang lama dibatalkan oleh MA.
5. Retribusi terminal karena penumpang berkurang yang masuk diterminal dikarenakan telah banyak alternatif angkutan antar kota selain bus. Akibatnya terminal menjadi sepi dan usaha penyewaan kios-kios diterminal juga semakin menurun drastis.
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan karena Kota Balikpapan belum mempunyai Pelabuhan Klotok, yang dimiliki hanya pelabuhan Speed Boat sehingga intensifikasi tidak maksimal.
7. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) turun sangat signifikan dikarenakan Tenaga asing yang sebagian besar adalah Guru yang di Kontrak oleh Perusahaan Chevron & Total Fina elf.

5.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		15.084.723.650,00	15.051.835.627,69	25.716.622.557,65

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2016 adalah sebesar Rp15.051.835.627,69. Pendapatan tersebut berasal dari laba/deviden atas penyertaan modal pada BUMD yaitu :

- a. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan dasar pembagian laba selaku pemegang 3,26% dari total saham hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tanggal 14 April 2016;
- b. PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan
- c. Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2016 ini mengalami penurunan sebesar Rp(10.664.786.929,96) atau (41,47)% dari TA 2015 yang berjumlah Rp25.716.622.557,65 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 6
Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Realisasi (Rp)		Naik (Turun)	%
		2016	2015		
1.	BUMD (PDAM)	8.555.172.250,70	10.000.000.000,00	(1.444.827.749,30)	(14,45)
2.	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur	5.898.551.437,99	7.124.595.484,65	(1.226.044.046,66)	(17,21)
3.	Perusda Kota Balikpapan	598.111.939,00	8.592.027.073,00	(7.993.915.134,00)	(93,04)

No.	Uraian	Realisasi (Rp)		Naik (Turun)	%
		2016	2015		
	Jumlah	15.051.835.627,69	25.716.622.557,65	(10.664.786.929,96)	(41,47)

5.1.1.4	Lain-lain	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.977.295.750,00	94.998.432.899,16	119.678.102.442,25

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2016 adalah sebesar Rp 94.998.432.899,16. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp(24.679.669.543,09) atau (20,62)% dari TA 2015 yang berjumlah Rp119.678.102.442,25.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
TA 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016		TA 2015 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
		Anggaran	Realisasi			
1.	Penerimaan Jasa Giro	8.500.000.000,00	2.904.711.106,91	5.550.253.340,74	(2.645.542.233,83)	(47,67)
2.	Pendapatan Bunga Deposito	10.000.000.000,00	5.871.576.358,14	56.884.246.444,92	(51.012.670.086,78)	(89,68)
3.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	7.366.729,00	544.697.022,64	(537.330.293,64)	(98,65)
4.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	3.077.483.914,86	517.309.946,28	2.560.173.968,58	494,90
5.	Pendapatan Denda Retribusi	210.960.000,00	294.603.800,00	56.572.387,00	238.031.413,00	420,76
6.	Pendapatan dari angsuran/cicilan rumah	1.575.000.000,00	435.658.899,00	1.329.509.591,00	(893.850.692,00)	(67,23)
7.	Pendapatan BLUD	60.393.910.950,00	59.820.815.982,69	37.833.390.438,91	21.987.425.543,78	58,12
8.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	2.316.960,00	(2.316.960,00)	(100,00)
9.	Penggunaan Mobil Tinja	0,00	1.750.000,00	8.400.000,00	(6.650.000,00)	(79,17)
10.	Tak Terduga	0,00	10.150.023.831,06	5.386.575.967,98	4.763.447.863,08	88,43
11.	Pendapatan dari Kontribusi Plaza/Pasar/Hotel	1.025.000.000,00	1.011.285.814,00	1.424.431.220,00	(413.145.406,00)	(29,00)
12.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.272.424.800,00	11.423.156.463,50	10.140.399.122,78	1.282.757.340,72	12,65
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	95.977.295.750,00	94.998.432.899,16	119.678.102.442,25	(24.679.669.543,09)	(20,62)

Dari rincian diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan secara signifikan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2016 dibandingkan dengan TA 2015 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penurunan pendapatan dari jasa giro dan deposito terjadi karena Pemkot Balikpapan telah mencairkan deposito yang ditempatkan di Bank untuk pemenuhan kebutuhan operasional kas umum daerah;
2. Peningkatan pendapatan denda pajak karena banyaknya pembayaran pajak dari pihak ketiga yang tidak tepat waktu sehingga menimbulkan denda pajak ;
3. Peningkatan pendapatan dari BLUD meningkat karena Rumah Sakit Umum Daerah yang telah beroperasi penuh;
4. Peningkatan pendapatan dari pos tak terduga disebabkan karena pengembalian dana hibah, pendapatan hasil lelang kendaraan dan pengembalian lainnya.

5.1.2	Pendapatan Transfer	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		1.675.779.905.883,11	1.427.957.897.049,00	1.649.820.978.744,00

Pendapatan transfer pada tahun 2016 direalisasikan sebesar Rp1.427.957.897.049,00 atau sebesar 85,21 % dari target sebesar Rp1.675.779.905.883,11. Rincian realisasi dari Pendapatan Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer TA 2016

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Naik/ (Turun)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.265.362.336.883,11	1.066.561.649.134,00	1.145.301.044.119,00	(78.739.394.985,00)	(6,87)
2.	Transfer Dari Pemerintah Pusat-Lainnya	125.395.700.000,00	76.374.378.915,00	146.023.971.000,00	(69.649.592.085,00)	(47,70)
3.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	285.021.869.000,00	285.021.869.000,00	358.495.963.625,00	(73.474.094.625,00)	(20,50)
	Jumlah	1.675.779.905.883,11	1.427.957.897.049,00	1.649.820.978.744,00	(221.863.081.695,00)	(13,45)

5.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		1.265.362.336.883,11	1.066.561.649.134,00	1.145.301.044.119,00

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat tahun 2016 adalah sebesar Rp1.066.561.649.134,00 mengalami penurunan sebesar Rp(78.739.394.985,00) atau (6,87)% dibandingkan dengan realisasi TA 2015. rincian realisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 9
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Naik /Turun (Rp)	%
1.	Bagi Hasil Pajak	142.907.891.921,00	125.038.354.850,00	17.869.537.071,00	14,29
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak	457.744.385.992,00	622.563.917.269,00	(164.819.531.277,00)	(26,47)
3.	Dana Alokasi Umum	391.898.857.000,00	388.230.396.000,00	3.668.461.000,00	0,94
4.	Dana Alokasi Khusus	74.010.514.221,00	9.468.376.000,00	64.542.138.221,00	681,66
	Jumlah	1.066.561.649.134,00	1.145.301.044.119,00	(78.739.394.985,00)	(6,87)

Dari rincian realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dapat dilihat bahwa penurunan realisasi dari tahun sebelumnya terjadi karena alokasi bagi hasil bukan pajak atau pendapatan transfer yang didapat dari sektor pertambangan sumber daya alam.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No.162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan bahwa terdapat kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2013 s/d 2015 dan Dana Bagi Hasil SDA Tahun 2013 s/d 2015 yang sebagian dibayarkan di Tahun 2016 dan sisanya di Tahun 2017 sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 10

Rincian Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
Kota Balikpapan Yang Dialokasikan Dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Total Kurang Bayar Tahun 2013 S/D 2015	Total Proporsi Yang Dibayarkan Di Ta 2016	Total Porpori Yang Akan Dibayarkan Di Tahun Berikutnya
I	DBH Pajak	44.363.688.760	25.897.696.055	18.465.992.705
1	PBB sektor Pertambangan	14.772.583.100	10.416.327.871	4.356.255.229
2	PPh Pasal 21	27.120.531.770	13.876.319.105	13.244.212.665
3	PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN	2.470.573.890	1.605.049.079	865.524.811
II.	DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20.538.691.885	10.216.544.236	10.322.147.649
1	DBH-SDA Kehutanan	3.947.524.605	2.623.497.088	1.324.027.517
2	DBH-SDA Perikanan	-	-	-
3	DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi	14.152.779.000	7.589.412.705	6.563.366.295
4	DBH-SDA Pertambangan Gas Bumi	-	-	-
5	DBH-SDA Mineral dan Batu Bara	2.438.388.280	3.634.443	2.434.753.837
Total Kurang Bayar & Lebih Bayar DBH Pajak/SDA		64.902.380.645	36.114.240.291	28.788.140.354

5.1.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		177.129.243.000,00	142.907.891.921,00	125.038.354.850,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2016 adalah sebesar Rp142.907.891.921,00 mengalami peningkatan sebesar Rp17.869.537.071,00 atau 14,29% dari TA 2015 yang berjumlah Rp125.038.354.850,00. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

Tabel 11
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2016

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi		%	Naik/(turun)
		2016	2015		
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan	24.421.546.987,00	22.301.369.250,00	9,51	2.120.177.737,00
2.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan	0,00	3.433.595.000,00	(100,00)	(3.433.595.000,00)
3.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan Pph Pasal 21	118.486.344.934,00	99.303.390.600,00	19,32	19.182.954.334,00
	Jumlah	142.907.891.921,00	125.038.354.850,00	14,29	17.869.537.071,00

5.1.2.1.2 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
	609.805.540.883,11	457.744.385.992,00	622.563.917.269,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2016 adalah sebesar Rp 457.744.385.992,00 mengalami penurunan sebesar Rp(164.819.531.277,00) atau (26,47)% dari TA 2015 yang berjumlah Rp622.563.917.269,00. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

Tabel 12
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2016

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi		%	Kenaikan / (Penurunan)
		2016	2015		
1.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	4.148.212.588,00	3.417.293.201,00	21,39	730.919.387,00
2.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)	0,00	8.339.885,00	(100,00)	(8.339.885,00)
3.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0,00	376.992.244.293,00	(100,00)	(376.992.244.293,00)
4.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	452.025.539,00	0,00	0,00	452.025.539,00
5.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	0,00	703.264.033,00	(100,00)	(703.264.033,00)
6.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	28.700.039.031,00	55.278.418.955,00	(48,08)	(26.578.379.924,00)
7.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	113.853.261.436,00	186.164.356.902,00	(38,84)	(72.311.095.466,00)
8.	Bagi Hasil dari Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara	310.590.847.398,00	0,00	0,00	310.590.847.398,00
	Jumlah	457.744.385.992,00	622.563.917.269,00	(26,47)	(164.819.531.277,00)

5.1.2.1.3 Pendapatan Dana Alokasi Umum	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
	391.898.857.000,00	391.898.857.000,00	388.230.396.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 ini, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 13
Realisasi Pendapatan-Dana Alokasi Umum TA 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	% Naik (Turun)
	TA 2016	TA 2015		
Dana Alokasi Umum	391.898.857.000,00	388.230.396.000,00	3.668.461.000,00	0,94
Jumlah	391.898.857.000,00	388.230.396.000,00	3.668.461.000,00	

5.1.2.1.4 Pendapatan Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
	86.528.696.000,00	74.010.514.221,00	9.468.376.000,00

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2016 adalah sebesar Rp74.010.514.221,00 mengalami peningkatan sebesar Rp64.542.138.221,00 atau 681,66% dari TA 2015 yang berjumlah Rp9.468.376.000,00. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

Tabel 14
Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2016 dan TA 2015

No.	Uraian	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Naik/(Turun)	%
1.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	27.702.509.764,00	-	27.702.509.764,00	-
2.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	79.266.000,00	-	79.266.000,00	-
3.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	64.854.000,00	-	64.854.000,00	-
4.	DAK Bidang Keluarga Berencana	430.646.400,00	-	430.646.400,00	-
5.	DAK Bidang Kehutanan	153.411.000,00	-	153.411.000,00	-
6.	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	3.639.768.000,00	(3.639.768.000,00)	-
7.	DAK Bidang Kesehatan	12.022.549.057,00	-	12.022.549.057,00	(100,00)
8.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	489.567.000,00	4.299.808.000,00	(3.810.241.000,00)	-
9.	DAK Bidang Perdagangan	382.200.000,00	1.528.800.000,00	(1.146.600.000,00)	(88,61)
10.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	133.137.000,00	-	133.137.000,00	(75,00)
11.	DAK Bidang Pertanian	622.644.000,00	-	622.644.000,00	-
12.	DAK Bidang Pendidikan	5.790.744.000,00	-	5.790.744.000,00	-
13.	DAK Bidang Perhubungan	112.890.000,00	-	112.890.000,00	-
14.	DAK Bidang Ifrastruktur Publik Daerah (IPD)	26.026.096.000,00	-	26.026.096.000,00	-
	Jumlah	74.010.514.221,00	9.468.376.000,00	64.542.138.221,00	681,66

5.1.2.2	Transfer	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
	Pemerintah Pusat	125.395.700.000,00	76.374.378.915,00	146.023.971.000,00
	Lainnya			

Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan Pendapatan Dana Penyesuaian yang direalisasikan sebesar Rp76.374.378.915,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp(69.649.592.085,00) atau (47,70)% dari TA 2015 yang berjumlah Rp 146.023.971.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15
Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian)
TA 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik/(Turun)	%
	2016	2015		
Tunjangan Profesi Guru PNSD	69.580.478.915,00	122.407.124.000,00	(52.826.645.085,00)	(43,16)
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.793.900.000,00	0.00	1.793.900.000,00	0.00
Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	23.616.847.000,00	(18.616.847.000,00)	(78,83)
Jumlah	76.374.378.915,00	146.023.971.000,00	(69.649.592.085,00)	(47,70)

5.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		285.021.869.000,00	285.021.869.000,00	358.495.963.625,00

Transfer Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kaltim dan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim yang direalisasikan sebesar Rp285.021.869.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp (73.474.094.625,00) atau (20,50)% dari TA 2015 yang berjumlah Rp358.495.963.625,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		181.980.819.000,00	181.980.819.000,00	222.438.963.625,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2016 adalah sebesar Rp 181.980.819.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(40.458.144.625,00) atau (18,19)% dari TA 2015 yang berjumlah Rp 222.438.963.625,00. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari:

Tabel 16
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Naik / (Turun)
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	51.412.092.000,00	52.073.934.000,00	(1,27)	(661.842.000,00)
2.	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	36.437.160.000,00	49.675.501.700,00	(26,65)	(13.238.341.700,00)
3.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	71.556.031.000,00	105.387.154.700,00	(32,10)	(33.831.123.700,00)
4.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	365.659.000,00	439.311.225,00	(16,77)	(73.652.225,00)
5.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	22.209.877.000,00	14.863.062.000,00	49,43	7.346.815.000,00
	Jumlah	181.980.819.000,00	222.438.963.625,00	(18,19)	(40.458.144.625,00)

5.1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		103.041.050.000,00	103.041.050.000,00	136.057.000.000,00

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi TA 2016 adalah sebesar Rp103.041.050.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(33.015.950.000,00) atau (24,27)% dari TA 2015 yang berjumlah Rp136.057.000.000,00 seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 17
Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim TA 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi (Rp)		%	Naik / (Turun)
	2016	2015		
Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim	103.041.050.000,00	136.057.000.000,00	(24,27)	(33.015.950.000,00)
Jumlah	103.041.050.000,00	136.057.000.000,00	(24,27)	(33.015.950.000,00)

5.1.3	Lain - Lain Pendapatan Yang sah	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		3.000.000.000,00	5.070.000.000,00	1.185.000.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.070.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.885.000.000,00 atau 327,85% dari TA 2015 yang berjumlah Rp1.185.000.000,00 seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 18
Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2016 dan 2015

Uraian	TA 2016 (Rp)	TA 2015 (Rp)	%	Naik / (Turun)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.070.000.000,00	1.185.000.000,00	327,85	3.885.000.000,00
Jumlah	5.070.000.000,00	1.185.000.000,00	327,85	3.885.000.000,00

Hibah yang diperoleh tersebut merupakan program bantuan dari Pemerintah Pusat dengan AUSAID untuk pelaksanaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) demi ketersediaan air bersih yang dilaksanakan oleh PDAM. Hibah senilai Rp5.070.000.000 terdiri dari hibah AUSAID sebesar Rp2.751.000.000,00 dan hibah APBN sebesar Rp2.319.000.000,00.

5.2	BELANJA DAERAH	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		2.458.557.377.868,20	2.114.716.897.992,83	2.906.591.513.980,55

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga dimana dalam Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp2.458.557.377.868,20 dan direalisasikan sebesar Rp2.114.730.397.992,83. Realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp(791.861.115.987,72) atau (27,24)% dari Tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp2.906.591.513.980,55 seperti yang terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 19
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2016

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Naik/(Turun)	%
1.	Belanja Operasi	1.701.977.805.318,20	1.549.526.450.521,29	1.792.086.010.167,27	(242.559.559.645,98)	(13,54)
2.	Belanja Modal	749.079.572.550,00	564.259.837.371,54	1.090.412.502.613,28	(526.152.665.241,74)	(48,25)
3.	Belanja Tak Terduga	7.500.000.000,00	930.610.100,00	24.093.001.200,00	(23.162.391.100,00)	(96,14)
	Jumlah	2.458.557.377.868,20	2.114.716.897.992,83	2.906.591.513.980,55	(791.874.615.987,72)	(27,24)

Rincian Belanja per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 1** sedangkan rincian belanja per rekening secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 2**

5.2.1	Belanja Operasi	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		1.701.977.805.318,20	1.549.526.450.521,29	1.792.086.010.167,27

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja subsidi.

Belanja Operasi bila dibandingkan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 20
Rincian Belanja Operasi per 31 Desember TA 2016 dan 2015

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)	%	Naik/(Turun)
	Belanja Operasi					
1	Belanja Pegawai	756.432.514.360,00	709.143.921.418,53	697.690.227.970,37	1,64	11.453.693.448,16
2	Belanja Barang dan jasa	781.812.245.958,20	696.574.344.801,76	794.398.873.850,90	(12,31)	(97.824.529.049,14)
3	Belanja Hibah	155.433.045.000,00	142.574.661.901,00	292.942.600.346,00	(51,33)	(150.367.938.445,00)
4	Belanja Subsidi	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0.00	0.00
5	Belanja Bantuan Sosial	7.500.000.000,00	433.522.400,00	6.254.308.000,00	(93,07)	(5.820.785.600,00)
	Jumlah	1.701.977.805.318,20	1.549.526.450.521,29	1.792.086.010.167,27	(13,53)	(242.559.559.646,98)

Rincian belanja operasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1.1	Belanja Pegawai	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		756.432.514.360,00	709.143.921.418,53	697.690.227.970,37

Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai yang merupakan realisasi belanja gaji, tunjangan Pegawai Negeri Sipil, penerimaan Kepala Daerah dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp11.453.693.448,16 atau 1,64% dari TA 2015 dimana secara umum disebabkan karena adanya pembayaran atas tunggakan tunjangan profesi guru tahun 2014 sejumlah 620 orang dan tahun-tahun sebelumnya. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Gaji dan Tunjangan	384.820.202.721,00	366.288.309.860,20	366.419.861.355,00	(131.551.494,80)	(0,04)
2.	Tambahan Penghasilan PNS	344.837.863.639,00	317.783.603.036,00	306.094.379.126,00	11.689.223.910,00	3,82
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.628.920.000,00	4.628.120.000,00	4.555.951.000,00	72.169.000,00	1,58
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	16.884.086.000,00	16.647.962.766,83	15.596.765.689,37	1.051.197.077,46	6,74
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.579.671.000,00	1.345.503.755,50	1.334.065.800,00	11.437.955,50	0,86
6.	Uang Lembur	2.681.771.000,00	2.450.422.000,00	3.689.205.000,00	(1.238.783.000,00)	(33,58)
	Jumlah	756.432.514.360,00	709.143.921.418,53	697.690.227.970,37	11.453.693.448,16	1,64

5.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		781.812.245.958,20	696.574.344.801,76	794.398.873.850,90

Realisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp696.574.344.801,76 merupakan belanja barang dan jasa terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Realisasi TA 2016 mengalami penurunan sebesar Rp (97.824.529.049,14) atau (12,31)% Rincian Realisasi belanja barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
	Belanja Barang dan Jasa	781.812.245.958,20	696.574.344.801,76	794.398.873.850,90	(97.824.529.049,14)	(12,31)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	27.074.846.683,00	24.896.871.349,00	33.517.385.377,00	(8.620.514.028,00)	(25,72)
2	Belanja Bahan/Material	31.013.789.435,00	28.542.025.472,51	36.381.397.074,14	(7.839.371.601,63)	(21,55)
3	Belanja Jasa Kantor	86.757.471.015,00	75.362.574.029,41	74.274.588.364,16	1.087.985.665,25	1,46
4	Belanja Premi Asuransi	3.518.269.014,00	3.394.000.013,00	1.646.653.050,65	1.747.346.962,35	106,12
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.995.973.138,00	30.914.227.212,75	39.229.012.375,46	(8.314.785.162,71)	(21,20)
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.955.615.653,00	12.939.600.421,00	18.235.732.436,00	(5.296.132.015,00)	(29,04)
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.616.813.000,00	4.324.954.000,00	4.288.824.500,00	36.129.500,00	0,84
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.407.152.000,00	1.266.458.800,00	1.714.717.700,00	(448.258.900,00)	(26,14)
9	Belanja Sewa Alat Berat	30.000.000,00	29.150.000,00	0,00	29.150.000,00	-
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.031.064.750,00	4.857.450.107,00	5.136.665.240,00	(279.215.133,00)	(5,44)
11	Belanja Makanan dan Minuman	80.034.523.195,00	73.063.687.892,77	91.939.382.658,60	(18.875.694.765,83)	(20,53)
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.008.641.700,00	1.698.071.550,00	2.687.434.700,00	(989.363.150,00)	(36,81)
13	Belanja Pakaian Kerja	3.046.249.444,00	2.985.160.487,00	3.413.858.700,00	(428.698.213,00)	(12,56)
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.172.757.100,20	3.835.926.800,00	3.291.357.110,00	544.569.690,00	16,55
15	Belanja Perjalanan Dinas	59.184.396.812,00	51.683.550.036,04	51.619.828.939,30	63.721.096,74	0,12
16	Belanja Pemeliharaan	47.370.993.083,00	42.607.562.400,00	58.080.583.681,00	(15.473.021.281,00)	(26,64)
17	Belanja Jasa Konsultansi	6.030.872.700,00	4.683.585.940,00	28.600.666.492,00	(23.917.080.552,00)	(83,62)
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.208.961.990,00	10.523.478.167,00	0.00	10.523.478.167,00	-
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.713.920.000,00	1.642.030.000,00	1.847.135.000,00	(205.105.000,00)	(11,10)
20	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.562.382.022,00	5.002.641.463,33	18.056.708.483,00	(13.054.067.019,67)	(72,29)
21	Honorarium PNS	49.710.349.500,00	44.734.595.470,00	70.224.441.257,77	(25.489.845.787,77)	(36,30)
22	Honorarium Non PNS	174.924.866.200,00	170.902.627.514,00	169.149.296.172,56	1.753.331.341,44	1,04
23	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.995.780.000,00	6.610.915.000,00	14.780.915.000,00	(8.170.000.000,00)	(55,27)
24	Belanja Barang Kapitasi JKN	7.319.434.350,00	3.439.198.962,87	2.637.216.085,75	801.982.877,12	30,41
25	Belanja Barang Yang Nilai Satuannya Sampai Dengan Rp 250.000,00	6.890.020.690,00	6.845.857.532,00	11.148.069.798,13	(4.302.212.266,13)	(38,59)
26	Belanja Tali Asih, Santunan, Kompensasi, General Check Up	193.290.000,00	115.476.825,00	623.158.706,00	(507.681.881,00)	(81,47)
27	Belanja Jasa Berlangganan	389.770.000,00	340.896.459,00	282.688.531,00	58.207.928,00	20,59
28	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	769.833.320,00	690.380.728,00	633.220.897,00	57.159.831,00	9,03
29	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	182.730.000,00	181.730.000,00	327.633.500,00	(145.903.500,00)	(44,53)
30	Belanja Barang Dan Jasa BLUD RSKB Sayang Ibu	4.276.800.000,00	3.172.726.543,97	2.266.288.118,34	906.438.425,63	40,00
31	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	9.180.000,00	8.295.000,00	15.296.000,00	(7.001.000,00)	(45,77)
32	Belanja Barang Perlengkapan Dapur	18.247.000,00	18.167.000,00	39.266.230,00	(21.099.230,00)	(53,73)
33	Belanja Penyelesaian Perkara Hukum	48.450.000,00	48.450.000,00	40.324.850,00	8.125.150,00	20,15
34	Belanja Kontribusi Lomba	103.400.000,00	58.980.000,00	66.470.000,00	(7.490.000,00)	(11,27)
35	Belanja Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	2.923.237.664,00	2.881.909.664,00	3.332.815.725,00	(450.906.061,00)	(13,53)

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
	Belanja Barang dan Jasa	781.812.245.958,20	696.574.344.801,76	794.398.873.850,90	(97.824.529.049,14)	(12,31)
36	Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	15.448.922.800,00	14.162.845.238,00	18.879.969.632,00	(4.717.124.394,00)	(24,98)
37	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	3.338.587.065,00	2.432.934.913,03	2.552.685.482,64	(119.750.569,61)	(4,69)
38	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Non PNS)	2.111.208.000,00	1.932.985.650,00	2.533.942.423,00	(600.956.773,00)	(23,72)
39	Belanja bahan Perlengkapan Kamar	14.135.000,00	14.073.400,00	445.000,00	13.628.400,00	3.062,56
40	Belanja Pengadaan Perlengkapan Penghias ruangan	4.668.000,00	4.598.000,00	103.533.020,00	(98.935.020,00)	(95,56)
41	Belanja Bahan Perlengkapan Tindakan Medik	0,00	-	146.246.887,00	(146.246.887,00)	(100,00)
42	Belanja Jasa Perizinan	6.000.000,00	4.748.592,00	4.748.592,00	-	-
43	Belanja Pengurusan Surat-Surat Kendaraan	0,00	-	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(100,00)
44	Belanja Kerjasama RSUD	1.184.022.700,00	1.184.007.204,00	2.561.573.933,00	(1.377.566.729,00)	(53,78)
45	Belanja Tim Pemandu Haji Daerah	75.168.000,00	75.167.016,00	78.476.352,00	(3.309.336,00)	(4,22)
46	Belanja Barang Perangkat Lunak	10.700.000,00	10.655.000,00	1.087.992.000,00	(1.077.337.000,00)	(99,02)
47	Belanja Barang dan Jasa Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	86.400.000,00	-	0,00	-	-
48	Belanja Pegawai BLUD dan Kapitasi JKN	45.811.218.535,00	38.188.839.059,01	16.869.273.072,24	21.319.565.986,77	126,38
49	Belanja Pegawai Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	799.553.000,00	-	0,00	-	-
50	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	20.431.581.400,00	14.260.277.890,07	48.154.704,16	14.212.123.185,91	29.513,47

5.2.1.3	Belanja Subsidi	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00

Belanja Subsidi direalisasikan sebesar Rp800.000.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp800.000.000,00. Belanja subsidi diperuntukkan bagi peningkatan pembangunan Kota Balikpapan melalui Perusahaan Daerah Kota Balikpapan. Belanja Subsidi jika dibandingkan dengan Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23
Realisasi Belanja Subsidi TA 2016 dan 2015

Uraian	TA 2016 (Rp)	TA 2015 (Rp)
Belanja Subsidi	800.000.000,00	800.000.000,00
Jumlah	800.000.000,00	800.000.000,00

Belanja subsidi diperuntukkan bagi anak-anak sekolah yang memanfaatkan Bis Sekolah, yang dikelola oleh Perusda Kota Balikpapan. Bis Sekolah diperoleh hibah dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan Kota Balikpapan meraih anugerah Wahana Tata Nugraha. Dana subsidi dipergunakan Perusda Kota Balikpapan untuk membiayai operasional bis sehingga biaya transport untuk anak-anak sekolah menjadi terjangkau.

Menurut data dari Perusda Kota Balikpapan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Biaya yang diperlukan untuk operasional bus sekolah tahun 2016 adalah Rp1.077.850.170,94
- 2) Biaya rata-rata per siswa adalah Rp10.111,30 yang didapat dari pembagian seluruh biaya sebesar Rp1.077.850.170,94 dengan asumsi jumlah karcis terjual dari 106.598 siswa
- 3) Tarif yang dikenakan pada siswa adalah Rp2.000/karcis siswa sehingga pendapatan yang diperoleh dari 106.598 siswa adalah sebesar Rp213.197.140,00

4) Dari hasil pendapatan Rp213.197.140,00, maka untuk menutupi biaya operasional bus sekolah yang berjumlah sebesar Rp1.077.850.170,94 diperlukan subsidi Pemkot Balikpapan kurang lebih sebesar Rp864.653.030,00

5.2.1.4	Belanja Hibah	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		155.433.045.000,00	142.574.661.901,00	292.942.600.346,00

Belanja Hibah direalisasikan sebesar Rp142.574.661.901,00 atau menurun sebesar Rp(150.367.938.445,00) / (51,33)% dari realisasi TA 2015 yang berjumlah sebesar Rp292.942.600.346,00. Belanja hibah diperuntukkan bagi peningkatan dan partisipasi masyarakat/lembaga/organisasi dalam pembangunan dan pendidikan Kota Balikpapan. Realisasi Belanja Hibah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 24
Realisasi Belanja Hibah TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	90.918.420.000,00	88.474.003.758,00	198.521.328.097,00	(55,43)	(110.047.324.339,00)
2.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	22.766.850.000,00	18.015.775.000,00	24.339.105.000,00	(25,98)	(6.323.330.000,00)
3.	Belanja Hibah Dana BOS	41.747.775.000,00	36.084.883.143,00	41.643.951.600,00	(13,35)	(5.559.068.457,00)
4.	Belanja Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat	0.00	0.00	28.438.215.649,00	(100,00)	(28.438.215.649,00)
	Jumlah	155.433.045.000,00	142.574.661.901,00	292.942.600.346,00	(51,33)	(150.367.938.445,00)

5.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		7.500.000.000,00	433.522.400,00	6.254.308.000,00

Belanja Bantuan Sosial direalisasikan sebesar Rp433.522.400,00 atau menurun sebesar Rp (5.820.785.600,00)/ (93,07)% dari realisasi TA 2015 yang berjumlah sebesar Rp 6.254.308.000,00. Belanja bantuan sosial diperuntukkan bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Realisasi Bantuan Sosial bila dibandingkan dengan tahun lalu dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 25
Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015

Uraian	TA 2016 (Rp)	TA 2015 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	433.522.400,00	6.254.308.000,00
Jumlah	433.522.400,00	6.254.308.000,00

5.2.2	Belanja Modal	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		749.079.572.550,00	564.259.837.371,54	1.090.412.502.613,28

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp564.259.837.371,54 merupakan pengeluaran yang menambah aset tetap Pemerintah Kota Balikpapan. Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp (526.152.665.241,74) atau (48,25)% dibandingkan dengan TA 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26
Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Belanja Tanah	99.173.684.276,00	83.846.532.317,00	117.543.728.129,00	(33.697.195.812,00)	47,77
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	58.987.622.261,00	52.524.546.155,26	104.350.088.780,92	(51.825.542.625,66)	87,04
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	388.825.715.293,00	285.244.005.338,18	688.996.031.320,36	(403.752.025.982,18)	88,65
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	166.310.635.679,00	118.372.105.607,84	174.684.185.228,00	(56.312.079.620,16)	86,69
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.132.020.926,00	11.340.765.688,26	1.622.218.155,00	9.718.547.533,26	81,85
6.	Belanja Aset Lainnya	15.649.894.115,00	12.931.882.265,00	3.216.251.000,00	9.715.631.265,00	86,33
	Jumlah	749.079.572.550,00	564.259.837.371,54	1.090.412.502.613,28	(526.152.665.241,74)	(48,25)

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1	Belanja Modal Tanah	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		99.173.684.276,00	83.846.532.317,00	117.543.728.129,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp83.846.532.317,00 mengalami penurunan sebesar Rp(33.697.195.812,00) atau (28,67)% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp117.543.728.129,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Modal Tanah	99.173.684.276,00	83.846.532.317,00	117.543.728.129,00	(33.697.195.812,00)	(28,67)
2	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan	-	-	4.532.675.000,00	(4.532.675.000,00)	(100,00)
3	Belanja modal Pengadaan Hutan	-	-	22.284.900,00	(22.284.900,00)	(100,00)
4	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	-	-	9.319.400,00	(9.319.400,00)	(100,00)
5	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	37.205.248.000,00	36.307.995.000,00	24.742.271.754,00	11.565.723.246,00	46,74
6	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	61.968.436.276,00	47.538.537.317,00	88.237.177.075,00	(40.698.639.758,00)	(46,12)

Dari rincian di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung yang merupakan :

1. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan senilai Rp9.559.283.000,00 untuk pembangunan jalan Letjend Suprpto dan untuk Freeway Paket V Kelurahan Karang Joang;
2. Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air senilai Rp21.807.445.117,00 untuk pembangunan waduk teritip dan bendali IV Kel. Sepinggan;
3. Pengadaan tanah untuk stadion Balikpapan senilai Rp11.052.809.200,00;
4. Pengadaan tanah untuk drainase Kelurahan Graha Indah senilai Rp 5.119.000.000,00

5.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		58.987.622.261,00	52.524.546.155,26	104.350.088.780,92

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 52.524.546.155,26 mengalami penurunan sebesar Rp(51.825.542.625,66) atau (49,67)% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp 104.350.088.780,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
I	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.987.622.261,00	52.524.546.155,26	104.350.088.780,92	(51.825.542.625,66)	-49,67
1	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	-	-	4.224.200.000,00	(4.224.200.000,00)	-100
2	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	197.714.000,00	197.714.000,00	-	197.714.000,00	-
3	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	7.110.555.060,00	7.051.843.722,00	26.210.969.895,00	(19.655.006.173,00)	-73,6
4	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.770.836.000,00	3.572.706.460,00	10.944.099.276,00	(7.371.392.816,00)	-
5	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	16.000.000,00	15.950.000,00	-	15.950.000,00	-
6	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	51.810.000,00	51.810.000,00	-	51.810.000,00	-
7	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	313.170.000,00	302.410.000,00	384.892.260,00	(82.482.260,00)	-21,43
8	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	16.000.000,00	14.627.000,00	20.310.000,00	(5.683.000,00)	-27,98
9	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	385.620.050,00	384.608.050,00	61.995.500,00	322.612.550,00	520,38
10	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	169.950.000,00	169.726.700,00	456.193.000,00	(286.466.300,00)	-62,79
11	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	104.493.000,00	104.233.000,00	284.582.000,00	(180.349.000,00)	-63,37
12	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	3.739.225.080,00	3.479.123.020,00	5.252.018.400,00	(4.072.171.591,00)	-53,93

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
13	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.826.120.329,00	11.037.876.666,00	11.036.904.517,00	(226.634.901,00)	-2,01
14	Belanja modal Pengadaan Komputer	16.993.791.410,00	13.705.278.833,00	11.758.537.889,00	1.946.740.944,00	16,56
15	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	294.640.000,00	280.252.750,00	349.571.500,00	(69.318.750,00)	-19,83
16	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	923.766.250,00	893.817.555,00	3.634.647.365,00	(2.740.829.810,00)	-75,41
17	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	168.596.000,00	153.565.300,00	870.003.850,00	(716.438.550,00)	-82,35
18	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	-	-	34.834.800,00	(34.834.800,00)	-100
19	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	4.525.432.700,00	4.423.253.015,29	19.762.573.609,14	(15.339.320.593,85)	-77,62
20	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	1.249.846.500,00	999.909.982,97	129.884.200,00	870.025.782,97	669,85
21	Belanja modal Pengadaan Unit- Unit Laboratorium	3.822.840.832,00	3.630.922.021,00	1.355.766.665,78	2.275.155.355,22	167,81
22	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	735.061.000,00	529.336.500,00	177.090.698,00	352.245.802,00	198,91
23	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	171.174.850,00	136.939.880,00	19.756.000,00	117.183.880,00	593,16
24	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	-	-	238.524.000,00	(238.524.000,00)	-100
25	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.175.609.200,00	1.163.271.700,00	978.198.195,00	185.073.505,00	18,92
26	Belanja Modal Pengadaan Sarana/ Peralatan Pengolahan Sampah	43.650.000,00	43.650.000,00	0,00	(617.957.800,00)	-93,4
27	Belanja Modal Media Informasi	0,00	0,00	2.299.276.211,00	(2.299.276.211,00)	-
28	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Tempat Pembuangan Sampah/Akhir	0,00	0,00	2.011.685.800,00	(2.011.685.800,00)	-

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
29	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Pameran	0,00	0,00	89.045.000,00	(89.045.000,00)	-
30	Belanja Modal Pengadaan Linen Kamar dan Pasien	0,00	0,00	138.562.050,00	(138.562.050,00)	-
31	Belanja Modal Pengadaan Sarana/ Peralatan Pemadam Kebakaran	181.720.000,00	181.720.000,00	1.605.835.000,00	(1.424.115.000,00)	(88,68)
32	Belanja Modal Pengadaan Alat Permainan	0,00	0,00	20.131.100,00	(20.131.100,00)	-

5.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		388.825.715.293,00	285.244.005.338,18	688.996.031.320,36

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp285.244.005.338,18 mengalami penurunan sebesar Rp(403.752.025.982,18) atau (58,60)% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp 688.996.031.320,36 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
I	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	388.825.715.293,00	285.244.005.338,18	688.996.031.320,36	(403.752.025.982,18)	(58,60)
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	373.590.726.613,00	271.972.262.325,18	676.396.988.660,36	(404.424.726.335,18)	(59,79)
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	203.775.000,00	98.619.000,00	1.944.038.420,00	(1.845.419.420,00)	(94,93)
3	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	-	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
4	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	94.056.207,00	94.056.207,00	892.689.119,00	(798.632.912,00)	(89,46)
5	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	-	-	42.283.350,00	(42.283.350,00)	(100,00)
6	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	283.200.000,00	-	130.327.000,00	(130.327.000,00)	(100,00)
7	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	1.549.755.780,00	992.230.260,00	1.315.288.000,00	(323.057.740,00)	(24,56)
8	Belanja Modal Pengadaan Taman serta Sarana dan Prasarananya	170.865.000,00	168.015.000,00	2.081.831.565,00	(1.913.816.565,00)	(91,93)
9	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Pemakaman	441.249.500,00	441.249.500,00	309.667.000,00	131.582.500,00	42,49
10	Belanja Modal Pengadaan Pendukung Bangunan	10.723.117.193,00	9.883.039.606,00	5.877.918.206,00	4.005.121.400,00	68,14
11	Belanja Modal Pengadaan Prasarana Pariwisata	1.500.000.000,00	1.336.688.000,00	0,00	1.336.688.000,00	0,00
12	Belanja Modal Pengadaan Prasarana Pengolahan Sampah	268.970.000,00	257.845.440,00	0,00	257.845.440,00	0,00

5.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		166.310.635.679,00	118.372.105.607,84	174.684.185.228,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp118.372.105.607,84 mengalami penurunan sebesar Rp(56.312.079.620,16) atau (32,24)% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp 174.684.185.228,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 30
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
I	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	166.310.635.679,00	118.372.105.607,84	174.684.185.228,00	(56.312.079.620,16)	(32,24)
1	Belanja modal Pengadaan Jalan	96.442.482.350,00	81.397.052.647,82	78.449.243.490,00	2.947.809.157,82	3,76
2	Belanja modal Pengadaan Jembatan	6.006.298.300,00	3.014.262.714,02	20.424.329.600,00	(17.410.066.885,98)	(85,24)
3	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	-	-	1.622.252.220,00	(1.622.252.220,00)	(100,00)
4	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-	538.728.000,00	(538.728.000,00)	(100,00)
5	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.354.301.500,00	1.028.187.844,00	793.233.159,00	234.954.685,00	29,62
6	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	576.236.500,00	401.509.598,00	-	401.509.598,00	0,00
7	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	56.807.228.329,00	28.355.711.809,00	66.931.716.848,00	(38.576.005.039,00)	(57,63)
8	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	36.000.000,00	35.012.000,00	2.731.000,00	32.281.000,00	1182,02
9	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.217.007.000,00	1.043.058.000,00	-	1.043.058.000,00	0,00
10	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	-	-	16.610.000,00	(16.610.000,00)	(100,00)
11	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	296.766.000,00	296.566.000,00	99.330.000,00	197.236.000,00	198,57
12	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-	155.534.980,00	(155.534.980,00)	(100,00)
13	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	677.369.000,00	675.717.700,00	1.041.840.700,00	(366.123.000,00)	(35,14)
14	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	2.889.521.700,00	2.117.602.295,00	4.608.635.231,00	(2.491.032.936,00)	(54,05)
15	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	7.425.000,00	7.425.000,00	-	7.425.000,00	0,00

5.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		20.132.020.926,00	11.340.765.688,26	1.622.218.155,00

Realisasi Belanja Aset tetap lainnya sebesar Rp11.340.765.688,26 mengalami peningkatan sebesar Rp9.718.547.533,26 atau 599,09% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp 1.622.218.155,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2016

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
I	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.132.020.926,00	11.340.765.688,26	1.622.218.155,00	9.718.547.533,26	599,09

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja modal Pengadaan Buku	1.712.762.026,00	1.195.652.410,00	1.344.179.155,00	(148.526.745,00)	(11,05)
2	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	-	-	46.255.000,00	(46.255.000,00)	(100,00)
3	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	244.260.000,00	221.701.900,00	222.874.000,00	(1.172.100,00)	(0,53)
4	Belanja modal Pengadaan Tanaman	-	-	8.910.000,00	(8.910.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal BLUD RSKBSI	360.000.000,00	329.781.847,00	0,00	329.781.847,00	0,00
6	Belanja Modal BLUD Puskesmas.	816.904.000,00	575.600.958,30	0,00	575.600.958,30	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Permainan	-	-	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal BLUD RSUD	12.666.530.400,00	5.112.689.572,96	0,00	5.112.689.572,96	0,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Tak Berwujud	4.331.564.500,00	3.905.339.000,00	0,00	3.905.339.000,00	0,00

5.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		15.649.894.115,00	12.931.882.265,00	3.216.251.000,00

Realisasi Belanja Aset lainnya sebesar Rp12.931.882.265,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.715.631.265,00 atau 302,08% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp3.216.251.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 32
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2016 dan TA 2015

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan (Penurunan)	%
I	Belanja Modal Aset Lainnya	15.649.894.115,00	12.931.882.265,00	3.216.251.000,00	9.715.631.265,00	302,08
1	Belanja Modal Aset Lainnya	1.227.595.000,00	1.091.310.000,00	3.216.251.000,00	(2.124.941.000,00)	(66,07)
2	Aset Tidak Berwujud.	14.422.299.115,00	11.840.572.265,00	0.00	11.840.572.265,00	0.00

5.2.3	Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		7.500.000.000,00	930.610.100,00	24.093.001.200,00

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp7.500.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp930.610.100,00. Belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Realisasi belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 ini, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 menunjukkan penurunan sebesar Rp (23.162.391.100,00) atau (96,14)%.

Belanja tidak terduga TA 2016 direalisasikan untuk rehabilitasi dan bantuan atas bencana yang terjadi di Kota Balikpapan selama tahun 2016 dimana diantaranya adalah bencana kebakaran di Jl. Jend. A. Yani, Jl. Manunggal dan Jl. Suprpto selain itu juga termasuk penanganan bencana longsor di Kel, Baru Ilir dan bencana kekeringan waduk manggar.

5.2.4	TRANSFER	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		1.085.000.000,00	998.806.796,00	998.806.796,00

5.2.4.1	Transfer/ Bantuan Keuangan	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		1.085.000.000,00	998.806.796,00	998.806.796,00

Transfer/Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan yang diberikan pada partai politik dengan alokasi sebesar Rp1.085.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp998.806.796,00.

Dari daftar realisasi belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik TA 2016 dapat dijelaskan bahwa terdapat satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang alokasi bantuannya tidak direalisasikan karena dualisme kepengurusan sehingga Pemerintah Kota Balikpapan tidak dapat memberikan rekomendasi.

5.3.	PEMBIAYAAN	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		224.891.480.572,09	224.891.480.572,09	905.516.004.130,80

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sehubungan dengan menutup/mendanai defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran.

5.3.1	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		227.891.480.572,09	227.891.480.572,09	935.696.004.130,80

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp227.891.480.572,09 merupakan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 33
Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2016 dan 2015

Uraian	TA 2016 (Rp)	TA 2015 (Rp)
Penggunaan SiLPA	227.891.480.572,09	935.696.004.130,80
Jumlah	227.891.480.572,09	935.696.004.130,80

5.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	30.180.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan merupakan investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2016 dan 2015			
No.	Uraian	TA 2016 (Rp)	TA 2015 (Rp)
1.	Penyertaan Modal pada BPD Kaltim	0.00	7.120.000.000,00
2.	Penyertaan Modal pada PDAM Kota Balikpapan	3.000.000.000,00	14.500.000.000,00
3.	Penyertaan Modal pada Perusda Kota Balikpapan	0.00	8.560.000.000,00
	Jumlah	3.000.000.000,00	30.180.000.000,00

5.3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
		0,00	102.568.681.508,55	227.891.480.572,09

SiLPA tahun berkenaan sebesar Rp 102.568.681.508,55 merupakan selisih realisasi pendapatan yang tidak tercapai dengan penghematan belanja daerah.

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

		Tahun Anggaran 2016 (Rp)	Tahun Anggaran 2015 (Rp)
5.4	LAPORAN PERUBAHAN SAL	102.568.681.508,55	227.891.480.572,09

Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran 2016 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL menunjukkan Saldo Anggaran Akhir sebesar Rp102.554.436.289,55.

Tabel 35 Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2016 dan 2015		
Uraian	TA 2016 (Rp)	TA 2015 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	227.891.480.572,09	935.696.004.130,80
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(227.891.480.572,09)	(935.696.004.130,80)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	102.568.681.508,55	227.891.480.572,09
Subtotal	102.568.681.508,55	227.891.480.572,09
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	102.568.681.508,55	227.891.480.572,09

		Tahun Anggaran 2016 (Rp)	Tahun Anggaran 2015 (Rp)
5.4.1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	227.891.480.572,09	935.696.004.130,80

Nilai saldo anggaran lebih awal pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp227.891.480.572,09 merupakan nilai yang didapat dari saldo anggaran lebih akhir tahun anggaran 2015.

		Tahun Anggaran 2016 (Rp)	Tahun Anggaran 2015 (Rp)
5.4.2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	(227.891.480.572,09)	(935.696.004.130,80)

Jumlah penggunaan SAL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp(227.891.480.572,09)

		Tahun Anggaran 2016 (Rp)	Tahun Anggaran 2015 (Rp)
5.4.3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	102.568.681.508,55	227.891.480.572,09

SiLPa/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp102.568.681.508,55

C. **NERACA**

Neraca Pemerintah Kota Balikpapan yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) merupakan ringkasan posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2016. Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan akan diuraikan dalam penjelasan lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

5.5	ASET	Per 31 Desember 2016 Rp7.808.312.345.547,12	Per 31 Desember 2015 Rp6.816.897.374.557,73
-----	-------------	---	---

Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2016 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Aset TA 2016 bila dibandingkan dengan TA 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Aset TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
1.	Aset Lancar	347.433.752.654,36	407.184.807.154,79	(59.751.054.500,43)
2.	Investasi Jangka Panjang	495.981.642.338,58	491.583.062.751,41	4.398.579.587,17
3.	Aset Tetap	6.606.725.354.590,37	5.643.396.198.290,05	963.329.156.300,32
4.	Aset Lainnya	358.171.595.963,81	274.733.306.361,48	83.438.289.602,33
	Jumlah	7.808.312.345.547,12	6.816.897.374.557,73	991.414.970.989,39

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Aset Daerah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

5.5.1
ASET LANCAR

Per 31 Desember 2016
Rp 347.433.752.654,36

Per 31 Desember 2015
Rp407.184.807.154,79

Aset Lancar merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar TA 2016 bila dibandingkan dengan TA 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Aset Lancar TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	TA 2016 (Rp)	TA 2015 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	67.388.111.428,50	146.518.325.956,02	(79.130.214.527,52)
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	15.052.219,00	0,00	15.052.219,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	117.347.911,00	1.480.740,00	115.867.171,00
4.	Kas di BLUD	30.983.213.924,53	28.403.056.173,08	2.580.157.751,45
5.	Kas Lainnya	6.085.288.939,96	5.965.239.814,99	120.049.124,97
6.	Investasi Jangka Pendek (Setara Kas)	0.00	50.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)
7.	Piutang Pajak	100.447.198.648,36	74.149.522.556,25	26.297.676.092,11
8.	Piutang Retribusi	2.129.308.897,30	5.923.568.441,00	(3.794.259.543,71)
9.	Piutang Jasa Layanan (BLUD)	11.287.221.160,60	6.650.412.392,40	4.636.808.768,20
10.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	764.854.907,01	662.215.382,00	102.639.525,01
11.	Piutang Lainnya	23.207.967.554,36	22.171.446.691,00	1.036.520.863,36
12.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	85.125.193.102,23	46.244.416.000,00	38.880.777.102,23
13.	Belanja Dibayar Dimuka	1.750.323.682,19	3.692.709.604,05	(1.942.385.921,86)
14.	Persediaan	18.132.670.208,83	16.802.413.404,00	1.330.256.805,33
	Jumlah	347.433.752.654,36	407.184.807.154,79	(59.751.054.500,43)

Aset lancar pada Tahun 2016 yang berjumlah Rp347.433.752.654,36 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.1.1	Kas di Kas Daerah	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp 67.388.111.428,50	Rp146.518.325.956,02

Saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp67.388.111.428,50 merupakan Saldo kas Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di rekening giro pada Bank Kaltim per 31 Desember 2016 yang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 38
Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1.	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Cabang Balikpapan	67.388.111.428,50	146.518.325.956,02	(79.130.214.527,52)
Jumlah		67.388.111.428,50	146.518.325.956,02	(79.130.214.527,52)

5.5.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp15.052.219,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Kesehatan Kota, Dinas Perhubungan dan Disporabudpar per 31 Desember 2016 sebesar Rp15.052.219,00. Perbandingan Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun 2016 dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	SKPD	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Kota	745.219,00	0,00	745.219,00
2.	Dinas Perhubungan	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00
3.	Disporabudpar	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
Jumlah		15.052.219,00	0,00	15.052.219,00

5.5.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp117.347.911,00	Rp1.480.740,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran SKPD Per 31 Desember 2016 atas penerimaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) per 31 Desember 2016 yang disetorkan pada tahun 2017 . Adapun Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran SKPD bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 40
Sisa UP/GU/TU yang belum disetor per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	SKPD	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Kelurahan Margo Mulyo	-	1.480.740,00	(1.480.740,00)
2	BPMP2KB	35.553.736,00	-	35.553.736,00
3	Dinas Pasar	76.432.175,00	-	76.432.175,00

No.	SKPD	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	Disporabudpar	5.362.000,00	-	5.362.000,00
Jumlah		117.347.911,00	1.480.740,00	115.867.171,00

5.5.1.4
Kas di BLUD

Per 31 Desember 2016

Rp30.983.213.924,53

Per 31 Desember 2015

Rp28.403.056.173,08

Merupakan Saldo Kas per 31 Desember 2016 yang terdapat di tiga SKPD BLUD Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Dinas Kesehatan Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu. Saldo Kas di BLUD pada Tahun 2016 sebesar Rp30.983.213.924,53 terdiri dari:

Tabel 41

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Kas di Bendahara BLUD RSKB Sayang Ibu	7.644.269.329,16	5.790.465.999,26	1.853.803.329,90
2.	Kas di Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	20.309.230.460,29	20.046.843.806,17	262.386.654,12
3.	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Sepinggian	507.965.940,12	451.108.055,82	56.857.884,30
4.	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Prapatan	177.729.441,79	143.068.492,03	34.660.949,76
5.	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Kariangau	131.675.191,37	107.474.429,41	24.200.761,96
6.	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Karang Joang	576.862.123,48	504.341.381,54	72.520.741,94
7.	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Baru Tengah	639.662.319,14	368.486.601,05	271.175.718,09
8.	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Klandasan Ilir	801.387.853,95	773.713.942,24	27.673.911,71
9	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Mekar Sari	194.431.265,23	217.553.465,56	(23.122.200,33)
Jumlah		30.983.213.924,53	28.403.056.173,08	2.580.157.751,45

5.5.1.5
Kas Lainnya

Per 31 Desember 2016

Rp6.085.288.939,96

Per 31 Desember 2015

Rp5.965.239.814,99

Saldo Kas Lainnya merupakan Saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di Dinas Kesehatan Kota, dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang ada di Dinas Pendidikan yang bila dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 42

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	SKPD	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Kota (JKN)	4.132.754.295,96	2.968.617.702,99	1.164.136.592,97
2.	Dinas Kesehatan Kota (BOK)	594.478,00	112.602.750,00	(112.008.272,00)
3.	Dinas Pendidikan (BOS Pusat)	1.951.940.166,00	2.882.063.142,00	(930.122.976,00)
4.	Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.956.220,00	(1.956.220,00)
Jumlah		6.085.288.939,96	5.965.239.814,99	120.049.124,97

Rincian lebih lanjut tentang Saldo Kas Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 3 & Lampiran 4*.

5.5.1.6

Investasi Jangka Pendek
(Setara Kas)

Per 31 Desember 2016
Rp0.00

Per 31 Desember 2015
Rp50.000.000.000,00

Setara kas pada aset lancar merupakan deposito Pemerintah Kota Balikpapan yang terdapat pada Bank BRI Cabang Balikpapan per 31 Desember 2016 yang diketahui sebesar Rp0.00 karena telah dicairkan per 31 Desember 2016. Perbandingan deposito di Tahun 2016 dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Saldo Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Bank	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	BRI Cabang Balikpapan	0.00	50.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)
	Jumlah	0.00	50.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)

5.5.1.7

Piutang Pajak

Per 31 Desember 2016
Rp216.364.643.997,15

Per 31 Desember 2015
Rp180.211.960.703,00

Piutang pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp216.364.643.997,15 adalah pajak daerah yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya tetapi belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2016. Metode perhitungan piutang berdasarkan umur dan kemungkinan tertagih. Adapun rincian piutang pajak tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Jenis Pajak	Saldo Per 31 Des 2016	Saldo Per 31 Des 2015 (Audited)
1	Pajak Hotel	12.394.219.797,00	10.120.498.257,00
2	Pajak Restoran	3.243.953.171,00	2.614.602.997,00
3	Pajak Hiburan	614.682.518,00	375.609.713,00
4	Pajak Reklame	4.478.724.644,75	4.283.920.042,00
5	Pajak Penerangan Jalan	8.172.201.863,00	90.638.797,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	91.012.000,00	91.012.000,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	457.124.992,40	202.466.171,00
8	Pajak Parkir	675.389.636,00	700.017.236,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	4.518.000,00	4.518.000,00
	Jumlah	30.131.826.622,15	18.483.283.213,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2)	186.223.945.625,00	161.727.936.582,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.871.750,00	-
	Total	216.364.643.997,15	180.211.219.795,00

Daftar Mutasi Piutang Pajak dapat dilihat pada *Lampiran 5*

Piutang pajak yang terdiri sebelas pajak mengalami peningkatan sebesar Rp36.153.424.272,15 atau kurang lebih 20,06%. Piutang pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyumbang terbesar untuk kenaikan piutang pajak ini adalah piutang pajak PBB-P2 sebesar Rp24.496.009.043,00 lebih. Hal ini disebabkan karena pajak PBB-P2 yang sedang dalam

- proses validasi data PBB. Usaha-usaha yang dilakukan Dispenda dalam proses validasi data PBB antara lain dengan diterbitkannya SK Kepala Dispenda Kota Balikpapan No.188.46/196/Dispenda, tanggal 14 November 2016 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan Data Piutang Pajak PBB-P2 Kota Balikpapan.
2. Untuk piutang pajak hotel selain pajak bulan Desember 2016 yang jatuh tempo pembayarannya Januari 2017, juga karena ada dua hotel yaitu Hotel Benakutai dan Hotel Hakaya yang mengalami krisis manajemen sehingga menunda pembayaran pajak.
 3. Untuk pajak restoran dan pajak hiburan, piutang meningkat dari tahun lalu dikarenakan ada tambahan wajib pajak baru dan jatuh tempo pembayaran pajak bulan Desember 2016 pada Januari 2017.
 4. Untuk pajak penerangan jalan dan pajak air bawah tanah, dapat dijelaskan bahwa wajib pajak PT. Chevron Indonesia yang belum melakukan pembayaran karena dasar PMK. No. 9 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi.
 5. Untuk piutang pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan, masa kadaluwarsanya adalah 5 (lima) tahun.

5.5.1.7.1	Penyisihan Piutang Pajak	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp(115.917.445.348,79)	Rp (106.062.438.146,75)

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp(115.917.445.348,79) merupakan taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang pajak dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Perbandingan Penyisihan piutang pajak di tahun 2016 dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 45
Daftar penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Piutang Pajak	(115.917.445.348,79)	(106.062.438.146,75)	(9.855.007.202)
	Jumlah	(115.917.445.348,79)	(106.062.438.146,75)	(9.855.007.202)

Rincian Umur Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 6*.

5.5.1.8	Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp8.774.763.319,00	Rp8.405.419.053,00

Piutang retribusi per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.774.763.319,00 merupakan piutang retribusi pasar sebesar Rp6.928.887.754,00, piutang retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp 482.515.500,00, piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa Rusunawa) sebesar Rp37.025.000,00, piutang retribusi PDAM sebesar Rp596.786.306,00, piutang ijin gangguan keramaian sebesar Rp382.795.500,00, Piutang IMB sebesar Rp344.671.199,00 dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Tahu/Tempe) sebesar Rp2.082.060,00 yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusinya tetapi belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Adapun rincian mutasi piutang retribusi per 31 Desember 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 46
Rincian Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Pajak	Saldo 31 Des 2015	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2016
		Audited	Bertambah	Berkurang	
A.	Retribusi Pelayanan Pasar				
1.	Pasar Sepinggan	772.335.885,00	319.005.540,00	248.562.727,00	842.778.698,00
2.	Pasar Damai	233.759.488,00	220.887.000,00	236.857.500,00	217.788.988,00
3.	Pasar Klandasan I	1.327.707.601,00	552.830.136,00	269.517.664,00	1.611.020.073,00
4.	Pasar Klandasan II	1.822.053.111,00	666.429.396,00	460.539.011,00	2.027.943.496,00
5.	Pasar Inpres Kebun Sayur	510.658.010,00	400.381.380,00	608.495.536,00	302.543.854,00
6.	Pasar Penampungan 'A'	302.541.748,00	256.473.000,00	373.783.950,00	185.230.798,00
7.	Pasar Loak Besi	38.569.500,00	75.816.000,00	83.009.500,00	31.376.000,00
8.	Pasar Pandansari	1.438.453.496,00	689.996.295,00	618.596.610,00	1.509.853.181,00
9.	Pasar Kampung Baru Tengah	207.253.281,00	101.807.280,00	108.707.895,00	200.352.666,00
Jumlah		6.653.332.120,00	3.283.626.027,00	3.008.070.393,00	6.928.887.754,00
B.	Retribusi Pelayanan Kebersihan	975.344.444,00	8.593.701.478,00	8.489.744.116,00	1.079.301.806,00
C.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	31.825.000,00	37.025.000,00	31.825.000,00	37.025.000,00
D.	Retribusi Ijin Gangguan	384.199.500,00	0,00	1.404.000,00	382.795.500,00
E.	Retribusi Air Limbah	14.658.750,00	0.00	14.658.750,00	0.00
F.	Retribusi IMB	344.671.199,00	0,00	0,00	344.671.199,00
G	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Produksi Tahu/Tempe)	1.388.040,00	2.082.060,00	1.388.040,00	2.082.060,00
Jumlah		8.405.419.053,00	11.916.434.565,00	11.547.090.299,00	8.774.763.319,00

Dari rincian di atas dapat dijelaskan bahwa piutang Ijin Gangguan sebesar Rp382.795.500,- yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) wajib retribusi (SKRD) dan piutang IMB sebesar Rp344.671.199,- yang terdiri dari 121 (seratus dua puluh satu) wajib retribusi (SKRD) telah diserahkan ke PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) yang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

5.5.1.8.1 **Penyisihan Piutang Retribusi**

Per 31 Desember 2016
Rp(6.645.454.421,70)

Per 31 Desember 2015
Rp(2.481.850.612,00)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 sebesar Rp(6.645.454.421,70) merupakan taksiran nilai piutang retribusi yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang retribusi dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Perbandingan Penyisihan piutang retribusi di tahun 2016 dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 47
Daftar Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Piutang Retibusi	(6.645.454.421,70)	(2.481.850.612,00)	(4.163.603.809,70)
	Jumlah	(6.645.454.421,70)	(2.481.850.612,00)	(4.163.603.809,70)

Daftar Umur Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.5.1.9
Piutang Jasa Layanan (BLUD)

Per 31 Desember 2016
Rp11.738.493.150,12

Per 31 Desember 2015
Rp6.667.453.017,40

Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2016 sebesar Rp11.738.493.150,12 merupakan nilai tagihan terhadap Pelayanan kesehatan pada BLUD. Piutang tersebut dikelola oleh BLUD RSKB Sayang Ibu Balikpapan, 7 (tujuh) BLUD Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota dan Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian Mutasi Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 48
Rincian Piutang BLUD (Jasa Layanan) per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2016	Saldo Per 31 Des 2015
			(Audited)
RUMAH SAKIT SAYANG IBU			
1	Umum	70.131.200,00	50.855.800,00
2	BPJS	1.322.313.600,00	895.315.400,00
3	Puskesmas	398.000,00	-
4	Dokter Keluarga	386.000,00	-
5	KOPSI	1.614.000,00	-
DINAS KESEHATAN KOTA		-	
PUSKESMAS SEPINGGAN		-	
1	BPJS	11.620.000,00	8.305.000,00
PUSKESMAS PRAPATAN		-	
1	BPJS	2.440.000,00	-
2	Jamkesprov	-	686.000,00
PUSKESMAS BARU TENGAH		-	
1	BPJS	460.000.00	190.000,00
2	Jamkesprov	712.000.00	712.000,00
PUSKESMAS KLANDASAN ILIR		-	
1	BPJS	5.510.000,00	9.470.000,00

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2016	Saldo Per 31 Des 2015
			(Audited)
2	Dokter dan Bidan Jejaring	2.150.000,00	-
PUSKESMAS KARIANGAU		-	
1	BPJS	1.853.700,00	2.910.000,00
2	Kerjasama Dengan Perusahaan	6.981.808,00	-
3	Umum	-	881.698,00
PUSKESMAS MEKAR SARI		-	
1	BPJS	6.200.000,00	4.700.000,00
PUSKESMAS KARANG JOANG		-	
1	BPJS	20.265.000,00	6.215.000,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
1	Umum	554.225.682,47	161.381.838,00
2	BPJS	9.697.381.804,00	5.371.751.463,00
3	Jamkesprov	33.850.355,65	154.078.818,40
Jumlah		11.738.493.150,12	6.667.453.017,40

Daftar Mutasi Piutang Jasa Layanan Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 8*

5.5.1.9.1 Penyisihan Piutang Jasa Layanan	Per 31 Desember 2016 Rp (451.271.989,80)	Per 31 Desember 2015 Rp(17.040.625,00)
---	---	---

Penyisihan Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2016 sebesar Rp (451.271.989,80) merupakan taksiran nilai piutang jasa layanan pada BLUD yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang jasa layanan dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Perbandingan Penyisihan piutang jasa layanan di tahun 2016 dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 49
Daftar Penyisihan Piutang BLUD (Jasa Layanan) per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Piutang Jasa Layanan	(451.271.989,80)	(17.040.625,00)	(434.231.364,80)
	Jumlah	(451.271.989,80)	(17.040.625,00)	(434.231.364,80)

Rincian Umur dan penyisihan Piutang Jasa Layanan dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

5.5.1.10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Per 31 Desember 2016 Rp768.698.399,00	Per 31 Desember 2015 Rp662.215.382,00
---	--	--

Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran per 31 Desember 2016 sebesar Rp768.698.399,00 merupakan nilai tagihan penjualan angsuran atas penjualan rumah dinas Tahun 2010 yang dapat ditagihkan dalam tahun 2016.

Tabel 50
Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran	768.698.399,00	662.215.382,00	106.483.017,00
Jumlah		768.698.399,00	662.215.382,00	106.483.017,00

Secara lebih rinci Bagian lancar Tahun 2015 yang terbawa di Tahun 2016 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 51
Rincian Bagian lancar Tahun 2015 yang terbawa di Tahun 2016

NO	Nama	Harga Jual	Cicilan Per Bulan	Bagian Lancar TA 2016	Bagian Lancar TA 2015	Bagian Lancar TA 2015 yang Terbawa di TA 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Achmad Ilhamsyah	16.332.000,00	64.648,00	711.128,00	-	-
2	Sa'baniah (Alm. Fajar Sadik)	15.044.500,00	59.551,00	535.959,00	-	-
3	Hanifah (Alm. Djunaidi Arfan)	17.877.000,00	70.763,00	1.273.734,00	1.061.445,00	424.578,00
4	Bahrudin	15.817.000,00	62.609,00	1.502.616,00	751.308,00	751.308,00
5	Misbahuddin Halim	213.046.000,00	843.307,00	9.276.377,00	23.612.596,00	-
6	Hj. Siti Maryam (Alm.Drs.H.M	173.200.000,00	685.583,00	5.484.664,00	-	-
7	H.M. Saleh Basri	201.489.500,00	797.563,00	65.400.166,00	55.829.410,00	55.829.410,00
8	Emanuel Soenoto	201.489.500,00	797.563,00	-	1.595.126,00	-
9	Ashadi Tjetjep	201.489.500,00	797.563,00	36.687.898,00	27.117.142,00	27.117.142,00
10	Asriansyah Bustani	175.490.000,00	694.648,00	53.487.896,00	45.152.120,00	45.152.120,00
11	Badaruddin	202.636.000,00	802.103,00	50.532.489,00	40.907.253,00	40.907.253,00
12	Ariyah (Nanang J)	191.675.000,00	758.714,00	1.517.428,00	-	-
13	Ardiansyah Ahmad	133.950.000,00	530.219,00	3.181.314,00	-	-
14	Djumagianto	153.824.000,00	608.887,00	608.887,00	29.835.463,00	-
15	M. Amin Latief	181.124.000,00	716.949,00	-	5.735.592,00	-
16	Yusuf Wahab	202.571.500,00	801.846,00	40.092.300,00	37.686.762,00	30.470.148,00
17	Suwandi	153.250.500,00	606.617,00	13.345.574,00	6.066.170,00	6.066.170,00
18	Lukman Zainor	153.824.000,00	608.887,00	20.702.158,00	17.048.836,00	13.395.514,00
19	As Madjenah	171.029.000,00	676.990,00	12.862.810,00	4.738.930,00	4.738.930,00
20	Rochani (Alm. H. Syahrani)/Febrina Ade Andriani	131.202.000,00	519.341,00	38.950.575,00	32.718.483,00	32.718.483,00
21	Asmalin Simon (Alm. Johan G)	153.644.000,00	608.174,00	7.298.088,00	2.432.696,00	-
22	Lispina (Alm. Lamsur)	177.911.000,00	704.231,00	7.746.541,00	7.746.541,00	-
23	M. Yusuf, Sh	149.522.000,00	591.858,00	20.715.030,00	17.163.882,00	13.612.734,00
24	Ali Munsjir Halim	197.983.500,00	783.685,00	8.620.535,00	-	-
25	Sudiyono, Sh	197.983.500,00	783.685,00	2.351.055,00	10.187.905,00	-
26	Fatimah (Alm. R. Raslian	157.308.000,00	622.678,00	36.738.002,00	29.265.866,00	29.265.866,00
27	Mustaman Latief					

NO	Nama	Harga Jual	Cicilan Per Bulan	Bagian Lancar TA 2016	Bagian Lancar TA 2015	Bagian Lancar TA 2015 yang Terbawa di TA 2016
1	2	3	4	5	6	7
		160.056.000,00	633.555,00	41.814.630,00	36.112.635,00	34.211.970,00
28	Abdul Kadir Hak	230.450.000,00	912.197,00	54.731.820,00	43.785.456,00	43.785.456,00
29	Heru Bambang	236.862.000,00	937.578,00	11.250.936,00	-	-
30	Soewarly	172.749.500,00	683.800,00	38.292.800,00	30.087.200,00	30.087.200,00
31	Soeryanto	164.636.000,00	651.684,00	1.303.368,00	1.303.368,00	-
32	Nunik Siti Rokayah (Alm. Hasan)	173.896.500,00	688.340,00	6.883.400,00	1.376.680,00	-
33	Salmiah (Alm. Djohansyah)	149.064.000,00	590.045,00	590.045,00	-	-
34	Khairul Fitri	177.460.000,00	702.446,00	17.561.150,00	26.692.948,00	9.131.798,00
35	Hasrian Mulya	175.617.000,00	695.151,00	4.866.057,00	2.085.453,00	-
36	Moch. Hasan T	149.980.000,00	593.671,00	1.781.013,00	1.187.342,00	-
37	Roestam Lt,D,Be	174.470.000,00	690.610,00	38.674.160,00	31.077.450,00	30.386.840,00
38	Zainuddin S	173.323.000,00	686.070,00	1.372.140,00	686.070,00	-
39	Abdul Sani	180.205.000,00	713.311,00	13.552.909,00	7.133.110,00	4.993.177,00
40	Suriansyah Achmad	177.337.500,00	701.961,00	21.760.791,00	21.058.830,00	13.337.259,00
41	R.M. Sitorus	151.354.000,00	599.110,00	20.369.740,00	18.572.410,00	13.180.420,00
42	Herry Roeswandi	207.733.000,00	822.276,00	54.270.216,00	44.402.904,00	44.402.904,00
	TOTAL	6.795.906.500,00	26.900.467,00	768.698.399,00	662.215.382,00	523.966.680,00

	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
5.5.1.11 Piutang Lainnya	Rp44.973.775.145,25	Rp38.764.210.794,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp44.973.775.145,25, diantaranya sebesar Rp 939.796.086,00 merupakan piutang pemerintah Kota kepada pihak ketiga atas tunggakan kontribusi pemanfaatan aset Pemerintah Kota Balikpapan dalam perjanjian kerjasama *Built, Operate and Transfer* (BOT), piutang atas tunggakan penyewaan aset tanah dan bangunan, serta Piutang Gaji Pensiunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 52
Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Aset	Pihak III	Tgl dan Nomor Perjanjian	Jangka Waktu	Tunggakan Tahun 2016 (Rp)	Tunggakan Tahun 2015 (Rp)
1.	BOT Pasar Muara Rapak	PT Hasta Kreasi Utama	Nomor 180/1060/Huk/ 2001, tanggal 23 Juli 2001, addendum Nomor 147/LGL/SPK/HKM/VII/2001, tanggal 12 September 2001	25 tahun	83.333.336,00	125.000.000,00
2.	BOT Pasar Baru Square	PT Hasta Kreasi Utama	Nomor 644.1/1087/PP/ 2004, tanggal 15 Desember 2004, addendum Nomor 644.1/1087/PP/2007, tanggal 7 November 2007	30 tahun	0	0

No.	Aset	Pihak III	Tgl dan Nomor Perjanjian	Jangka Waktu	Tunggakan Tahun 2016 (Rp)	Tunggakan Tahun 2015 (Rp)
3.	Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur (Plaza Bunsay)	PT Gusher Mitra Sejahtera	Nomor 030/59/PP-II/2007, Nomor 001-PK/GNS-Pmd.Bpn/II/2007 tanggal 2 Februari 2007	30 tahun	479.335.150,00	423.954.300,00
4.	Penyewaan Aset Tanah	Hotel Novotel	-		0	0
5.	Penyewaan Aset Tanah	Hotel Ibis	-		37.500.000,00	37.500.000,00
6.	Penyewaan Aset Tanah/Bangunan	Pihak Ketiga	-	-	291.262.000,00	106.102.200,00
7.	Sewa Aset	Pegawai Pemkot	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00
8.	Gaji Pegawai	Pegawai Pensiunan	-	Tahun 2016	30.365.600,00	6.100.000,00
9.	Kerjasama Sewa Kantin RSUD	Kantin	-		0.00	24.750.000,00
10.	Laba PDAM	PDAM	-		0.00	2.034.527.065,00
11.	Drainase RT 13 Kel. Graha Indah	DPU	-		5.841.529,49	0
12.	Drainase SD 016 Kel. Baru Ilir	DPU	-		95.270.901,00	0
Jumlah					1.040.908.516,49	2.775.933.565,00
Penyisihan					(851.000.378,00)	(140.292.700,00)
Piutang Neto					189.908.138,49	2.635.640.865,00

Selain itu terdapat piutang atas denda pajak sebesar Rp43.932.866.628,76 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Perhitungan Denda Pajak per 31 Desember 2016

No.	Jenis Denda Pajak	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1.	PBB	40.765.901.687,06	33.355.451.782,00
2.	Pajak Hotel	1.711.234.493,96	1.337.943.071,00
3.	Pajak Restoran	620.232.033,60	546.864.921,00
4.	Pajak Hiburan	52.288.593,50	30.290.960,00
5.	Pajak Reklame	546.011.894,57	502.538.715,00
6.	Pajak Penerangan Jalan	39.542.611,24	29.715.047,00
7.	Pajak Mineral Non Logam dan Bantuan	0.00	0,00
8.	Pajak Air Tanah	30.717.721,35	19.887.677,00
9.	Pajak Parkir	165.587.131,48	164.587.456,00
10.	Pajak Sarang Burung Walet	997.600,00	997.600,00
11.	Pajak BPHTB	352.862,00	0.00
Total Denda		43.932.866.628,76	35.988.277.229,00

Denda pajak merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Denda pajak yang tercantum di atas merupakan denda yang dikenakan sebesar 2% per bulan dari pokok piutang pajak dan maksimal pengenaannya adalah 48% (24 bulan).

Dari nilai piutang denda yang terbesar adalah denda pajak PBB, hal ini karena data PBB yang belum selesai divalidasi. Untuk pajak hotel, dapat dijelaskan bahwa besarnya piutang pajak karena adanya hotel yang mengalami krisis manajemen sehingga menunggak pajak antara lain Hotel Benakutai dan Hotel Hakaya yang berakibat menaikkan piutang dendanya pula.

Daftar Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 10*

5.5.1.12	Piutang Transfer	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
	Pemerintah Daerah	Rp87.373.950.354,00	Rp46.244.416.000,00
	Lainnya		

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp87.373.950.354,00 merupakan piutang atas Kurang Bayar Bantuan Provinsi Kaltim, DBH Provinsi Kaltim dan DBH Pemerintah.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 54
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	87.373.950.354,00	46.244.416.000,00	41.129.534.354,00
Jumlah		87.373.950.354,00	46.244.416.000,00	41.129.534.354,00

Daftar Umur dan mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

5.5.1.13	Belanja dibayar di muka	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp 1.750.323.682,19	Rp3.692.709.604,05

Saldo Belanja dibayar di muka sebesar Rp1.750.323.682,19 merupakan pembayaran atas sewa yang dibayar dimuka sebesar Rp1.672.543.489,59 dan pembayaran asuransi atas aset-aset milik Pemkot Balikpapan yang dibayar kepada pihak III sebesar Rp77.780.192,60 Rincian belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Sewa Dibayar Di Muka	1.672.543.489,59	1.742.073.179,76	(69.529.690,17)
2.	Asuransi Dibayar Di Muka	77.780.192,60	245.770.199,28	(167.990.006,68)
3.	Pembayaran Gedung	0.00	1.704.866.225,00	(1.704.866.225,00)
Jumlah		1.750.323.682,19	3.692.709.604,05	(1.942.385.921,85)

Daftar Rincian Belanja Dibayar Di Muka dapat dilihat pada *Lampiran 12*.

5.5.1.14	Persediaan	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp18.132.670.208,83	Rp16.802.413.404,00

Persediaan sebesar Rp18.132.670.208,83 merupakan sisa persediaan yang terdapat pada SKPD yang berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan tersebut berupa alat tulis kantor, blanko/cetakan, benda berharga, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, alat kebersihan dan alat listrik, serta perlengkapan lapangan dan kesehatan yang belum digunakan per 31 Desember

2016. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik terkecuali untuk persediaan obat-obatan dengan menggunakan metode perpetual. Adapun metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode *First In First Out (FIFO)*. Adapun rincian persediaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 56
Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)
1.	Alat tulis kantor	1.879.101.541,97	1.448.725.982,00
2.	Blanko/Cetakan	2.180.078.043,00	1.725.687.349,00
3.	Benda Berharga	4.202.000,00	38.875.000,00
4.	Obat-obatan	6.778.346.384,66	7.674.613.397,00
5.	Bahan Kimia	1.205.838.830,79	540.736.378,00
6.	Bahan Bangunan	297.372.859,00	717.163.032,00
7.	Cadangan Energi	82.039.737,95	119.348.580,00
8.	Alat Kebersihan	236.453.814,64	141.533.564,00
9.	Alat Kesehatan	2.353.022.955,35	1.665.894.260,00
10.	Alat listrik	163.948.055,00	65.932.074,00
11.	Perlengkapan lapangan	251.432.600,00	281.347.900,00
12.	Bahan Makanan dan Minuman	65.966.857,97	83.252.741,00
13.	Bibit Tanaman dan Ternak	2.481.142.350,00	2.299.303.147,00
14.	Barang Yang Diserahkan Pihak Ketiga	153.724.179,00	0,00
	Jumlah	18.132.670.209,33	16.802.413.404,00

Daftar Rincian Persediaan dapat lihat pada **Lampiran 13**.

Dari rincian di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat sisa persediaan pada SKPD Dinas Pendidikan yang didapat dari belanja yang bersumber dari BOS Pusat seperti pada daftar berikut :

Tabel 57
Rincian Persediaan yang bersumber dari BOS Pusat per 31 Desember 2016

	Uraian	BOS Pusat (Rp)
1.	Alat tulis kantor	194.394.047,00
2.	Blanko/Cetakan	26.749.025,00
3.	Benda Berharga	1.610.000,00
4.	Obat-obatan	11.609.800,00
5.	Bahan Kimia	18.000,00
6.	Bahan Bangunan	13.443.000,00
7.	Cadangan Energi	1.075.000,00
8.	Alat Kebersihan	47.896.600,00
9.	Alat Kesehatan	830.500,00
10.	Alat listrik	7.079.250,00
11.	Perlengkapan lapangan	25.563.400,00
12.	Bahan Makanan dan Minuman	950.000,00
	Jumlah	331.218.622,00

5.5.2	Investasi Jangka Panjang	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp 495.981.642.338,58	Rp491.583.062.751,41

Investasi Jangka panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp495.981.642.338,58 merupakan Investasi Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen dengan rincian sebagai berikut.

	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)
Investasi Non Permanen	2.880.888.554,65	3.386.907.964,05
Investasi Permanen	493.100.753.783,93	488.196.154.787,36
Jumlah	495.981.642.338,58	491.583.062.751,41

Jumlah Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.880.888.554,65 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 58
Rincian Investasi Non Permanen per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Nama	Nomor Rekening (Rp)	Nilai Tahun 2016 (Rp)	Nilai Tahun 2015 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemda Dati II BPP CQ Perikanan	601.001.5991	425.679.687,55	430.772.625,12
2.	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Pangan	601.000.5415	153.578.991,73	153.703.991,73
3.	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi	601.001.6052	251.395.134,89	252.424.225,89
4.	Pemda Dati II BPP QQ Penangkaran Benih	601.001.6056	345.185.331,48	346.205.331,48
5.	Pemda Dati II BPP CQ Perkebunan Kenaf	601.001.5995	207.144.661,12	204.161.064,12
6.	Pemda Dati II BPP CQ P2UPRA	601.001.6051	175.701.908,55	175.701.908,55
7.	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Hias P2PT	601.001.5994	13.193.805,79	13.313.805,79
8.	Pemda Dati II BPP CQ Peternakan	601.001.5212	141.492.630,64	141.612.630,64
9.	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Total	601.001.6054	94.470.000,00	94.800.000,00
10.	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Unocal	601.001.3415	57.089.230,42	57.209.230,42
11.	Pemda Dati II BPP QQ Kredit Mikro Pemkot	601.001.1915	113.980.027,99	114.055.027,99
12.	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT Dana Gakin	601.001.5993	1.000.410.102,32	1.001.413.493,32
13.	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT	601.001.6057	3.876.830.638,17	3.903.141.221,17
	Jumlah Dana Bergulir Bruto		6.856.152.150,65	6.888.514.556,22
	Jumlah Penyisihan		3.975.263.596,00	3.501.606.592,17
	Jumlah Bersih Dana Bergulir (<i>Net Realizable Value</i>)		2.880.888.554,65	3.386.907.964,05

Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) berdasarkan Umur dapat dilihat dalam **Lampiran 14.**

Penjelasan lebih lanjut atas Investasi Non Permanen-Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi Kerakyatan merupakan dana pinjaman yang dikelola oleh instansi teknis/SKPD, yaitu Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi serta Bank Muamalat Cabang Balikpapan. Dana bergulir tersebut disalurkan kepada petani, peternak, nelayan dan pengusaha kecil. Sampai dengan 31 Desember 2016 total dana yang dikelola untuk program tersebut sebesar Rp6.856.152.150,65. Namun dari dana yang disalurkan tersebut dana yang diragukan/tidak dapat ditagih adalah sebesar Rp3.975.263.596,00 sehingga jumlah bersih dana bergulir (*net realizable value*) adalah sebesar Rp2.880.888.554,65
- Penyediaan Fasilitas Kredit UMKMK sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan penjaminan kredit kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Penempatan awal penyediaan fasilitas kredit UMKMK tersebut adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 dan ditempatkan dalam bentuk rekening giro pada PT Bank Kaltim. Penyediaan fasilitas kredit UMKMK tersebut tidak disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Balikpapan karena tidak memenuhi definisi operasional Investasi Non Permanen Dana Bergulir sesuai buletin teknis nomor 7 tentang Dana Bergulir. Akun tersebut dikelompokkan pada Kas yang dibatasi penggunaanya yang dikelompokkan pada Aset lain-lain.

3. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih disebabkan antara lain oleh:
- a. Nasabah telah meninggal dunia;
 - b. Nasabah telah pindah alamat dan tidak diketahui alamat yang baru;
 - c. Nasabah sudah tua renta, tidak sanggup mengangsur dan termasuk keluarga miskin.
4. Besar suku bunga dana bergulir yang dikenakan terhadap peminjam (nasabah) adalah sebesar 10% untuk dana bergulir jenis Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga (IK-IRT). Sedangkan Dana bergulir lainnya sebesar 0%.
5. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui pengembalian dana bergulir oleh nasabah tidak berjalan lancar sesuai yang diharapkan, sebagian besar nasabah tidak bisa menepati janji pelunasan seperti yang dituangkan dalam akad perjanjian. Diketahui sebagian besar nasabah menunggak lebih dari satu tahun. Oleh karena itu sejak beberapa tahun yang lalu Pemerintah Kota Balikpapan mengambil kebijakan tidak menggulirkan lagi dana bergulir, namun berfokus pada upaya-upaya pengamanan/pengembalian terhadap dana bergulir yang telah disalurkan. Dengan kebijakan tersebut jumlah dana bergulir yang tidak disalurkan kembali ke nasabah mencapai saldo sebesar Rp2.886.705.414,56 per 31 Desember 2016. Daftar Dana Bergulir yang tidak disalurkan (Saldo di Bank) dan yang disalurkan ke nasabah Per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Investasi Permanen per 31 Desember 2016 sebesar Rp493.100.753.784 tabe merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 59
Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Penyertaan Modal pada Bank Kalimantan Timur	99.440.000.000,00	99.440.000.000,00	0.00
2.	Penyertaan pada PDAM Kota Balikpapan	347.696.678.699	335.943.087.977,36	11.753.590.722.57
3.	Penyertaan pada PERUSDA Kota Balikpapan	45.964.075.085	52.813.066.810,00	(6.848.991.725,00)
	Jumlah	493.100.753.784	488.196.154.787,36	4.904.598.996,57

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Balikpapan menyertakan modal kepada PDAM sebesar Rp3.000.000.000,- . Selain itu dapat diinformasikan bahwa Penilaian Investasi Permanen pada BPD Kaltim menggunakan metode biaya (*cost method*). Sedangkan penilaian investasi permanen pada PDAM Kota Balikpapan dan Perusda Kota Balikpapan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*). Metode penilaian ini dimuat dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

Rincian Investasi Jangka Panjang dimuat dalam **Lampiran 16**.

5.5.3	ASET TETAP	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp8.592.130.854.235,15	Rp7.403.848.960.103,03

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar **Rp8.592.130.854.235,15** dan **Rp7.403.848.960.103,03** yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Secara umum Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp962.739.017.448,89 atau sebesar 17,60% dari periode sebelumnya dengan rincian Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp 645.531.609.818,00 atau 46,99%, Peralatan & Mesin mengalami penurunan sebesar Rp 499.829.634,63 atau 0,24 %, Gedung & Bangunan kenaikan sebesar Rp505.639.900.000,47 atau 29,08%, Jalan Irigasi & Jaringan mengalami penurunan sebesar Rp19.346.756.788,62 atau 2,23 %, Aset Tetap Lainnya kenaikan sebesar Rp13.476.938.311,24 atau 25,15% dan Konstruksi Dalam Pengerjaan mengalami penurunan sebesar Rp181.472.705.405,77 atau 12,98%.

Adapun rincian nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan menurut jenis Aset Tetap Per 31 Desember 2016 dan 2015 dapat dilihat pada berikut.

Tabel 60
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2016

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	2.019.383.173.117,57	0	2.019.383.173.117,57
2.	Peralatan dan Mesin	616.980.039.780,27	405.042.345.106,78	211.937.694.673,49
3.	Gedung dan Bangunan	2.658.415.865.390,84	414.246.411.943,00	2.244.169.453.447,84
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.013.457.099.489,74	1.166.116.742.595,00	847.340.356.894,74
5.	Aset Tetap Lainnya	67.053.909.229,19	0	67.053.909.229,19
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.216.840.767.227,79	0	1.216.840.767.227,79
Jumlah		8.592.130.854.235,15	1.985.405.499.644,78	6.606.725.354.590,37

Adapun perkembangan Nilai Buku Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan menurut jenis Aset Tetap Per 31 Desember 2016 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 61
Perkembangan Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016

No	Jenis Aset	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan (Penurunan)	
				Rupiah	%
1	Tanah	2.019.383.173.117,57	1.373.851.563.299,57	645.531.609.818,00	46,99%
2	Peralatan & Mesin	211.937.694.673,49	212.437.524.308,12	(499.829.634,63)	(0,24)%
3	Gedung & Bangunan	2.244.169.453.447,84	1.738.529.553.447,37	505.639.900.000,47	29,08%
4	Jalan Irigasi & Jaringan	847.340.356.894,74	866.687.113.683,36	(19.346.756.788,62)	(2,23)%
5	Aset Tetap Lainnya	67.053.909.229,19	53.576.970.917,95	13.476.938.311,24	25,15%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.216.840.767.227,79	1.398.313.472.633,56	(181.472.705.405,77)	(12,98)%
Jumlah Nilai Buku		6.606.725.354.590,37	5.643.396.198.289,93	963.329.156.300,44	17,07%
7	Akumulasi Penyusutan	1.985.405.499.644,78	1.760.452.761.813,98	224.952.737.830,80	12,78%
8	Nilai Perohan Aset Tetap	8.592.130.854.235,15	7.403.848.960.103,91	1.188.281.894.131,24	16,05%

Jumlah Aset tetap sebesar Rp6.606.725.354.590,37 merupakan nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 62
Rincian Mutasi/Koreksi Aset Tetap Per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
Saldo Aset Tetap 2015 Audited			7.403.848.960.104,03
Mutasi Tambah Dan Koreksi 2016			1.350.900.668.966,30
a.	Realisasi Belanja Modal 2016	551.327.955.106,24	

Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	18.013.253.892,00	
c.	Terima Hibah	60.089.055.126,00	
d.	Ditemukan/Hasil Inv	570.530.170.594,18	
e.	Reklasifikasi dari AL ke AT	6.135.559.532,49	
f.	Koreksi Tambah	1.567.910.000,00	
g.	Penilaian/Utang	143.236.764.715,39	
Mutasi Kurang Dan Koreksi 2016			162.618.774.834,76
a.	Diserahkan/Dihibahkan	12.415.600.000,00	
b.	Penghapusan Aset Tetap	1.919.028.038,23	
c.	Reklasifikasi dari AT ke AL	112.211.314.625,63	
d.	Reklasifikasi ke Persediaan/Biaya	46.685.707,50	
e.	Koreksi Kurang	6.197.465.901,00	
f.	Barang Rusak Berat	9.701.359.171,98	
g.	Barang di bawah kapitalisasi	20.127.321.390,42	
Jumlah Saldo Per 31 Desember 2016			8.592.130.854.235,57
Akumulasi Penyusutan			1.985.405.499.644,78
Nilai Buku Per 31 Desember 2016			6.606.725.354.590,37

- a. Saldo Aset Tetap 2015 Audited sebesar Rp 7.403.848.960.104,03
- b. Mutasi tambah aset tetap tahun 2016 sebesar Rp 1.350.900.668.966,30 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2016 sebesar Rp551.327.955.106,24 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp 83.846.532.317,00 (15 %), Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp52.524.546.154,29 (10%), Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar Rp 285.244.005.339,15 (52%), Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 11.837.2105.607,84 (21%) dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 11.340.765.687,96 (2%). Rincian Realisasi Belanja Modal 2016 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 17**.
 - 2) Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi) sebesar Rp 18.013.253.892,00 Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih. Rincian Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi) per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 18**.
 - 3) Terima Hibah sebesar Rp 60.089.055.126,00 yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dinas Pendidikan, Dinas Pasar, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman dan Kantor Arsip. Rincian Terima Hibah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**.
 - 4) Ditemukan/Hasil Inventarisasi sebesar Rp570.530.170.594,18 yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp157.371.500, Kelurahan Sepinggian sebesar Rp83.918.000,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp531.809.300.655,00, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp112.491.500,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp13.691.576.043,00, Dinas Pasar sebesar Rp205.272.090,00, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp 3.753.312.500,00, Inspektorat sebesar Rp126.056.250,00, Bappeda sebesar Rp 4.223.985.000,00, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp12.382.763.806,00, Dinas

Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman sebesar Rp282.873.250. Rincian Terima Ditemukan/Hasil Inventarisasi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

- 5) Reklasifikasi dari AL ke AT sebesar Rp6.135.559.532,49 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp5.913.607.032,00 Dinas Pasar sebesar Rp59.345.000,00, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp162.607.500,00. Rincian Reklasifikasi dari AL ke AT per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 21**.
 - 6) Koreksi Tambah sebesar Rp1.567.910.000,00 pada Tanah sebesar Rp824.700.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp144.400.000,00 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 598.810.000,00. Rincian Reklasifikasi dari AL ke AT per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 22**.
 - 7) Penilaian/Utang sebesar Rp143.236.764.715,39 . Transaksi ini berupa utang dalam bentuk aset tetap. Hal ini terjadi karena terjadinya defisit anggaran untuk pembayaran pekerjaan-pekerjaan yang menurut realisasi fisik telah selesai sampai pada tanggal 31 Desember 2016 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 130.500.794.402,54, Badan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran sebesar Rp 106.607.598,30, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp284.196.000,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp11.130.007.384,84, Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp1.134.532.550,40 dan Disperindagkop sebesar Rp86.468.308,80. Rincian Penilaian/Utang per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 23**.
- c. Mutasi kurang aset tetap tahun 2016 sebesar Rp162.618.774.834.76 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Diserahkan/Dihibahkan sebesar Rp 12.415.600.000,00 yaitu hibah tanah kepada PNS sebesar sebesar Rp 3.752.000.000,00 Nomor 188.45-484/2016 Tanggal 7 Desember 2016 dan hibah tanah kepada POLDA Kalimantan Timur sebesar Rp 8.663.600.000,00. Rincian Penilaian/Utang per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 24**.
 - 2) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp1.919.028.038,23 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp526.126.113,00, Gedung Dan Bangunan sebesar Rp1.091.082.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp301.819.925,23 pada Setdakot sebesar Rp 368.900.000,00, Kelurahan Gunung Bahagia sebesar Rp4.755.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp1.061.130.000,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp182.423.113,00 dan Disporbudpar sebesar Rp 301.819.925,23. Rincian Penghapusan Aset Tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 25**.
 - 3) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp 112.211.314.625,63 yang terdiri dari Tanah sebesar Rp97.645.000,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 325.034.207,00, , Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp62.074.784.477,32, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 3.895.683.366,00 dan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp45.818.167.575,31. Rincian Reklasifikasi dari AT ke AL per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 26**.
 - 4) Reklasifikasi ke Persediaan/Biaya sebesar Rp 46.685.707,50 berupa biaya pemeliharaan gedung yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi pada RSKBSI Sayang Ibu.
 - 5) Koreksi kurang sebesar Rp6.197.465.901,00 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp 15.575.000,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 6.086.620.000,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp95.270.901,00 . Rincian Koreksi kurang per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 27**.
 - 6) Barang Rusak Berat sebesar Rp 9.701.359.171,98 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp 9.044.686.753,26, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 210.384.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp446.288.420,00 pada 28 SKPD secara rinda dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

- 7) Koreksi kurang nilai Aset Tetap yang dibawah nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp20.127.321.390,42 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp 16.712.381.724,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 481.219.062,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan 309.962.050,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 2.623.758.555,00 pada 35 SKPD. Secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 29**.
- d. Terdapat Aset Tetap sebesar Rp 414.410.165.074,90 yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sejumlah 8 SMA sebesar Rp 210.770.672.238,36 dan 6 SMK sebesar Rp 201.595.999.836,59 dan 1 SLB sebesar Rp 204.3492.999,95 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi dari pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada **Lampiran 30**.
- e. Terdapat utang sebesar sebesar Rp 143.242.606.244,88 berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 4.359.918.200,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 39.851.802.931,90, Jalan, Irigasi dan Jaringan 23.344.758.874,60 dan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 75.686.126.238,38 pada 6 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan dan Disperindagkop.

5.5.3.1	TANAH	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp 2.019.383.173.117,57	Rp1.373.851.563.299,57

Nilai Buku Aset Tetap berupa Tanah Per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.019.383.173.117,57 dan Rp1.373.851.563.299,57 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan Nilai Aset Tetap Tanah pada TA 2016 sebesar Rp645.531.609.818,00 atau sebesar 46, 99%.

Nilai tercatat (*carrying amount*) Aset tetap berupa Tanah disajikan berdasarkan biaya perolehan. Aset Tetap berupa Tanah tidak disusutkan.

Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2016 sebesar Rp2.019.383.173.117,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63
SALDO ASET TETAP TANAH
per 31 Desember 2016

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Tanah 2015 Audited		1.373.851.563.299,57
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2016		
	a. Realisasi Belanja Modal Tanah 2016	83.846.532.317,00	
	b. Hibah	36.805.974.001,00	
	c. Mutasi dari SKPD lain	4.640.005.000,00	
	d. Ditemukan/Hasil Inv	536.567.648.500,00	
	e. Koreksi	824.700.000,00	
			662.684.859.818,00
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2016		

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
	a. Diserahkan/Dihibahkan	12.415.600.000,00	
	b. Mutasi Ke SKPD lain	4.640.005.000,00	
	c. Reklasifikasi dari AT ke AL	97.645.000,00	
			17.153.250.000,00
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2016		2.019.383.173.117,57

- a. Saldo Aset Tetap Tanah 2015 Audited sebesar Rp 1.373.851.563.299,57
- b. Mutasi tambah aset tetap tanah tahun 2016 sebesar Rp 662.684.859.818,00 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2016 sebesar Rp 83.846.532.317,00 yang terdiri dari Rp 53.846.532.317,00 untuk pengadaan aset tetap Tanah baru dan sebesar Rp 30.000.000.000,00 untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (Cemara Rindang) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung.

Aset tetap Tanah tersebut telah dicatat senilai Rp 30.000.000.000,00 dengan kode barang 01.01.11.02.01 kode register 0004 dengan luasan 13.142,16 m2 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
 - 2) Terima Hibah sebesar Rp 36.805.974.001,00 yang terdiri dari POLDA Kalimantan Timur seluas 6.100 m2 yang terletak di Jalan Wiluyo Puspoyudo Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota. Aset tetap Tanah tersebut telah dicatat pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset dengan kode barang 01.01.11.04.01 dan kode register 0020.
 - 3) Terima Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp 4.640.005.000,00. Transaksi ini berlawanan dengan transaksi Mutasi kepada SKPD Lain dan sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa muatsi antar SKPD. Transaksi ini mutasi dari DISPERINDAGKOP kepada BPKAD yang terdiri atas mutasi 1 bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 bidang sebesar Rp 1.028.000.000,00 terletak di Jalan Tanjung Pura I Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Selatan, 2 bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II sebesar Rp 211.650.000,00 Jl. Inpres I (Rapak) Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara dan Jl. Martadinata Kel Mekar Sari Kec Balikpapan Tengah dan 4 bidang tanah kosong yang sudah diperuntukkan Rp 3.400.355.000,00 Kawasan Industri Kariangau Jl. Pramuka / Kampung Damai
 - 4) Ditemukan/Hasil Inv sebesar sebesar Rp 536.567.648.500,00 pada BPKAD sebesar Rp. 7.453.250.000 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 529.114.398.500 karena tanah tersebut ditemukan hasik inventarisasi dan belum tercatat pada tahun sebelumnya.
 - 5) Koreksi sebesar sebesar Rp 824.700.000,00 berupa koreksi tambah karena kurang catat sebesar Rp 824.700.000,00 tanah pada Terminal Batu Ampar sesuai laporan penilaian PT. Bumi Pakuan.
- c. Mutasi kurang aset tetap tanah tahun 2016 sebesar Rp 17.153.250.000,00 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Diserahkan/Dihibahkan sebesar Rp 12.415.600.000,00 yaitu hibah tanah kepada PNS sebesar sebesar Rp 3.752.000.000,00 Nomor 188.45-484/2016 Tanggal 7 Desember 2016 dan hibah tanah kepada POLDA Kalimantan Timur sebesar Rp 8.663.600.000,00.
 - 2) Mutasi Ke SKPD lain sebesar Rp 4.640.005.000,00. Transaksi ini berlawanan dengan transaksi Mutasi dari SKPD Lain dan sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap

secara keseluruhan karena berupa muatsi antar SKPD. Transaksi ini mutasi dari DISPERINDAKOP kepada BPKAD yang terdiri atas mutasi 1 bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 bidang sebesar Rp 1.028.000.000,00 terletak di Jalan Tanjung Pura I Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Selatan, 2 bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II sebesar Rp 211.650.000,00 Jl. Inpres I (Rapak) Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara dan Jl. Martadinata Kel Mekar Sari Kec Balikpapan Tengah dan 4 bidang tanah kosong yang sudah diperuntukkan Rp 3.400.355.000,00 Kawasan Industri Kariangau Jl. Pramuka / Kampung Damai.

- 3) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp 97.645.000,00 dilakukan karena pengadaan tanahnya tidak dapat dilakukan sehingga biaya-biaya yang sudah terealisasi yang outputnya bukan merupakan aset tetap tanah direklasifikasi ke aset lainnya yang terdiri dari Perjalanan Dinas ke Samarinda (SP2D:04361/BL/2016) Rp 1.200.000,00 DED SIKHPK (SP2D : 09235/BL/2016) Rp 90.545.000,00 dan Honor Tim Teknis dan SPPD (SP2D : 08414/BL/2016) Rp 5.900.000,00.
- d. Aset tetap berupa tanah senilai Rp 1.486.567.524.617,57 tersebut terdiri dari 825 buah persil tanah, yang telah bersertifikat sebanyak 192 buah dan sisanya sebanyak 633 bidang senilai Rp1.070.733.787.481,51 yang belum ada sertifikatnya dari 633 terdapat 13 data bukan merupakan bidang tanah tetapi berupa ganti rugi bangunan, penataan lahan dan pematokan batas tanah yang akan dikapitalisasikan nilainya terhadap aset tanah yang bersangkutan dan sebanyak 7 data sedang diajukan proses pensertifikatan di Kantor Pertanahan.
- e. Aset tetap berupa tanah senilai Rp 113.302.840.000,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sejumlah sebanyak 9 SMA dengan nilai sebesar Rp 54.479.242.000,00 dan sebanyak 5 SMK dengan nilai sebesar Rp57.823.598.000,00 dan 1 SLB dengan nilai tanah sebesar Rp 1.000.000.000,00 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi dari pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 64
SALDO ASET TETAP TANAH YANG DIALIHKAN KE PROVINSI
per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Sekolah	ASET TETAP (Rp)
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	5.873.100.000.00
2	SMA Negeri 2	412.900.000.00
3	SMA Negeri 3	2.402.550.000.00
4	SMA Negeri 4	9.190.000.000.00
5	SMA Negeri 5	2.800.000.000.00
6	SMA Negeri 6	9.000.000.000.00
7	SMA Negeri 7	1.273.500.000.00
8	SMA Negeri 8	1.280.000.000.00
9	SMA Negeri 9	22.247.192.000.00
	Jumlah I	54.479.242.000.00
II	SMK NEGERI	

No.	Nama Sekolah	ASET TETAP (Rp)
1	SMK Negeri 1	27.000.000.000.00
2	SMK Negeri 2	4.240.000.000.00
3	SMK Negeri 3	9.007.598.000.00
4	SMK Negeri 4	8.792.000.000.00
5	SMK Negeri 5	8.784.000.000.00
	Jumlah II	57.823.598.000.00
1	SLB Negeri	1.000.000.000.00
	Jumlah III	1.000.000.000.00
TOTAL		113.302.840.000.00

5.5.3.2	PERALATAN DAN MESIN	Per 31 Desember 2016 Rp 616.980.039.780,27	Per 31 Desember 2015 Rp 547.751.143.302,06
---------	----------------------------	--	--

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 616.980.039.780,27 dan Rp 547.751.143.302,06 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk peralatan dan mesin ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 ke atas;

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2016 sebesar Rp 616.980.039.780,27 terdiri dari Alat-alat Besar sebesar Rp 56.437.237.120,68, Alat-alat Angkutan sebesar Rp 150.996.873.564,34, Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp 7.985.674.113,35, Alat Pertanian sebesar Rp 11.352.842.501,29, Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp 239.255.485.537,62, Alat Studio dan Alat Komunikasi sebesar Rp 27.460.433.622,84, Alat-alat Kedokteran sebesar Rp 63.775.356.876,78, Alat Laboratorium sebesar Rp 57.956.413.146,90, Alat-alat Persenjataan/Keamanan sebesar Rp 1.759.723.298,00

Tabel 65
PERHITUNGAN MASA MANFAAT PERALATAN DAN MESIN
per 31 Desember 2016

Uraian	Masa Manfaat	Metode Penyusutan
	(Tahun)	
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin		
Alat-Alat Besar Darat	10	Garis Lurus
Alat-Alat Besar Apung	8	Garis Lurus
Alat-alat Bantu	7	Garis Lurus
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	Garis Lurus
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	Garis Lurus
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	Garis Lurus
Alat Angkut Bermotor Udara	20	Garis Lurus
Alat Bengkel Bermesin	10	Garis Lurus
Alat Bengkel Tak Bermesin	5	Garis Lurus
Alat Ukur	5	Garis Lurus
Alat Pengolahan Pertanian	4	Garis Lurus
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	Garis Lurus
Alat Kantor	5	Garis Lurus

Uraian	Masa Manfaat	Metode Penyusutan
	(Tahun)	
Alat Rumah Tangga	5	Garis Lurus
Peralatan Komputer	4	Garis Lurus
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	Garis Lurus
Alat Studio	5	Garis Lurus
Alat Komunikasi	5	Garis Lurus
Peralatan Pemancar	10	Garis Lurus
Alat Kedokteran	5	Garis Lurus
Alat Kesehatan	5	Garis Lurus
Unit-Unit Laboratorium	8	Garis Lurus
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	Garis Lurus
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	Garis Lurus
Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	15	Garis Lurus
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	Garis Lurus
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	Garis Lurus
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	Garis Lurus
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	Garis Lurus
Senjata Api	10	Garis Lurus
Persenjataan Non Senjata Api	3	Garis Lurus
Alat Keamanan dan Perlindungan	5	Garis Lurus

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2016 sebesar Rp 616.980.039.780,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66
SALDO ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
 per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Peralatan Mesin 2015 Audited			547.751.143.302,06
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2016			
	a.	Realisasi Belanja Modal 2016	52.524.546.154,29	
	b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	6.466.805.992,00	
	c.	Terima Hibah	14.152.419.998,00	
	d.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	1.873.641.167,00	
	e.	Ditemukan/Hasil Inv	12.198.279.633,66	
	f.	Reklasifikasi dari AL ke AT	59.345.000,00	
	g.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	6.556.766.530,96	
	h.	Koreksi	144.400.000,00	
	i	Hutang (Belanja modal yang belum dilunasi)	4.359.918.200,00	
		Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		98.336.122.675,91
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2016			
	a.	Penghapusan Aset Tetap	526.126.113,00	
	b.	Mutasi Ke SKPD lain	1.873.641.167,00	
	d.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	934.815.442,00	

No.	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
	e.	Koreksi	15.575.000,00	
	f.	Barang Rusak Berat	9.044.686.751,98	
	g.	Barang di bawah kapitalisasi	16.712.381.723,72	
		Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		29.107.226.197,70
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2016			616.980.039.780,27
V.	Akumulasi Penyusutan			405.042.345.106,78
VI.	Nilai Buku Per 31 Desember 2016			211.937.694.673,49

- a. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2015 Audited sebesar Rp 547.751.143.302,06.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2016 sebesar Rp 98.336.122.675,91 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2016 sebesar 2016 Rp 52.524.546.154,29.
 - 2) Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT berupa kapitalisasi sebesar Rp 6.466.805.992,00. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.

 Kelurahan Teritip sebesar Rp 4.752.000,00, Kelurahan Prapatan sebesar Rp 14.550.000,00, Kelurahan Sepinggan sebesar Rp 5.197.500,00, Kelurahan Baru Ilir sebesar Rp 20.000.000,00, Kelurahan Baru Tengah sebesar Rp 1.550.000,00, Kelurahan Batu Ampar sebesar Rp 4.000.000,00, Kelurahan Mekar Sari sebesar Rp 11.200.000,00, Kecamatan Balikpapan Kota sebesar Rp 9.700.000,00, Kelurahan Sepinggan Baru sebesar Rp 6.975.000,00, Kelurahan Damai Baru sebesar Rp 11.875.000,00, Kelurahan Damai Bahagia sebesar Rp 3.600.000,00, Dinas Tata Kota Dan Perumahan sebesar Rp 58.206.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 7.300.000,00, RSKB Sayang Ibu sebesar Rp 31.195.200,00, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan sebesar Rp 59.125.000,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp 6.122.271.000,00, Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial sebesar Rp 12.443.600,00, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp 12.930.000,00, Disporbudpar sebesar Rp 1.120.000,00, Kantor Kesbang Dan Politik sebesar Rp 14.228.642,00, SATPOL PP sebesar Rp 23.712.250,00
 - 3) Terima Hibah sebesar Rp 14.152.419.998,00 dengan rincian Badan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran sebesar Rp 13.500.000,00, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp 236.544.666,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp 8.557.549.832,00, Dinas Pasar sebesar Rp 35.000.000,00, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp 7.630.000,00, Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman sebesar Rp 5.246.180.500,00, Kantor Arsip sebesar Rp 56.015.000,00.
 - 4) Terima Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp 1.873.641.167,00 yang terdiri dari SETDAKOT sebesar Rp 491.983.900,00, Kec. Balikpapan Timur sebesar Rp 37.153.500,00, Kec. Balikpapan Selatan sebesar Rp 46.407.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran sebesar Rp 136.800.000,00, Dinas Tata Kota Dan Perumahan sebesar Rp 10.100.000,00, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp 16.427.367,00, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan sebesar Rp 4.050.000,00, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebesar Rp 136.075.500,00, Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp 87.600.000,00, Disperindagkop sebesar Rp 15.890.000,00, Dinas Pasar sebesar Rp 302.270.000,00, BAPPEDA

sebesar Rp 257.582.000,00, Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman sebesar Rp 159.701.900,00, Disporbudpar sebesar Rp 171.600.000,00. Transaksi ini berlawanan dengan transaksi Mutasi ke SKPD Lain dan sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa muatasi antar SKPD

- 5) Ditemukan/Hasil Inventarisasi sebesar Rp 12.198.279.633,66 yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp 157.371.500,00, Kelurahan Sepinggan sebesar Rp 83.918.000,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 2.694.902.155,00, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp 112.491.500,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp 8.360.097.388,66, Dinas Pasar sebesar Rp 205.272.090,00, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp 1.312.500,00, Inspektorat sebesar Rp 126.056.250,00, Bappeda sebesar Rp 173.985.000,00, Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman sebesar Rp 282.873.250,00
- 6) Reklasifikasi dari AL ke AT Peralatan dan Mesin sebesar Rp 59.345.000,00 berupa pada Dinas Pasar sebesar Rp 59.345.000,00 dengan rincian P.C. Unit 5 unit sebesar 43.395.000, Printer 4 unit sebesar 14.520.000,00, Printer 1 unit sebesar 1.430.000 dengan Nomor SP2D : 08846/BL/2016 Tanggal 27 Juni 2016.
- 7) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 6.556.766.530,96 dengan rincian Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp 575.600.958,00, Rskb Sayang Ibu sebesar Rp 187.692.600,00, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan sebesar Rp 4.181.981.972,96, Dinas Pasar sebesar Rp 256.766.000,00, Bappeda sebesar Rp 926.900.000,00, Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman sebesar Rp 248.900.000,00, Disporbudpar sebesar Rp 7.425.000,00
- 8) Koreksi Tambah sebesar Rp 144.400.000,00 pada BAPPEDA dengan rincian Camera + Attachment 2 buah sebesar Rp 14.000.000,00, Global Positioning System 4 buah sebesar Rp 14.000.000,00, Handphone 4 buah sebesar Rp 2.800.000,00, Lap Top 3 buah sebesar Rp 21.000.000,00, P.C Unit 4 buah sebesar Rp 30.000.000,00, Plotter 1 buah sebesar Rp 45.000.000,00, Printer 4 buah sebesar Rp 16.000.000,00. Transaksi koreksi ini atas belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2015 dengan domor kontrak 028/1474/Bpd-Skt Tanggal 22 Desember 2016.
- 9) Hutang (Belanja modal yang belum dilunasi) sebesar Rp 4.359.918.200,00 dengan rincian Dinas Kesehatan sebesar Rp 273.000,00 berupa utang pendapatan dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 4.359.645.200,00 berupa meubelair dan alat visual.

c. Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2016 sebesar Rp 29.107.226.197,70 dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 526.126.113,00 yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp 368.900.000,00, Kelurahan Gunung Bahagia sebesar Rp 4.755.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 152.471.113,00.
- 2) Mutasi Ke SKPD lain sebesar Rp 1.873.641.167,00. Transaksi ini berlawanan dengan transaksi Mutasi dari SKPD Lain dan sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap Peralatan dan Mesin secara keseluruhan karena berupa muatasi antar SKPD terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 139.132.000,00, Dinas Tata Kota Dan Perumahan sebesar Rp 118.450.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 293.400.000,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp 11.550.000,00, Badan Pmp2kb sebesar Rp 271.587.867,00, Dispenda sebesar Rp 196.075.500,00, Bappeda sebesar Rp 720.395.800,00, Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman sebesar Rp 119.000.000,00, Kantor Arsip sebesar Rp 4.050.000,00.

- 3) Koreksi kurang sebesar Rp 15.575.000,00 berupa sepeda motor dengan kode 2.3.1.5.1 dan kode register 0036 pada Badan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran karena adanya pencatatan ganda atas aset tersebut.
 - 4) Barang Rusak Berat sebesar Rp 9.044.686.751,98 merupakan peralatan dan mesin yang kondisinya sudah rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan.
 - 5) Koreksi kurang sebesar Rp 16.712.381.723,72 karena tidak memenuhi syarat Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
- d. Kendaraan roda 4 keseluruhan sebanyak 785 unit dengan nilai sebesar Rp 137.798.131.700,01 sedangkan roda 2 sebanyak 2538 unit dengan nilai sebesar Rp 27.764.217.358,00. Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki bukti kepemilikan (BPKB) kendaraan untuk roda 4 sebanyak 76 unit dengan nilai sebesar Rp 15.665.715.350,00 sedangkan untuk roda 2 sebanyak 170 unit dengan nilai sebesar Rp 2.390.933.700,00
- Kendaraan roda 4 dalam kondisi baik sebanyak 620 unit dengan nilai sebesar Rp 124.289.367.480,01, kondisi kurang baik sebanyak 95 unit dengan nilai sebesar Rp 8.977.109.590,00 dan kondisi rusak berat sebanyak 70 dengan nilai sebesar Rp 4.531.109.590,00
- Kendaraan roda 2 dalam kondisi baik sebanyak 1612 unit dengan nilai sebesar Rp 10.740.011.958,00, kondisi kurang baik sebanyak 506 unit dengan nilai sebesar Rp 3.893.834.000,00 dan kondisi rusak berat sebanyak 420 unit dengan nilai sebesar Rp 3.130.371.400,00
- e. Dari Rp 211.937.694.673,49 Aset Tetap terdapat sebesar Rp 41.935.819.961.62 yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sebanyak 9 SMA sebesar Rp 21.259.281.411.38 , 6 SMK sebesar 19.961.763.550.23 dan 1 SLB sebesar 714.775.000.00 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi dari pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 67
SALDO ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN YANG DIALIHKAN KE PROVINSI
per 31 Desember 2016

No.	Nama Sekolah	Tanah (Rp)
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	2.538.244.553.00
2	SMA Negeri 2	3.165.616.259.40
3	SMA Negeri 3	1.604.714.302.33
4	SMA Negeri 4	2.048.212.124.98
5	SMA Negeri 5	1.316.379.310.50
6	SMA Negeri 6	3.865.491.263.75
7	SMA Negeri 7	1.656.923.376.76
8	SMA Negeri 8	2.205.355.039.33
9	SMA Negeri 9	2.858.345.181.33
	Jumlah I	21.259.281.411.38
II	SMK NEGERI	

No.	Nama Sekolah	Tanah (Rp)
1	SMK Negeri 1	3.756.037.643.55
2	SMK Negeri 2	4.004.211.698.00
3	SMK Negeri 3	2.445.298.036.00
4	SMK Negeri 4	2.625.278.561.64
5	SMK Negeri 5	3.066.921.650.05
6	SMK Negeri 6	4.064.015.961.00
	Jumlah II	19.961.763.550.23
1	SLB Negeri	714.775.000.00
	Jumlah III	714.775.000.00
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		41.935.819.961.62

5.5.3.3
GEDUNG DAN BANGUNAN

Per 31 Desember 2016

Rp 2.658.415.865.390,84

Per 31 Desember 2015

Rp 2.114.708.192.274,64

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 2.658.415.865.390,84 dan Rp 2.114.708.192.274,64 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas yang terdiri dari bangunan gedung.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk gedung dan bangunan sebesar Rp 25.000.000,00 ke atas.

Tabel 68

Masa Manfaat Gedung dan Bangunan

per 31 Desember 2016

Uraian	Masa Manfaat	Metode Penyusutan
	(Tahun)	
Gedung Bangunan		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	Garis Lurus
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	Garis Lurus
Bangunan Menara	40	Garis Lurus
Bangunan Bersejarah	50	Garis Lurus
Tugu Peringatan	50	Garis Lurus
Candi	50	Garis Lurus
Monumen/Bangunan Bersejarah	50	Garis Lurus
Tugu Peringatan Lain	50	Garis Lurus
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	Garis Lurus
Rambu-Rambu	50	Garis Lurus
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	Garis Lurus

Saldo Aset Tetap Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada pada Tahun 2016 sebesar **Rp 2.658.415.865.390,84** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69
NILAI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN
per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Bangunan Dan Gedung 2015 Audited			2.114.708.192.274,64
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2016			
	a.	Realisasi Belanja Modal 2016	285.244.005.338,18	
	b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	156.051.900,00	
	c.	Terima Hibah	6.030.887.591,97	
	d.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	16.449.069.024,81	
	e.	Ditemukan/Hasil Inv	9.363.598.654,28	
	f.	Reklasifikasi dari AL ke AT	643.010.432,49	
	g.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	370.711.520.489,50	
	h.	Koreksi	598.810.000,00	
	i.	Hutang (Belanja modal yang belum dilunasi)	39.851.802.931,90	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi			729.048.756.363,13
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2016			
	a.	Penghapusan Aset Tetap	1.091.082.000,00	
	b.	Mutasi Ke SKPD lain	16.449.069.024,81	
	c.	Reklasifikasi dari AT ke AL	325.034.207,00	
	d.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	160.697.674.953,67	
	e.	Koreksi	6.086.620.000,00	
	f.	Barang Rusak Berat	210.384.000,00	
	g.	Barang di bawah kapitalisasi	481.219.061,70	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi			185.341.083.247,18
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2016			2.658.415.865.390,84
V.	Akumulasi Penyusutan			414.246.411.943,00
VI.	Nilai Buku Per 31 Desember 2016			2.244.169.453.447,84

- a. Saldo Aset Bangunan Dan Gedung 2015 Audited sebesar Rp 2.114.708.192.274,64
- b. Mutasi tambah aset tetap Bangunan Dan Gedung tahun 2016 sebesar Rp. 729.048.756.363,13 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2016 sebesar 2016 Rp. 285.244.005.338,18.
 - 2) Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi sebesar Rp. 156.051.900,00 dengan rincian Kec. Balikpapan Timur Rp. 148.401.900,00 berupa Rehab Kantor

dengan nomor SP2D : 11859/BL/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 dan Dinas Pendidikan Rp.3.000.000,00.

- 3) Terima Hibah sebesar Rp. 6.030.887.591,97 berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen dengan kode barang 03.11.01.10.01 pada Dinas Pendidikan dengan uraian SMKN 2 sebesar Rp 388.617.000,00, SMKN 4 sebesar Rp 1.114.520.591,00, SMKN 4 sebesar Rp 1.442.067.000,00, SMKN 4 sebesar Rp 567.427.000,00, SMKN 5 sebesar Rp 435.305.000,00, SMKN 5 sebesar Rp 734.843.000,00, SMKN 5 sebesar Rp 53.4431.000,00, SDN 3 SELATAN sebesar Rp 534.431.000,00 dan SDN 1 UTARA sebesar Rp 485.746.000,00. Hibah tersebut berasal dari dana Bos Pusat.
 - 4) Terima Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp. 16.449.069.024,81 yang terdiri dari Kelurahan Batu Ampar sebesar Rp. 13.583.233.596,80 yang terdiri dari Bangunan Gedung Permanen sebesar Rp. 227.249.507,40 dan Bangunan Tempat pertemuan Rp. 1.335.5984.089,40 yang dimutasikan dari Dinas Pekerjaan Umum dengan Keputusan Waikota Nomor 188.45-445/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp. 2.291.936.000,00 dengan rincian Bangunan Gedung Kantor Permanen 2 unit sebesar Rp.1.727.300.000,00, Bangunan Pembatas / Pagar sebesar Rp. 96.588.000,00 dan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen sebesar Rp. 468.048.000,00 yang dimutasikan dari DISPERINDAKOP.
 - 5) Ditemukan/Hasil Inv sebesar Rp. 9.363.598.654,28 yang terdiri dari Dinas Pendidikan SMA, SMK, SMP, SKB, TK, SLB sebesar Rp. 5.313.598.654,28 dengan rincian dan BAPPEDA sebesar Rp. 4.050.000.000,00 berupa Gedung Bangunan Kantor Permanen (Kantor BAPPEDA)
 - 6) Reklasifikasi dari AL ke AT sebesar Rp. 643.010.432,49 yang terdiri dari DED Renovasi Kantor DPU Balikpapan sebesar Rp. 46.190.949,95, DED Interior gedung Kantor BPMP2T 49.968.453,69 dan Supervisi Bidang Cipta Karya Sebesar Rp. 546.851.028,59.
 - 7) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp. 370.711.520.489,50 yang terdiri dari Kelurahan Batu Ampar sebesar Rp 7.900.000,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 368.107.975.021,40, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp 773.588.914,55, RSKB Sayang Ibu sebesar Rp 30.390.539,50, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan sebesar Rp 930.707.600,00, Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp 90.781.000,00, Disperindagkop sebesar Rp 104.612.711,32, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp 69.514.500,00, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp 281.684.249,36, Disporbudpar sebesar Rp 104.637.500,00, Kantor Arsip sebesar Rp 170.671.633,37
 - 8) Koreksi tambah sebesar Rp. 598.810.000,00 pada RBSI berupa Pemeliharaan Bangunan RSKBSI dengan SP2D : 08183/BL/2016, 04533/BL/2016 dan 12278/BL/2016.
 - 9) Utang (Belanja modal yang belum dilunasi) sebesar Rp. 39.851.802.931,90 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 33.324.760.719,90 berupa, Dinas Kesehatan sebesar Rp. 283.923.000,00 berupa dan Dinas Pendidikan sebesar Rp. 6.243.119.212,00.
- c. Mutasi kurang aset tetap Bangunan Dan Gedung tahun 2016 sebesar Rp. 185.341.083.247,18 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp. 1.091.082.000,00 yang terdiri dari Dinas Perhubungan sebesar Rp 1.061.130.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 29.952.000,00.

- 2) Mutasi Ke SKPD lain sebesar Rp. 16.449.069.024,81 yang terdiri dari Kelurahan Batu Ampar sebesar Rp. 13.583.233.596,80 yang terdiri dari Bangunan Gedung Permanen sebesar Rp. 227.249.507,40 dan Bangunan Tempat pertemuan Rp. 1.335.5984.089,40 yang dimutasikan dari Dinas Pekerjaan Umum dengan Keputusan Waikota Nomor 188.45-445/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp. 2.291.936.000,00 dengan rincian Bangunan Gedung Kantor Permanen 2 unit sebesar Rp. 1.727.300.000,00, Bangunan Pembatas / Pagar sebesar Rp. 96.588.000,00 dan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen sebesar Rp. 468.048.000,00 yang dimutasikan dari DISPERINDAKOP.
 - 3) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp. 325.034.207,00 yang terdiri dari Pada Dinas Tata Kota Dan Perumahan sebesar Rp 27.297.000,00, Dinas Pasar sebesar Rp 49.500.000,00, Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman sebesar Rp 50.545.000,00 dan Disporbudpar sebesar Rp 197.692.207,00.
 - 4) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp. 160.697.674.953,67 yang terdiri dari pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 147.652.626.867,67, Badan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran sebesar Rp 3.419.460.320,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 879.375.360,00, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp 687.644.463,00, Rskb Sayang Ibu sebesar Rp 8.000.000,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp 3.797.437.133,00, Disperindagkop sebesar Rp 2.805.528.810,00, Bappeda sebesar Rp 926.900.000,00 dan Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman sebesar Rp 520.702.000,00
 - 5) Koreksi sebesar Rp. 6.086.620.000,00 berupa koreksi kurang bangunan gedung kantor inspektorat pada inspektorat.
 - 6) Barang Rusak Berat sebesar Rp. 210.384.000,00 yang terdiri dari pada Dinas Perhubungan sebesar Rp. 75.600.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp. 134.784.000,00.
 - 7) Koreksi kurang nilai gedung dan bangunan yang dibawah nilai minimum sebesar Rp. 481.219.061,70 karena tidak memenuhi syarat Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap gedung dan bangunan yang terdiri dari Kelurahan Batu Ampar sebesar Rp. 51.100.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp. 106.694.900,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp. 52.747.559,70, Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp. 41.167.000,00, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp. 166.824.500,00, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 24.777.662,00 dan Kantor Arsip sebesar Rp. 15.800.000,00.
- d. Dari Rp 2.244.169.453.447,59 Aset Tetap Gedung Bangunan terdapat sebesar Rp. 252.895.478.867,33 yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sejumlah 9 SMA sebesar Rp. 130.972.689.255,98 dan 6 SMK sebesar Rp. 121.643.495.611,35 dan 1 SLB sebesar Rp. 279.294.000,00 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi dari pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 70
SALDO ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIALIHKAN KE PROVINSI
per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Sekolah	Bangunan Dan Gedung (Rp)
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	12.109.225.400,09
2	SMA Negeri 2	17.355.541.278,50
3	SMA Negeri 3	10.864.588.890,55
4	SMA Negeri 4	9.862.535.020,55
5	SMA Negeri 5	16.864.233.425,63
6	SMA Negeri 6	7.070.747.964,09
7	SMA Negeri 7	13.524.876.478,09
8	SMA Negeri 8	6.747.654.314,94
9	SMA Negeri 9	36.573.286.483,53
	Jumlah I	130.972.689.255,98
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	30.347.221.168,09
2	SMK Negeri 2	6.030.207.055,09
3	SMK Negeri 3	9.397.920.162,67
4	SMK Negeri 4	14.062.312.497,28
5	SMK Negeri 5	14.014.154.675,22
6	SMK Negeri 6	47.791.680.053,00
	Jumlah II	121.643.495.611,35
1	SLB Negeri	279.294.000,00
	Jumlah III	279.294.000,00
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		252.895.478.867,33

5.5.3.4

JALAN, JARINGAN
DAN IRIGASI

Per 31 Desember 2016
Rp 2.013.457.099.489,74

Per 31 Desember 2015
Rp1.915.647.617.676,25

Nilai Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 2.013.457.099.489,74 dan Rp1.915.647.617.676,25 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari Jalan dan Jembatan sebesar Rp.1.313.200.551.437,35, Bangunan Air/Irigasi sebesar Rp. 612.837.208.574,44, Instalasi sebesar Rp. 31.311.270.144,65, Jaringan sebesar Rp. 55.268.389.865,51 dan Taman sebesar Rp. 229.191.000,00.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp25.000.000,00 ke atas.

Tabel 71
Masa Manfaat Jalan Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2016

Uraian	Masa Manfaat	Metode Penyusutan
	(Tahun)	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Jalan	10	Garis Lurus
Jembatan	50	Garis Lurus
Bangunan Air Irigasi	50	Garis Lurus
Bangunan Air Pasang Surut	50	Garis Lurus
Bangunan Air Rawa	25	Garis Lurus
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	Garis Lurus
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	Garis Lurus
Bangunan Air Bersih/Baku	40	Garis Lurus
Bangunan Air Kotor	40	Garis Lurus
Bangunan Air	40	Garis Lurus
Instalasi Air Kotor	30	Garis Lurus
Instalasi Pengolahan Sampah	10	Garis Lurus
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	Garis Lurus
Instalasi Pembangkit Listrik	40	Garis Lurus
Instalasi Gardu Listrik	40	Garis Lurus
Instalasi Pertahanan	30	Garis Lurus
Instalasi Gas	30	Garis Lurus
Instalasi Pengaman	20	Garis Lurus
Jaringan Air Minum	30	Garis Lurus
Jaringan Listrik	40	Garis Lurus
Jaringan Telepon	20	Garis Lurus
Jaringan Gas	30	Garis Lurus

Tabel 72
SALDO ASET JALAN JARINGAN DAN IRIGASI
per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Jalan Jaringan Dan Irigasi 2015 Audited			1.915.647.617.676,25
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2016			
	a.	Realisasi Belanja Modal 2016	118.372.105.607,84	
	b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	11.390.396.000,00	
	c.	Terima Hibah	18.150.000,00	

No.	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
	d.	Reklasifikasi dari AT ke AL	5.433.204.100,00	
	e.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	11.785.787.086,31	
	f.	Penilaian/Utang	23.344.875.324,60	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi			170.344.518.118,75
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2016			
	a.	Reklasifikasi dari AT ke AL	62.074.784.477,32	
	b.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	10.049.060.897,45	
	c.	Koreksi	95.270.901,00	
	d.	Barang di bawah kapitalisasi	309.962.050,00	
	e.	Penilaian/Utang	5.957.979,49	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi			72.535.036.305,26
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2016			2.013.457.099.489,74
V.	Akumulasi Penyusutan			1.166.116.742.595,00
VI.	Nilai Buku per 31 Desember 2016			847.340.356.894,74

- a. Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 2015 Audited sebesar Rp 1.915.647.617.676,25
- b. Mutasi tambah aset tetap Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2016 sebesar Rp. 170.344.518.118,75 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2016 sebesar 2016 Rp. 118.372.105.607,84.
 - 2) Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT berupa pemeliharaan 6 jalan pada Dinas Pekerjaan Umum yaitu Jalan A. W. Syahrani, Jalan Patimura, Jalan Beller, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan A. Yani, dan Jalan Alam Baru Kel. Margomulyo.
 - 3) Terima Hibah sebesar Rp 18.150.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 - 4) Reklasifikasi dari AL ke AT sebesar Rp. 5.433.204.100,00 merupakan aset lainnya/supervisi tahun sebelumnya yang dikapitalisasikan kepada aset yang bersangkutan karena pekerjaan fisiknya sudah selesai pada tahun 2016 yang terdiri dari Supervisi Bidang Pengairan sebesar Rp 2.234.407.500,00, Supervisi Drainase Pemukiman II sebesar Rp 314.551.200,00, Supervisi Bidang Bina Marga I sebesar Rp 1.094.489.000,00, Supervisi Bidang Bina Marga II sebesar Rp 720.602.400,00, Pengawasan Teknis Peningkatan Jembatan Jalan Pemuda Kel. Manggar sebesar Rp 74.305.000,00, Pengawasan Teknis Peningkatan Jembatan RT. 29 Kel. Sepinggan Raya sebesar Rp 51.420.000,00, Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Alam Baru Kel. Margomulyo sebesar Rp 142.505.000,00, Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan A. Yani sebesar Rp 103.900.000,00, Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Wolter Monginsidi sebesar Rp 68.035.000,00, Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan A. W. Syahrani sebesar Rp 68.695.000,00, Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Beller sebesar Rp 91.454.000,00, Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Patimura sebesar Rp 29.940.000,00, Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Jabal Noor Kel. Teritip sebesar Rp 103.427.500,00, Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Menuju SMPN 23 RT. 59 Kel. Manggar sebesar Rp 104.170.000,00 dan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan KM. 24 RT. 45 Kel. Karang Joang sebesar Rp 68.695.000,00.

- 5) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp. 11.785.787.086,31 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 11.037.533.686,82, Dinas Perhubungan sebesar Rp 49.700.000,00, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp 386.951.400,00, Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman sebesar Rp 311.602.000,00.
 - 6) Hutang (Belanja modal yang belum dilunasi) sebesar Rp. 23.344.875.324,60 yang terdiri dari Jalan Kabupaten Lokal sebanyak 9 dengan nilai sebesar Rp 7.552.683.800,00, Jembatan Kabupaten/Kota Lain lain sebanyak 3 dengan nilai sebesar Rp 1.581.769.000,00, Saluran Drainase sebanyak 10 dengan nilai sebesar Rp 9.448.899.200,00, Saluran Sekunder sebanyak 1 dengan nilai sebesar Rp 3.040.000.000,00 dan Saluran Tertier sebanyak 1 dengan nilai sebesar Rp 185.212.400,00.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2016 sebesar Rp. 72.535.036.305,26 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp 62.074.784.477,32 yang terdiri dari Dinas Tata Kota Dan Perumahan, Disperindagkop dan Disporbudpar.
 - 2) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp. 10.049.060.897,45 yang terdiri dari Kelurahan Manggar Baru sebesar Rp 39.056.820,00, Kelurahan Batu Ampar sebesar Rp 48.812.500,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 7.926.240.735,45, Disperindagkop sebesar Rp 302.366.842,00, Dinas Pasar sebesar Rp 256.766.000,00, Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman sebesar Rp 39.800.000,00 dan Disporbudpar sebesar Rp 7.425.000,00.
 - 3) Koreksi kurang nilai gedung dan bangunan yang dibawah nilai minimum Barang di bawah kapitalisasi sebesar 309.962.050,00 karena tidak memenuhi syarat Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp 209.650.050,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 2.300.000,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp 53.162.000,00 dan Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman sebesar Rp 44.850.000,00.
- d. Dari Rp 846.747.148.202,75 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat sebesar Rp. 405.504.148,00 yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sejumlah 9 SMA sebesar Rp. 282.841.848,00 dan 6 SMK sebesar Rp. 122.662.300,00 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi dari pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 73
SALDO ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN YANG DIALIHKAN KE PROVINSI
per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Sekolah	Jalan, Jaringan dan Irigasi
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	-
2	SMA Negeri 2	-
3	SMA Negeri 3	36.787.000,00
4	SMA Negeri 4	69.877.000,00
5	SMA Negeri 5	-
6	SMA Negeri 6	120.777.848,00

No.	Nama Sekolah	Jalan, Jaringan dan Irigasi
7	SMA Negeri 7	-
8	SMA Negeri 8	-
9	SMA Negeri 9	55.400.000,00
	Jumlah I	282.841.848,00
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	40.000.000,00
2	SMK Negeri 2	-
3	SMK Negeri 3	45.413.000,00
4	SMK Negeri 4	-
5	SMK Negeri 5	37.249.300,00
6	SMK Negeri 6	-
	Jumlah II	122.662.300,00
1	SLB Negeri	-
	Jumlah III	-
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		405.504.148,00

5.5.3.5	ASET TETAP LAINNYA	Per 31 Desember 2016 Rp67.053.909.229,19	Per 31 Desember 2015 Rp53.576.970.917,95
---------	-------------------------------	--	--

Nilai Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp67.053.909.229,19 dan Rp53.576.970.917,95 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya pada TA 2016 sebesar Rp 13.476.938.311,24 atau 25,15 persen.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk aset tetap lainnya ditetapkan sebesar :

- 1) Buku dan perpustakaan sebesar Rp100.000,00 ke atas per buah.
- 2) Barang bercorak budaya/kesenian/olahraga sebesar Rp 1.000.000,00 ke atas per satuan.
- 3) Hewan/ternak dan tumbuhan sebesar Rp1.000.000,00 ke atas per satuan.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi Buku dan Perpustakaan sebesar Rp. 51.422.881.082,95, Barang Bercorak Kebudayaan sebesar Rp. 1.264.251.190,00 dan Hewan dan Ternak serta Tanaman sebesar Rp. 14.439.789.956,24.

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2016 sebesar Rp67.053.909.229,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74
SALDO ASET TETAP LAINNYA
per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Tetap Lainnya 2015 Audited		53.576.970.917,95
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2016		
	a. Realisasi Belanja Modal 2016	11.340.765.687,96	
	c. Terima Hibah	2.032.357.170,00	
	c. Terima Mutasi dari SKPD Lain	34.850.000,00	
	d. Ditemukan/Hasil Inv	12.400.643.806,24	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		25.808.616.664,20
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2016		
	a. Mutasi Ke SKPD lain	34.850.000,00	
	b. Reklasifikasi dari AT ke AL	3.710.419.000,00	
	c. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	5.898.373.670,46	
	d. Reklasifikasi ke Persediaan	46.685.707,50	
	e. Barang Rusak Berat	17.591.420,00	
	f. Barang di bawah kapitalisasi	2.623.758.555,00	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		12.331.678.352,96
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2016		67.053.909.229,19

- a. Saldo Aset Tetap Lainnya 2015 Audited sebesar Rp 53.576.970.917,95
- b. Mutasi tambah aset tetap Aset Tetap Lainnya tahun 2016 sebesar **Rp. 25.808.616.664,20** dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2016 sebesar 2016 Rp. 11.340.765.688,26.
 - 2) Terima Hibah sebesar Rp. 2.032.357.170,00 yang terdiri dari hibah dari dana BOSPUS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 1.900.219.970,00 dan hibah dari PUSNAS RI pada Kantor Arsip sebesar Rp 132.137.200,00.
 - 3) Terima Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp 34.850.000,00 merupakan mutasi dari BPMP2KB berupa Alat Kesenian Lain-Lain (Kentongan seremonial di DOM) sebesar Rp. 14.850.000,00 kepada Dinas Pekerjaan Umum dan berupa buku pendidikan sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Kecamatan Balikpapan Timur.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tahun 2016 sebesar Rp. 12.331.678.352,96 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Mutasi Ke SKPD lain sebesar Rp. 34.850.000,00 merupakan mutasi dari BPMP2KB berupa Alat Kesenian Lain-Lain (Kentongan seremonial di DOM) sebesar Rp. 14.850.000,00 ke Dinas Pekerjaan Umum dan berupa buku pendidikan sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Kecamatan Balikpapan Timur.
 - 2) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp.3.710.419.000,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 23.151.608.682,00, Badan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran sebesar Rp. 3.247.960.320,00, Dinas Tata Kota Dan Perumahan sebesar Rp.1.720.557.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp.

- 1.378.592.360,00, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 147.652.447,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp. 10.366.864.420,00, Disperindagkop sebesar Rp. 3.834.646.652,00, Dinas Pasar sebesar Rp. 374.811.000,00, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 607.312.700,00
- 3) Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp. 46.685.707,50 berupa biaya pemeliharaan gedung RSKBSI yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi.
- 4) Barang Rusak Berat sebesar Rp. 17.591.420,00 pada Dinas Pendidikan.
- 5) Barang di bawah kapitalisasi sebesar Rp. 2.623.758.555,00 yang terdiri dari Kelurahan Damai Baru sebesar Rp. 3.383.490,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp.1.604.408.770,00 dan Kantor Arsip sebesar Rp. 955.966.295,00
- d. Dari Rp67.053.909.229,19 Aset Tetap Lainnya terdapat sebesar Rp. 5.435.217.097,95 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sejumlah 9 SMA sebear Rp. 3.776.617.723,00 dan 6 SMK sebesar Rp. 1.609.175.375,00 dan 1 SLB sebesar Rp. 49.423.999,95 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berimplikasi dari pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 75
SALDO ASET TETAP LAINNYA YANG DIALIHKAN KE PROVINSI
per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Sekolah	Aset Tetap Lainnya
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	388.047.500,00
2	SMA Negeri 2	404.079.214,00
3	SMA Negeri 3	172.952.900,00
4	SMA Negeri 4	500.843.662,00
5	SMA Negeri 5	25.435.355,00
6	SMA Negeri 6	987.555.766,00
7	SMA Negeri 7	45.921.100,00
8	SMA Negeri 8	1.071.588.130,00
9	SMA Negeri 9	180.194.096,00
	Jumlah I	3.776.617.723,00
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	193.797.580,00
2	SMK Negeri 2	203.298.567,00
3	SMK Negeri 3	61.512.688,00
4	SMK Negeri 4	212.836.083,00
5	SMK Negeri 5	934.765.957,00
6	SMK Negeri 6	2.964.500,00
	Jumlah II	1.609.175.375,00
1	SLB Negeri	49.423.999,95
	Jumlah III	49.423.999,95
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		5.435.217.097,95

5.5.3.6

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Per 31 Desember 2016
Rp1.216.840.767.227,79

Per 31 Desember 2015
Rp1.398.313.472.633,56

Nilai Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.216.840.767.227,79 dan Rp1.398.313.472.633,56 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2016 sebesar Rp (181.472.705.405,77) atau (12,98)%.

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 435.305.000,00 tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada SMK 3 karena sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur.

Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2016 sebesar Rp 1.216.840.767.227,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76

SALDO ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan 2015 Audited			1.398.313.472.633,56
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2016			
	a.	Terima Hibah	435.305.000,00	
	b.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	165.937.598.911,21	
	c.	Penilaian/Utang	75.686.126.238,38	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi (a+b+c)			242.059.030.149,59
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2016			
	a.	Penghapusan Aset Tetap	301.819.925,23	
	b.	Reklasifikasi dari AT ke AL	45.818.167.575,31	
	c.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	377.411.748.054,82	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi (a+b+c)			423.531.735.555,36
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2016 (I+II-III)			1.216.840.767.227,79

- a.

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 2015 Audited sebesar Rp 1.398.313.472.633,56
- b.

Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2016 sebesar Rp. 242.059.030.149,59 dijelaskan sebagai berikut :

1)

Terima Hibah sebesar 2016 Rp. 435.305.000,00 terdiri dari bangunan dan gedung pada Dinas Pendidikan yang berasal dari dana BOSPUS.

2)

Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp 165.937.598.911,21 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 152.650.340.603,21, Badan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran sebesar Rp. 3.247.960.320,00, Dinas Perhubungan sebesar

Rp. 831.975.360,00, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 824.584.343,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp. 3.797.437.133,00, Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp. 1.477.405.500,00 dan Disperindagkop sebesar Rp. 3.107.895.652,00.

- 3) Utang sebesar Rp. 75.686.126.238,38. Hal ini terjadi karena terjadinya defisit anggaran untuk pembayaran atas realisasi kemajuan fisik pekerjaan-pekerjaan sampai pada tanggal 31 Desember 2016 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 73.831.274.808,04, Badan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran sebesar Rp. 106.607.598,30, Dinas Pendidikan sebesar Rp. 527.242.972,84, Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp. 1.134.532.550,40 dan Disperindagkop sebesar Rp. 86.468.308,80,
- c. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 423.531.735.555,36 merupakan pembangunan beberapa aset tetap yang pengerjaannya dilakukan pada tahun sebelumnya dan fisiknya baru selesai pembangunannya pada Tahun 2016 dan adanya pencatatan ganda dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp. 301.819.925,23 berupa DED jalan masuk Pantai Manggar karena adanya pencatatan ganda pada Disporabudar.
- 2) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp. 45.818.167.575,31 sebelumnya merupakan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang direncanakan akan dilaksanakan pembangunan fisiknya tetapi karena terjadinya defisit anggaran sehingga belum ada kepastian waktu pembangunan fisiknya sehingga dilakukan Reklasifikasi dari AT (kajian) terdiri dari Dinas Tata Kota Dan Perumahan sebesar Rp. 1.803.389.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp. 1.702.953.360,00, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 147.652.447,00, Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp. 356.994.058,00, Disperindagkop sebesar Rp. 4.144.200.652,00, Dinas Pasar sebesar Rp. 699.711.000,00, Bappeda sebesar Rp. 2.334.007.500,00, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 607.312.700,00 dan Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman sebesar Rp. 50.545.000,00.
- 3) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar 377.411.748.055,79 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 376.216.981.708,22 , Dinas Kesehatan sebesar Rp.773.588.914,55, Disperindagkop sebesar Rp. 50.454.711,32, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 151.256.587,36, Disporbudpar sebesar Rp.48.794.500,00 dan Kantor Arsip sebesar Rp.170.671.633,37.

Rekapitulasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 77
Rekapitulasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD
per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	1.213.023.920.685,56
2	Badan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran	106.607.598,30
3	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	319.251.111,75
4	Dinas Pendidikan	527.242.972,98
5	Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan	2.611.938.050,40
6	Disperindagkop	86.468.308,80
7	Dinas Pasar	2.731.000,00
8	Badan Lingkungan Hidup	162.607.500,00
		1.216.840.767.227,79

5.5.4	ASET LAINNYA	Per 31 Desember 2016 Rp 358.171.595.963,81	Per 31 Desember 2015 Rp274.733.306.361,48
-------	---------------------	--	---

Aset Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan merupakan aset yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset tak Berwujud dan Aset Lain-lain per 31 Desember 2016. Aset Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran	Per 31 Desember 2016 Rp3.706.145.682,09	Per 31 Desember 2015 Rp6.001.114.802,00
---------	-----------------------------------	---	---

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.706.145.682,09 merupakan piutang angsuran yang belum dibayar/jatuh tempo yang timbul dari penjualan cicilan/angsuran aset milik Pemerintah Kota Balikpapan berupa Rumah Dinas berdasarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-52/2004 tentang Penghapusan atas Penjualan Rumah Dinas Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanah dan Penghapusan dari Daftar Inventarisasi Kekayaan Milik Pemerintah Kota Balikpapan dan SK Walikota Balikpapan tentang Penjualan rumah Daerah Gol III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemkot Balikpapan Nomor 188.45-07/2010 tgl 8 Januari 2010.

Nilai tagihan penjualan angsuran Tahun 2016, jika dibandingkan dengan nilai Tahun 2015, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 78
Rincian Perbandingan Nilai Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Nilai TPA		Bertambah
	TA 2016	TA 2015	(Berkurang)
Tagihan penjualan angsuran	6.576.498.377,00	7.079.004.068,00	(502.505.691,00)
Penyisihan	(2.870.352.694,92)	(1.077.889.266,00)	(1.792.463.428,92)
Tagihan penjualan angsuran Neto	3.706.145.682,09	6.001.114.802,00	(2.294.969.119,92)

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada *Lampiran 31 & 32*

5.5.4.2	Tuntutan Ganti Rugi	Per 31 Desember 2016 Rp0.00	Per 31 Desember 2015 Rp62.289.188,18
---------	----------------------------	---------------------------------------	--

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 setelah penyisihan sebesar Rp0.00 adalah Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang merupakan tagihan atas kerugian Pemerintah Kota Balikpapan yang belum dilunasi seluruhnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap baik dengan SK pembebanan, SKTJM dan putusan pengadilan.

Nilai Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2016, jika dibandingkan dengan nilai Tahun 2015, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 79
Rincian Perbandingan Nilai Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Jumlah (Rp)	
	TA 2016	TA 2015
Tuntutan Ganti Rugi	1.639.971.771,66	107.564.165,18
Penyisihan	(1.639.971.771,66)	(45.274.977,00)
Nilai Bersih	0.00	62.289.188,18

Rincian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada *Lampiran 33*.

5.5.4.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2016
Rp145.500.096.000,00

Per 31 Desember 2015
Rp145.500.096.000,00

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa *Built, Operate, and Transfer (BOT)* per 31 Desember 2016 sebesar Rp145.500.096.000,00 merupakan nilai tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan yang diserahkan untuk dikelola. Adapun aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah:

Tabel 80
Rincian Aset yang dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	Tanah (Rp)	Bangunan (Rp)	Pengakuan BOT (Rp)	Keterangan
1.	PT HASTA KREASI MANDIRI <u>No. 180/1060/Huk/2001</u> No.014/LGL/SPK/HKM/VII/01 23-07-2001 <u>No. 180/1060.A/Huk/2001</u> No.147/LGL/ADD-SPK/HKM/IX/0112-09-2001 Pembangunan dan Peremajaan Pasar Muara Rapak	40.429.200.000,00	74.925.450.000,00	40.429.200.000,00	- Perjanjian Kerjasama - Pembangunan selesai
2.	PT BINTANG HYTIEN JAYA <u>No.180/16/Pemkot-Peri/III/2004</u> No. 078/BHJ-Perj III/2004 29-03-2004 Pembangunan dan Pengelolaan Balikpapan Plaza Hotel	12.680.000.000,00	120.000.000.000,00	12.680.000.000,00	- Perjanjian Kerjasama - Pembangunan selesai
3.	PT HASTA KREASI MANDIRI <u>No. 644.1/1087/PP/XII/2004</u> No.060/LGL/HKM-PKS/XII/200415-12-2004 <u>No. 644.1/1087.A/PP/2007</u> No.017/LGL/HKM-AD.I.PKS/XI/200707-11-2007 Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Baru Balikpapan (Pasar Baru Square)	75.850.000.000,00	450.000.000.000,00	75.850.000.000,00	- Perjanjian Kerjasama - Pembangunan selesai
4.	PT GUSHER MITRA SEJAHTERA <u>No. 030/59/PP-II/2007</u> No.001-PK/GNS-Pmd.Bpn/II/200702-02-2007 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur	16.540.896.000,00	104.517.000.000,00	16.540.896.000,00	- Perjanjian Kerjasama - Pembangunan selesai
	Jumlah	145.500.096.000,00	749.442.450.000,00	145.500.096.000,00	

5.5.4.4	Aset Tak Berwujud	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp 136.411.293.488,76	Rp 78.720.844.768,00

Nilai Buku Aset Tidak Berwujud tahun 2016 sebesar Rp 87.584.651.586,13. Perhitungan Nilai Buku Aset tidak berwujud dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 81
Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Sebelum Amortisasi	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2016	Nilai Buku Per 31 Desember 2016
Aset Tak Berwujud	136.411.293.488,76	(48.826.641.902,63)	87.584.651.586,13

Daftar rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada **Lampiran 34**

Nilai Perolehan mutasi aset tidak berwujud sebelum amortisasi per 31 Desember 2016 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 82
Mutasi Aset Tak Berwujud Sebelum Amortisasi per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

Jenis Aset	Saldo Awal (Audited)	Mutasi Tambah Tahun 2016	Mutasi Kurang Tahun 2016	Saldo Akhir Per 31 Des 2016
Aset Tak Berwujud	78.720.844.768,00	63.807.800.753,00	6.117.352.032,24	136.411.293.488,76

Rincian amortisasi aset tak berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

5.5.4.5	Aset Lain-Lain	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp121.380.702.695,60	Rp84.175.451.236,55

Aset lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp121.380.702.695,60 adalah nilai aset lain-lain Pemerintah Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83
Rincian Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2016

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	2.740.757.494,14	Semula dicatat dalam kelompok investasi non permanen-dana bergulir
2.	Persediaan Obat Kadaluwarsa	64.008.800,00	Persediaan Obat RSKB Sayang Ibu yang expired
3.	Saldo Aset Tetap yang menunggu penghapusan	86.564.624.810,46	Merupakan Aset yang diusulkan untuk dihapus
4.	Barang yang memerlukan penelusuran lebih lanjut	671.311.591,00	Aset yang memerlukan penelusuran lebih lanjut
5.	Aset tetap sengketa yang dimenangkan penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>incraht</i>), namun masih dalam proses penghapusan	22.644.000.000,00	a. Tanah Taman Bekapai (Eks. Lapangan Veteran), luas 4.800 M2 senilai 12.000.000.000,00 sesuai putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 592 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Januari 2003 yang amar putusnya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK yakni Pemerintah Kota Balikpapan. b. Tanah Pasar Blauran dan sebagian Pasar Ikan Klandasan seluas 27.096 M2 senilai Rp40.644.000.000,00 sesuai putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) Nomor 2204K/Pdt/2007 tanggal 2 Juni 2009 yo putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 639 PK/Pdt/2010 tanggal 11 April 2011.

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
6.	Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat yang akan dilikuidasi	8.696.000.000,00	Reklasifikasi dari Investasi Permanen
	Jumlah	121.380.702.695,60	

Rincian Aset Lain-Lain per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 36**

Penjelasan aset lain-lain :

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.740.757.494,14 merupakan uang jaminan atas pinjaman para pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Kota Balikpapan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Bank Kaltim dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 180/Hk/XI/2006, Nomor 077/BPD-PST/PRJ/XI/2006, Nomor PPK/PKS/28/XI/2006 tanggal 29 November 2006. Menurut isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa setiap pinjaman dari pengusaha mikro Kota Balikpapan yang mengalami macet, Pemerintah Kota Balikpapan akan menanggung sebesar 35% dari jumlah kredit yang macet, sedangkan sisanya ditanggung oleh Bank Kaltim sebesar 30% dan PT Asuransi Kredit Indonesia sebesar 35%.

Jumlah Kas yang dibatasi penggunaannya disimpan dalam bentuk giro pada Bank Kaltim Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 0031440777.

Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat yang akan dilikuidasi Rp8.696.000.000,00

Penyertaan modal pada Kapal Ferry Cepat sebesar Rp8.696.000.000,00 telah direklasifikasi dari Investasi Permanen Pemkot Balikpapan menjadi aset lain-lain per 31 Desember 2013. Penjelasan lebih lanjut tentang Penyertaan pada Kapal Ferry Cepat (KFC) sebesar Rp8.696.000.000,00 dapat dikemukakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 dilakukan kesepakatan bersama oleh Walikota Balikpapan, Walikota Bontang, Bupati Kutai Timur, Bupati Paser dan Direktur Utama PT Agro Bintang Dharma Nusantara menerangkan dan bermufakat sebagai berikut:

1. Menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2002 Nomor 35 dibuat dihadapan ADI GUNAWAN, SH, notaris di Balikpapan para Pihak telah mendirikan Perseroan Terbatas ‘PT PELAYARAN BINTANG KALTIM TRANSPORT’ berkedudukan di Balikpapan;
 - b. Bahwa Perseroan Terbatas tersebut hingga saat ini masih belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia karena persyaratan-persyaratan untuk memperoleh pengesahan dari yang berwajib tersebut belum dipenuhi pendiri;
 - c. Bahwa oleh karena hingga saat ini Perseroan Terbatas tersebut belum menjadi badan hukum karena tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada instansi yang berwenang maka berdasarkan pasal 10 ayat 9 UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport tersebut bubar karena hukum.
 - d. Bahwa oleh karena PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport tersebut bubar karena hukum maka para pendiri bermaksud untuk mengadakan pemberesan dengan jalan menjual semua aset atas nama PT Bintang Kaltim Transport tersebut.
2. Bermufakat untuk:
 - a. Menjual semua aset PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport tetapi tidak terbatas pada 2 (dua) unit kapal;
 - b. Menunjuk Kantor Pelayanan Lelang Negara untuk menjual semua aset PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport secara lelang dan hasil lelang dikurangi ongkos-ongkos, sisanya akan dibagi berdasarkan perbandingan uang yang telah disetor ke dalam PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport;
 - c. Apabila hasil penjualan aset kurang dari biaya-biaya/ongkos-ongkos yang wajib dibayar maka kekurangan tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak dengan bagian yang sama;

- d. Menunjuk Pemerintah Kota Balikpapan bertindak untuk dan atas nama pendiri melaksanakan penjualan aset termasuk menjual dan berhubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan penilaian aset;
- e. Tentang kesepakatan bersama ini dengan semua akibatnya para pendiri PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan uraian tersebut Pos Investasi Permanen Kapal Fery Cepat disajikan pada pos aset lain-lain.

5.5.5.1

KEWAJIBAN

JANGKA PENDEK

Per 31 Desember 2016

Rp 278.056.183.849,67

Per 31 Desember 2015

Rp26.590.993.047,54

Kewajiban Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2016 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yaitu Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Pendapatan diterima di muka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek lainnya, yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.5.1.1

Utang PFK

Per 31 Desember 2016

Rp0.00

Per 31 Desember 2015

Rp1.956.220,00

Tidak terdapat Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2016. Utang PFK jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 84
Perbandingan Nilai Utang PFK per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Nama SKPD	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Kelurahan Margo Mulyo	0.00	1.956.220,00
	Jumlah	0.00	1.956.220,00

5.5.5.1.2

Pendapatan Diterima Di Muka

Per 31 Desember 2016

Rp10.745.942.080,65

Per 31 Desember 2015

Rp7.149.451.908,62

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang diperoleh dari beberapa retribusi dan sewa lahan atas pihak ketiga yang telah diterima di RKUD Kota Balikpapan atas manfaat yang baru akan diberikan pada periode-periode berikutnya.

Pendapatan diterima di muka dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 85
Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Nama SKPD	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1.	BPKAD/PPKD	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Lahan	134.636.800,00	198.425.600,00
2.	DISNAKERSOS	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	85.674.945,75	262.109.411,83
3.	DTKP	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Rusunawa	0.00	2.625.000,00
4.	DPU	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa ATM	21.952.814,90	117.714.405,98
5.	DINAS PASAR	Sewa Petak Pasar	40.468.421,05	1.620.000,00
6.	DISPENDA	Pajak Reklame	351.431.136,60	33.820.000,00
7.	RSUD	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa ATM	29.211.822,66	38.226.600,99

No.	Nama SKPD	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
8.	BPBD	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	288.125.544,13	159.664.334,91
9.	BPMP2T	Izin Gangguan dan Keramaian	9.053.129.591,58	5.837.313.933,72
10.	DISHUB	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	741.311.003,97	497.932.621,20
Jumlah			10.745.942.080,65	7.149.451.908,62

Daftar mutasi pendapatan diterima di muka Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 37*

5.5.5.1.3
Utang Belanja pada Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2016
Rp 151.843.895.109,03

Per 31 Desember 2015
Rp8.027.694.914,92

Utang Belanja kepada Pihak Ketiga sebesar Rp151.843.895.109,03 merupakan utang belanja barang dan jasa pada pihak ketiga yang belum terbayar per 31 Desember 2016. Utang Belanja kepada Pihak Ketiga terdiri atas :

1. Belanja jasa listrik, air, telpon dan intenet pada beberapa SKPD.
2. Utang jasa layanan pada BLUD
3. Utang Belanja pekerjaan fisik yang tertunda pembayarannya dan dibayarkan di tahun berikutnya karena pemangkasan/tidak disalurkannya alokasi Dana Bagi Hasil SDA Pemerintah Pusat.

Rincian Utang Belanja SKPD per 31 Desember 2016 dapat dilihat di *Lampiran 38* dan Daftar Nama Kreditur pada *Lampiran 39*.

5.5.5.1.4
Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2016
Rp115.466.346.660,00

Per 31 Desember 2015
Rp11.411.890.004,00

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp115.466.346.660,00 merupakan utang atas tunjangan profesi guru yang belum terbayar per 31 Desember 2016 dan utang atas lebih salur pendapatan transfer Pemerintah Pusat . Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 86
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN (TUNJANGAN PENGHASILAN GURU)	
2	SALDO AWAL 2015	11.411.890.004,00
3	KOREKSI KURANG / (LEBIH SAJI)	293.130.749,00
4	SALDO SETELAH KOREKSI	11.118.759.255,00
5	BERTAMBAH	16.147.400,00
6	BERKURANG	11.004.371.671,00
7	JUMLAH UTANG TUNJANGAN GURU	130.534.984,00
8	UTANG ATAS KELEBIHAN SALUR DBH	115.335.811.676,00
9	JUMLAH TOTAL	115.466.346.660,00

5.5.6	EKUITAS	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp7.530.256.161.697,46	Rp6.790.306.381.510,18

Ekuitas sebesar Rp 7.530.256.161.697,46 terdiri dari jumlah ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Operasional dan Ekuitas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

Ekuitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 87
Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Ekuitas	7.530.256.161.697,46	6.790.306.381.510,18	739.929.010.178,28
	Jumlah	7.530.256.161.697,46	6.790.306.381.510,18	739.929.010.178,28

D. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Kota Balikpapan. Laporan Operasional disusun dengan basis akrual dengan pengakuan pendapatan dan Beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah yang akan dijelaskan secara lebih jauh sebagai berikut :

5.6	PENDAPATAN - LO	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		2.096.327.779.852,72	Rp2.406.043.121.850,80

Merupakan pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Pendapatan Daerah Kota Balikpapan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 88
Pendapatan LO TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	597.346.036.469,58	623.645.922.183,58	(26.299.885.714,00)
2.	Pendapatan Transfer-LO	1.353.752.214.205,00	1.762.581.427.637,00	(408.829.213.432,00)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	145.229.529.178,14	19.815.772.030,22	125.413.757.147,92
	Jumlah	2.096.327.779.852,72	2.406.043.121.850,80	(309.715.341.998,08)

5.6.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	Per 31 Desember 2016 597.346.036.469,58	Per 31 Desember 2015 Rp623.645.922.183,58
--------------	--	---	---

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp597.346.036.469,58 yang terdiri dari:

Tabel 89
Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	437.836.661.634,20	405.178.181.079,31	32.658.480.554,89
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	43.720.449.893,05	41.147.758.989,00	2.572.690.904,05
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	16.907.554.147,14	22.212.023.429,09	(5.304.469.281,95)
4.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	98.881.370.795,19	155.107.958.686,18	(56.226.587.890,99)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	597.346.036.469,58	623.645.922.183,58	(26.299.885.714,00)

Dari daftar tabel di atas dapat dijelaskan rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LO dan yang mempengaruhinya, yaitu :

5.6.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	Per 31 Desember 2016 437.836.661.634,20	Per 31 Desember 2015 Rp405.178.181.079,31
----------------	-------------------------------------	---	---

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp437.836.661.634,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90
Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2016 dan 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Pajak Hotel - LO	41.667.189.451,95	41.954.461.027,39	(287.271.575,44)
Pajak Restoran - LO	60.151.626.985,28	56.953.990.135,92	3.197.636.849,36
Pajak Hiburan - LO	20.116.971.323,00	16.783.872.797,00	3.333.098.526,00
Pajak Reklame - LO	8.505.751.804,63	8.347.110.226,00	158.641.578,63
Pajak Penerangan Jalan - LO	102.510.158.033,74	88.582.522.182,00	13.927.635.851,74
Pajak Parkir - LO	14.566.573.749,00	11.744.314.492,00	2.822.259.257,00
Pajak Air Tanah - LO	2.459.288.030,60	2.104.756.496,60	354.531.534,00
Pajak Sarang Burung Walet - LO	24.740.551,00	31.130.750,00	(6.390.199,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	3.232.672.150,00	366.681.540,00	2.865.990.610,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	101.935.770.891,00	95.521.631.544,00	6.414.139.347,00

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	82.665.918.664,00	82.787.709.888,40	(121.791.224,40)
Jumlah	437.836.661.634,20	405.178.181.079,31	32.658.480.554,89

- 1) Keseluruhan jenis pajak daerah di atas mempengaruhi mutasi penambahan/pengurangan akun piutang pajak daerah Kota Balikpapan.
- 2) Untuk Pajak Reklame selain mempengaruhi mutasi piutang juga mempengaruhi pendapatan diterima di muka untuk SKPD Dinas Pendapatan Daerah.

5.6.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Per 31 Desember 2016
Rp43.720.449.893,05

Per 31 Desember 2015
Rp41.147.758.989,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp43.720.449.893,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 91

Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2016 dan 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	43.720.449.893,05	41.147.758.989,00	2.572.690.904,05
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	4.184.686.504,79	4.083.210.634,63	101.475.870,16
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	8.593.941.478,00	8.393.307.658,00	200.633.820,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	949.550.924,98	1.172.261.000,00	(222.710.075,02)
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	3.654.044.830,95	3.529.241.599,00	124.803.231,95
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.999.999.099,57	1.739.949.978,80	260.049.120,77
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	417.488.159,28	241.679.794,10	175.808.365,18
Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	163.932.500,00	189.018.750,00	(25.086.250,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	37.048.250,00	19.911.375,00	17.136.875,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	187.937.080,00	117.270.100,00	70.666.980,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	3.602.163.114,08	2.824.940.145,02	777.222.969,06
Retribusi Terminal - LO	62.292.000,00	79.597.000,00	(17.305.000,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	363.076.000,00	439.740.950,00	(76.664.950,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	71.275.000,00	91.410.000,00	(20.135.000,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	1.469.750.000,00	1.423.850.000,00	45.900.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	13.973.184.605,50	15.321.988.236,00	(1.348.803.630,50)
Retribusi Izin Gangguan - LO	3.477.754.687,14	1.023.476.880,28	2.454.277.806,86
Retribusi Izin Trayek - LO	37.238.092,68	51.662.500,00	(14.424.407,32)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	296.239.466,08	230.568.388,17	65.671.077,91
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan - LO	178.848.100,00	174.674.000,00	4.174.100,00

- 1) Retribusi Pelayanan kesehatan mempengaruhi akun kas di bendahara penerimaan pada SKPD Dinas Kesehatan Kota.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan mempengaruhi Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO mempengaruhi akun pendapatan diterima di muka pada SKPD Dinas Perhubungan.
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar – LO mempengaruhi akun piutang retribusi pelayanan pasar dan akun pendapatan diterima di muka pada SKPD Dinas Pasar.
- 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO mempengaruhi akun pendapatan diterima di muka pada SKPD Dinas Perhubungan.
- 6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO mempengaruhi akun pendapatan diterima di muka pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- 7) Retribusi Pengolahan Limbah Cair – LO mempengaruhi akun Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada SKPD Dinas Tata Kota dan Pemukiman.
- 8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO mempengaruhi akun piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk sewa rumah produksi tahu tempe pada SKPD Disperindagkop dan sewa rusunawa pada SKPD Dinas Tata Kota dan Pemukiman serta akun piutang lainnya untuk sewa lahan pada SKPD BPKAD. Disamping itu, retribusi ini juga mempengaruhi akun pendapatan diterima di muka pada SKPD Dinas Tata Kota dan Pemukiman.
- 9) Retribusi Izin Gangguan – LO mempengaruhi akun piutang retribusi Izin Gangguan pada SKPD BPMP2T.
- 10) Retribusi Izin Trayek – LO mempengaruhi akun pendapatan diterima di muka pada SKPD Dinas Perhubungan.
- 11) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO mempengaruhi akun pendapatan diterima di muka pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.

5.6.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Per 31 Desember 2016 Rp16.907.554.147,14	Per 31 Desember 2015 Rp22.212.023.429,09
---	--	--

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp16.907.554.147,14 merupakan pembagian laba (deviden) atas penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan pada :

- 1) PDAM senilai Rp10.410.890.770,15
- 2) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur senilai Rp5.898.551.437,99
- 3) Perusda Kota Balikpapan Rp598.111.939,00

5.6.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	Per 31 Desember 2016 Rp98.881.370.795,19	Per 31 Desember 2015 Rp155.107.958.686,18
---	--	---

Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp98.881.370.795,19 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 92
Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO TA 2016 dan 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	98.881.370.795,19	155.107.958.686,18	(56.226.587.890,99)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	1.387.600.000,00	60.027.000,00	1.327.573.000,00
Penerimaan Jasa Giro - LO	2.904.711.106,91	5.550.253.340,74	(2.645.542.233,83)
Pendapatan Bunga - LO	5.871.576.358,14	56.884.246.444,92	(51.012.670.086,78)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	7.366.729,00	544.697.022,64	(537.330.293,64)
Pendapatan Denda Pajak - LO	11.022.073.314,62	36.505.587.175,28	(25.483.513.860,66)
Pendapatan Denda Retribusi - LO	294.603.800,00	56.572.387,00	238.031.413,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	39.636.225,00	49.364.775,00	(9.728.550,00)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0	24.750.000,00	(24.750.000,00)
Pendapatan BLUD - LO	64.912.084.194,02	43.722.434.905,32	21.189.649.288,70
Penggunaan Mobil Tinja - LO	1.750.000,00	8.400.000,00	(6.650.000,00)
Pendapatan Kontribusi Plaza/Pasar/Hotel - LO	1.011.285.814,00	1.561.226.512,50	(549.940.698,50)
Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO	11.423.156.463,50	10.140.399.122,78	1.282.757.340,72
Pendapatan Tak Terduga.	5.526.790,00	0	5.526.790,00

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO merupakan hasil penjualan lelang kendaraan Pemkot Balikpapan.
- 2) Pendapatan denda pajak – LO mempengaruhi akun piutang lainnya pada SKPD Dinas Pendapatan Daerah.
- 3) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO mempengaruhi akun aset lancar pada Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Akun Aset Lainnya pada Tagihan Penjualan Angsuran.
- 4) Pendapatan BLUD – LO mempengaruhi akun aset lancar pada Kas di Bendahara BLUD, Piutang Jasa Layanan BLUD dan Pendapatan diterima di muka BLUD.
- 5) Pendapatan Kontribusi Plaza/Pasar/Hotel – LO mempengaruhi piutang lainnya pada SKPD BPKAD.

5.6.2	PENDAPATAN	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
	TRANSFER – LO	1.353.752.214.205,00	Rp1.762.581.427.637,00

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.353.752.214.205,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 93
Pendapatan Transfer- LO Tahun Anggaran 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	980.013.977.812,00	1.145.301.044.119,00	(165.287.066.307,00)
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	76.374.973.393,00	255.528.063.518,00	(179.153.684.603,00)
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	297.363.263.000,00	361.752.320.000,00	(64.389.057.000,00)
	Jumlah Pendapatan Transfer - LO	1.353.752.214.205,00	1.762.581.427.637,00	(408.829.213.432,00)

Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Dari rincian diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Pendapatan Transfer-LO menggambarkan kinerja Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2016, Pendapatan Transfer-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

5.6.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	Per 31 Desember 2016 Rp980.013.977.812,00	Per 31 Desember 2015 Rp1.145.301.044.119,00
----------------	--	---	---

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Balikpapan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO Pemerintah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp980.013.977.812,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 94
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan- LO Tahun Anggaran 2016 dan 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	980.013.977.812,00	1.145.301.044.119,00	(165.287.066.307,00)
Bagi Hasil Pajak - LO	142.907.891.921,00	125.038.354.850,00	17.869.537.071,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	371.196.714.670,00	622.563.917.269,00	(251.367.202.599,00)
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	391.898.857.000,00	388.230.396.000,00	3.668.461.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	74.010.514.221,00	9.468.376.000,00	64.542.138.221,00

5.6.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	Per 31 Desember 2016 Rp76.374.973.393,00	Per 31 Desember 2015 Rp255.528.063.518,00
----------------	---	--	---

Merupakan pendapatan transfer yang terdiri dari Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru serta Dana Insentif Daerah per 31 Desember 2016 dengan perbandingan sebagai berikut :

Tabel 95
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun Anggaran 2016 dan 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	76.374.973.393,00	255.528.063.518,00	(179.153.090.125,00)
Dana Penyesuaian - LO	76.374.973.393,00	255.528.063.518,00	(179.153.090.125,00)

5.6.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi - LO	Per 31 Desember 2016 Rp297.363.263.000,00	Per 31 Desember 2015 Rp361.752.320.000,00
----------------	--	---	---

Untuk Tahun 2016 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebesar Rp297.363.263.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi, seperti pada tabel berikut :

Tabel 96
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO Tahun Anggaran 2016 dan 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	297.363.263.000,00	361.752.320.000,00	(64.389.057.000,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	194.322.213.000,00	206.622.820.000,00	(12.300.607.000,00)
Bantuan Keuangan Provinsi-LO	103.041.050.000,00	155.129.500.000,00	(52.088.450.000,00)

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mempengaruhi akun Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

5.6.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	Per 31 Desember 2016 Rp145.229.529.178,14	Per 31 Desember 2015 Rp 19.815.772.030,22
--------------	--	---	---

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp145.229.529.178,14 yang menandakan ada penambahan yang sebesar Rp46.042.280.529,78 dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 125.413.757.147,92 terdiri dari:

Tabel 97
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan Hibah - LO	145.229.529.178,14	19.813.455.070,22	125.416.074.107,92
3.	Pendapatan Lainnya - LO	0.00	2.316.960,00	(2.316.960,00)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	145.229.529.178,14	19.815.772.030,22	125.413.757.147,92

Pendapatan Hibah terdiri Bantuan dari Pemerintah Pusat dalam program AUSAID dan Hibah Aset yang diterima oleh beberapa SKPD.

5.7	BEBAN – LO	Per 31 Desember 2016 1.942.309.077.514,72	Per 31 Desember 2015 Rp2.258.795.251.678,28
------------	-------------------	---	---

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan. Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi,hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.Beban LO terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer yang akan dijelaskan sebagai berikut :

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Beban Operasi	1.941.310.270.718,72	2.257.796.444.882,28	(316.486.174.163,56)
3.	Beban Transfer	998.806.796,00	998.806.796,00	0.00
	Jumlah Beban	1.942.309.077.514,72	2.258.795.251.678,28	(316.486.174.163,56)

Tabel 100
Rincian Beban Pegawai LO TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Pegawai - LO	697.434.169.054,53	709.766.229.842,37	(12.332.060.787,84)
Gaji dan Tunjangan - LO	365.895.655.967,20	367.098.119.823,00	(1.202.463.855,80)
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	306.466.504.565,00	317.467.162.530,00	(11.000.657.965,00)
Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	4.628.120.000,00	4.555.951.000,00	72.169.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	16.647.962.766,83	15.596.765.689,37	1.051.197.077,46
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.345.503.755,50	1.359.025.800,00	(13.522.044,50)
Uang Lembur - LO	2.450.422.000,00	3.689.205.000,00	(1.238.783.000,00)

Beban tambahan penghasilan PNS mempengaruhi akun utang jangka pendek lainnya yang merupakan pembayaran atas tunjangan penghasilan guru.

5.7.1.2
Beban Persediaan - LO

Per 31 Desember 2016
Rp56.027.847.136,53

Per 31 Desember 2015
Rp94.091.391.801,24

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp56.027.847.136,53 dan Rp94.091.391.801,24. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 101
Rincian Beban Persediaan LO TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Persediaan	56.027.847.136,53	94.091.391.801,24	(38.063.544.664,71)
Beban Bahan Pakai Habis	24.876.873.374,08	38.216.735.612,10	(13.339.862.238,02)
Beban Persediaan Bahan/ Material	31.150.973.762,45	55.874.656.189,14	(24.723.682.426,69)

Beban persediaan mempengaruhi akun persediaan barang habis pakai TA 2016.

5.7.1.3
Beban Barang dan Jasa- LO

Per 31 Desember 2016
Rp617.750.145.993,72

Per 31 Desember 2015
Rp606.411.356.379,17

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp617.750.145.993,72 dan Rp606.411.356.379,17 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas di Pemkot Balikpapan. Beban barang dan jasa dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 102
Rincian Beban Barang dan Jasa- LO TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Barang dan Jasa	617.750.145.993,72	606.411.356.379,17	11.338.789.614,55
Beban Jasa Kantor	74.750.242.406,51	75.112.528.628,44	(362.286.221,93)

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Premi Asuransi	3.561.990.019,68	2.010.903.373,56	1.551.086.646,12
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	30.914.227.212,75	39.229.012.375,46	(8.314.785.162,71)
Beban Cetak dan Penggandaan	12.872.202.946,00	18.107.422.989,00	(5.235.220.043,00)
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.339.761.155,64	4.200.138.330,66	139.622.824,98
Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.266.458.800,00	1.714.717.700,00	(448.258.900,00)
Beban Sewa Alat Berat	29.150.000,00	0,00	29.150.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.857.450.107,00	5.136.665.240,00	(279.215.133,00)
Beban Makanan dan Minuman	73.049.028.303,77	91.865.631.592,60	(18.816.603.288,83)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.698.071.550,00	2.687.434.700,00	(989.363.150,00)
Belanja Pakaian Kerja	2.985.160.487,00	3.413.858.700,00	(428.698.213,00)
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.835.926.800,00	3.291.357.110,00	544.569.690,00
Beban Jasa Konsultasi	4.429.513.440,00	9.275.436.200,56	(4.845.922.760,56)
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.899.010.572,00	13.291.605.129,00	(1.392.594.557,00)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.642.030.000,00	1.847.135.000,00	(205.105.000,00)
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.902.641.463,33	20.266.039.580,00	(14.363.398.116,67)
Honorarium PNS	44.746.358.970,00	70.102.925.906,77	(25.356.566.936,77)
Honorarium Non PNS	169.995.852.514,00	166.898.781.325,56	3.097.071.188,44
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.610.915.000,00	14.780.915.000,00	(8.170.000.000,00)
Beban Pegawai BLUD RSKB Sayang Ibu	3.710.089.749,00	4.514.790.463,00	(804.700.714,00)
Beban Pegawai BLUD Puskesmas	5.930.881.831,50	5.878.633.434,00	52.248.397,50
Beban Pegawai Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	6.821.232.713,13	6.432.824.598,24	388.408.114,89
Beban Barang KAPITASI JKN	3.239.618.842,87	2.637.216.085,75	602.402.757,12
Beban Barang Yang Nilai Satuannya Sampai Dengan Rp 1.000.000,-	428.435.140,00	9.859.672.508,13	(9.431.237.368,13)
Beban Tali Asih, Santunan, Kompensasi, General Check Up	115.476.825,00	623.158.706,00	(507.681.881,00)
Beban Jasa Berlangganan	340.896.459,00	282.688.531,00	58.207.928,00
Beban Pemeriksaan Laboratorium	690.380.728,00	633.220.897,00	57.159.831,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	181.730.000,00	1.343.555.245,00	(1.161.825.245,00)
Beban Barang Dan Jasa BLUD RSKB Sayang Ibu	2.366.024.931,97	1.148.492.907,34	1.217.532.024,63
Beban Barang Perlengkapan Kantor	8.295.000,00	15.296.000,00	(7.001.000,00)
Beban Barang Perlengkapan Dapur	10.614.000,00	39.266.230,00	(28.652.230,00)
Beban Penyelesaian Perkara Hukum	48.450.000,00	40.324.850,00	8.125.150,00
Beban Kontribusi Lomba	58.980.000,00	66.470.000,00	(7.490.000,00)
Beban Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	2.881.909.664,00	3.332.815.725,00	(450.906.061,00)
Beban Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	14.162.845.238,00	18.878.219.632,00	(4.715.374.394,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	2.366.332.867,09	1.679.028.879,94	687.303.987,15
Beban Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Non PNS)	1.932.985.650,00	2.533.942.423,00	(600.956.773,00)
Beban bahan Perlengkapan Kamar	14.073.400,00	445.000,00	13.628.400,00
Beban Pengadaan Perlengkapan Penghias ruangan	4.598.000,00	103.533.020,00	(98.935.020,00)
Beban Bahan Perlengkapan Tindakan Medik	0,00	146.246.887,00	(146.246.887,00)

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Pengadaan Alat Komunikasi	0.00	175.894,00	(175.894,00)
Beban Jasa Perizinan	4.748.592,00	4.748.592,00	0.00
Beban Pengurusan Surat-Surat Kendaraan	0.00	2.800.000,00	(2.800.000,00)
Beban Kerjasama RSUD	1.184.007.204,00	2.561.573.933,00	(1.377.566.729,00)
Beban Tim Pemandu Haji Daerah	75.167.016,00	78.476.352,00	(3.309.336,00)
Beban Barang Perangkat Lunak	10.655.000,00	293.076.000,00	(282.421.000,00)
Beban Belanja Pegawai BLUD RSUD	18.361.492.353,00	0.00	18.361.492.353,00
Beban Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	16.322.161.973,48	48.154.704,16	16.274.007.269,32
Beban Belanja Barang dan Jasa BOS Pusat	77.092.071.068,00	0.00	77.092.071.068,00

5.7.1.4
Beban Pemeliharaan- LO

Per 31 Desember 2016
Rp31.266.163.942,62

Per 31 Desember 2015
Rp57.500.771.889,38

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp31.266.163.942,62 dan Rp57.500.771.889,38. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 103
Rincian Beban Pemeliharaan- LO TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Pemeliharaan	31.266.163.942,62	57.500.771.889,38	(26.234.607.946,76)
Beban Pemeliharaan	31.266.163.942,62	57.500.771.889,38	(26.234.607.946,76)

5.7.1.5
Beban Perjalanan Dinas- LO

Per 31 Desember 2016
Rp51.683.550.036,04

Per 31 Desember 2015
Rp51.575.966.839,30

Beban Perjalanan Dinas tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp51.683.550.036,04 dan Rp51.575.966.839,30. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 104
Rincian Beban Perjalanan Dinas - LO TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Perjalanan Dinas	51.683.550.036,04	51.575.966.839,30	107.583.196,74
Beban Perjalanan Dinas	51.683.550.036,04	51.575.966.839,30	107.583.196,74

5.7.1.6	Beban Subsidi - LO	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp800.000.000,00	Rp800.000.000,00

Beban Subsidi tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 dan Rp800.000.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk mensubsidi Operasional Bus Sekolah yang dikelola Perusda Kota Balikpapan

5.7.1.7	Beban Hibah - LO	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp154.990.261.901,00	Rp264.504.384.697,00

Jumlah Beban Hibah Pemerintah Kota Balikpapan untuk Tahun 2016 sebesar Rp154.990.261.901,00 yang terdiri atas beban hibah untuk Kelompok, Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar. Rincian beban hibah Tahun 2016 dan 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 105
Rincian Beban hibah TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Hibah	154.990.261.901,00	264.504.384.697,00	(109.514.122.796,00)
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	18.019.375.000,00	24.339.105.000,00	(6.319.730.000,00)
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	100.889.603.758,00	198.521.328.097,00	(97.631.724.339,00)
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***	36.081.283.143,00	41.643.951.600,00	(5.562.668.457,00)

5.7.1.8	Beban Bantuan Sosial - LO	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp433.522.400,00	Rp6.254.308.000,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp433.522.400,00 dan Rp6.254.308.000,00. Beban tersebut merupakan beban untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 106
Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Bantuan Sosial	433.522.400,00	6.254.308.000,00	(5.820.785.600,00)
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	433.522.400,00	6.254.308.000,00	(5.820.785.600,00)

5.7.1.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp283.728.807.572,60	Rp308.578.294.896,58

Jumlah Beban penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp283.728.807.572,60 dan Rp308.578.294.896,58. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 107
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	283.728.807.572,60	308.578.294.896,58	(24.849.487.323,98)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	83.398.982.410,79	68.871.053.518,81	14.527.928.891,98
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.583.103.705,61	45.649.927.325,00	(1.066.823.619,39)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	146.646.569.186,83	178.721.945.340,60	(32.075.376.153,77)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.100.152.269,37	15.335.368.712,17	(6.235.216.442,8)

5.7.1.10	Beban Penyisihan Piutang - LO	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp25.606.071.780,79	Rp27.364.280.459,40

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp25.606.071.780,79 dan Rp27.364.280.459,40 merupakan beban penyisihan atas Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya. Adapun rincian Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 108
Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Penyisihan Piutang	25.606.071.780,79	27.364.280.459,40	(1.758.208.678,61)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	22.215.068.065,21	26.241.116.216,40	(4.026.048.151,19)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	3.391.003.715,58	1.123.164.243,00	2.267.839.472,58

Beban penyisihan piutang pendapatan terdiri atas beban penyisihan piutang pajak, retribusi, tranfer pemerintah dan piutang lainnya.

5.7.1.11	Beban Lain-lain- LO	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
		Rp20.854.610.607,89	Rp130.949.460.077,84

Jumlah Beban Lain-lain Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp20.854.610.607,89 dan Rp130.949.460.077,84. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan

alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap (dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi) dan beban penyisihan investasi dana bergulir. Rincian beban lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 109
Rincian Beban Lain-lain TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Lain-lain	20.854.610.607,89	130.949.460.077,84	(110.094.849.469,95)
Beban Penyisihan Dana Bergulir	506.019.409,40	0,00	506.019.409,40
Beban Lain-lain	20.348.591.198,49	130.949.460.077,84	(110.600.868.879,35)

5.7.1.12	Beban Kerugian dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Per 31 Desember 2016 Rp735.120.293,00	Per 31 Desember 2015 Rp0,00
-----------------	---	---	---------------------------------------

Beban Kerugian dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2016 sebesar Rp735.120.293,00 merupakan beban untuk mencatat kerugian atas investasi pada Perusda Kota Balikpapan per 31 Desember 2016.

5.7.2.	Beban Transfer - LO	Per 31 Desember 2016 Rp998.806.796,00	Per 31 Desember 2015 Rp998.806.796,00
---------------	----------------------------	---	---

Jumlah Beban Transfer Tahun 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp998.806.796. Beban transfer merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi Partai Politik pada Tahun Anggaran 2016.

5.8	Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional – LO	Per 31 Desember 2016 Rp(4.571.839.650,76)	Per 31 Desember 2015 Rp(795.372.024,00)
------------	--	---	---

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 adalah sebesar Rp(4.571.839.650,76) dan Tahun 2015 sebesar Rp(795.372.024,00) yang diperoleh dari penghapusan aset tetap yang dilakukan selama periode Tahun 2016

5.9	Pos Luar Biasa	Per 31 Desember 2016 Rp7.826.286.941,06	Per 31 Desember 2015 Rp507.730.116,68
------------	-----------------------	---	---

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.826.286.941,06 dan Rp507.730.116,68. Pos Luar Biasa terdiri dari rincian sebagai berikut :

Tabel 110
Rincian Pos Luar Biasa TA 2016 dan TA 2015

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan Luar Biasa	8.756.897.041,06	13.601.570.316,68	(4.844.673.276)
Beban Luar Biasa	930.610.100,00	13.093.840.200,00	(12.163.230.100)
Pos Luar Biasa (Pendapatan – Beban)	7.826.286.941,06	507.730.116,68	7.318.556.824,38

5.9.1 SURPLUS/DEFISIT - LO Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015
Rp157.273.149.628,30 Rp146.960.228.265,20

Surplus/Defisit Laporan Operasional adalah selisih antara pendapatan LO dan Beban, Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kota Balikpapan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp157.273.149.628,30 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO pada tahun 2015 sebesar Rp10.312.921.363

E. LAPORAN ARUS KAS

Penyajian laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

5.8 Arus Kas Bersih Dari Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015
440.549.463.308,00 Rp389.127.779.956,01

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp440.549.463.308,00 menunjukkan bahwa penerimaan kas dari aktivitas operasi lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dimana arus masuk kas adalah sebesar Rp1.992.005.330.725,29 dan arus keluar kas sebesar Rp 1.551.455.867.417,29.

Adapun rincian arus kas dari aktivitas operasi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 111
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Arus Kas Masuk:				
-	Pendapatan Pajak Daerah	403.690.047.708,65	385.432.289.529,31	18.257.758.179,34
-	Pendapatan Retribusi Daerah	46.624.692.440,79	48.132.803.944,63	(1.508.856.722,84)
-	Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.051.835.627,69	25.716.622.557,65	(10.664.786.929,96)
-	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	93.610.857.899,16	71.644.285.880,56	21.966.572.018,60
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	142.907.891.921,00	125.038.354.850,00	17.869.537.071,00
-	Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	457.744.385.992,00	622.563.917.269,00	(164.819.531.277,00)
-	Pendapatan Dana Alokasi Umum	391.898.857.000,00	388.230.396.000,00	3.668.461.000,00
-	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	74.010.514.221,00	9.468.376.000,00	64.542.138.221,00
-	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	76.374.378.915,00	146.023.971.000,00	(69.649.592.085,00)
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	181.980.819.000,00	222.438.963.625,00	(40.458.144.625,00)

Uraian		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
-	Dana Hibah	5.070.000.000,00	1.185.000.000,00	3.885.000.000,00
-	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Propinsi	103.041.050.000,00	136.057.000.000,00	(33.015.950.000,00)
	Jumlah	1.992.004.585.506,29	2.181.931.980.656,15	(189.927.395.149,86)
Arus Kas Keluar:				
-	Belanja Pegawai	709.143.921.418,53	697.690.227.970,37	11.453.693.448,16
-	Belanja Barang dan Jasa	696.574.344.801,76	770.025.256.387,77	(73.437.411.586,01)
-	Belanja Subsidi	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
-	Belanja Hibah	142.574.661.901,00	292.942.600.346,00	(150.367.938.445,00)
-	Bantuan Sosial	433.522.400,00	6.254.308.000,00	(5.820.785.600,00)
-	Bantuan Keuangan	998.806.796,00	998.806.796,00	0.00
-	Belanja Tidak Terduga	930.610.100,00	24.093.001.200,00	(23.162.391.100,00)
	Jumlah	1.551.455.867.417,29	1.792.804.200.700,14	(241.334.833.282,85)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		440.549.463.308,00	389.127.779.956,01	51.407.438.132,99

Jumlah arus kas masuk pada aktivitas operasi berbeda sebesar Rp48.033.816.561,69 dengan realisasi pendapatan di LRA karena penjualan aset tetap sebesar Rp1.387.575.000,00 yang tercatat pada Lain-lain PAD yang Sah disajikan ke dalam arus kas aktivitas investasi .

5.9

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Per 31 Desember 2016

Rp(562.872.262.371,54)

Per 31 Desember 2015

Rp(1.090.352.475.613,28)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berjumlah sebesar Rp(562.872.262.371,54) yang didapat selisih arus kas masuk dari penjualan aset tetap jumlah arus kas keluar dari realisasi belanja modal. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 112

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Arus Kas Masuk:			
-	Penjualan Aset Tetap	1.387.575.000,00	60.027.000,00
	Jumlah	1.387.575.000,00	60.027.000,00
Arus Kas Keluar :			
-	Belanja Tanah	83.846.532.317,00	117.543.728.129,00
-	Belanja Peralatan dan Mesin	52.524.546.155,26	104.350.088.780,92
-	Belanja Gedung dan Bangunan	285.244.005.338,18	688.996.031.320,36
-	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.372.105.607,84	174.684.185.228,00
-	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.340.765.688,26	1.622.218.155,00
-	Belanja Aset Lainnya	12.931.882.265,00	3.216.251.000,00
	Jumlah	564.259.837.371,54	1.090.412.502.613,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(562.872.262.371,54)	(1.090.352.475.613,28)

5.10

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2016

Rp(3.000.000.000,00)

Per 31 Desember 2015

Rp(30.180.000.000,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp(3.000.000.000,00) menunjukkan tidak ada arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas sebesar Rp3.000.000.000,00 digunakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah ke PDAM Kota Balikpapan.

110

5.11
Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2016
Rp0,00

Per 31 Desember 2015
Rp(23.571.247,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 113
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Arus Kas Masuk:			
-	Penerimaan dari iuran wajib pegawai	27.443.123.245,00	27.407.231.311,00
-	Penerimaan dari potongan tabungan perumahan	559.932.000,00	566.001.000,00
-	Penerimaan dari pungutan PPh	2.435.195.266,00	5.102.803.147,00
-	Penerimaan lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah	30.438.250.511,00	33.076.035.458,00
Arus Kas Keluar:			
-	Penyetoran iuran wajib pegawai	27.443.123.245,00	27.407.231.311,00
-	Penyetoran potongan perumahan	559.932.000,00	566.001.000,00
-	Penyetoran Pungutan PPh	2.435.195.266,00	5.100.846.927,00
-	Pengeluaran lain-lain	0.00	25.527.467,00
-	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (transito)	0,00	0,00
	Jumlah	30.438.250.511,00	33.099.606.705,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0.00	(23.571.247,00)

Dari arus kas bersih masing-masing aktivitas di atas dapat dihitung kenaikan/penurunan kas selama periode tahun 2016 dan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Tabel 114
Rincian Arus Kas per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	440.549.463.308,00	389.127.779.956,01
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(562.872.262.371,54)	(1.090.352.475.613,28)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(3.000.000.000,00)	(30.180.000.000,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	(23.571.247,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(125.322.799.063,54)	(731.428.266.904,27)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	227.891.480.572,09	927.950.029.820,29
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	102.568.681.508,55	196.521.762.916,02
Saldo Akhir Kas terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	67.388.111.428,50	196.518.325.956,02
Kas di Bendahara Pengeluaran	117.347.911,00	1.480.740,00
Kas di Bendahara Penerimaan	15.052.219,00	0,00
Kas di BLUD dan JKN	37.068.502.864,49	34.368.295.988,07
Saldo Akhir Kas	104.589.014.422,99	230.888.102.684,09

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.14.1	EKUITAS AWAL	Per 31 Desember 2016 6.790.306.381.510,21	Per 31 Desember 2015 Rp8.127.213.272.011,29
--------	--------------	--	--

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp6.790.306.381.510,21 yang merupakan nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2015

5.14.2	SURPLUS /(DEFISIT) LO	Per 31 Desember 2016 157.273.149.628,30	Per 31 Desember 2015 Rp146.960.228.265,20
--------	-----------------------	--	--

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp157.273.149.628,30. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.14.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	Per 31 Desember 2016 Rp582.676.630.558,95	Per 31 Desember 2015 Rp(1.483.867.118.766,31)
--------	---	--	--

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena hal-hal sebagai berikut:

Tabel 115
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2016

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016 (Rp)	Per 31 Desember 2015 (Rp)
1.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	(458.935.873,20)
2.	Koreksi Penyajian Aset Tetap Tahun Lalu	534.400.325.665,51	9.217.974.006,00
3.	Koreksi Ekuitas dari Penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya	0,00	(1.330.037.473.839,08)
4.	Koreksi Ekuitas Lainnya	29.777.046.613,27	(162.588.683.060,03)
5	Koreksi Saldo Awal Penyusutan	18.499.258.280,17	0.00
	Jumlah	582.676.630.558,95	(1.483.867.118.766,31)

5.12	EKUITAS AKHIR	Per 31 Desember 2016 Rp7.530.256.161.697,46	Per 31 Desember 2015 Rp6.790.306.381.510,18
------	---------------	--	--

Ekuitas Akhir Tahun 2016 sebesar Rp7.530.256.161.697,46 jika dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2015 sebesar Rp6.790.306.381.510,18 mengalami kenaikan sebesar Rp739.949.780.187,28

PENGUNGKAPAN INFORMASI LAINNYA

G. JAMINAN PEMELIHARAAN

Pada tahun 2016, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang fisiknya telah selesai 100% dan telah dibayarkan 100% keuangannya dengan jaminan pemeliharaan berupa Garansi Bank yang diserahkan oleh pihak ketiga pelaksana pekerjaan. Jaminan Pemeliharaan tersebut berakhir melewati Tahun 2016. Rincian Jaminan Pemeliharaan berupa Garansi Bank tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 116
Rincian Jaminan Pemeliharaan berupa Garansi Bank TA 2016

No.	SKPD	Nilai Jaminan Pemeliharaan (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum	7.220.338.252,99
2.	Dinas Tata Kota dan Pemukiman	62.039.900,00
3.	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	143.113.650,00
4.	Badan Lingkungan Hidup	164.564.950,00
5.	Dinas Perhubungan	77.913.000,00
6.	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	2.954.326.995,00
	Jumlah	10.622.296.747,99

H. KEWAJIBAN KONTIJENSI ATAS KASUS HUKUM

Pemerintah Kota Balikpapan memiliki beberapa aset tetap dalam sengketa hukum yang dalam putusannya dimenangkan penggugat dan telah berkekuatan hukum tetap (incraht), namun masih dalam proses penghapusan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan poin No. 5.5.1.4.5, yaitu aset sebagai berikut:

1. Tanah Taman Bekapai (Eks. Lapangan Veteran), luas 4.800 M² senilai Rp12.000.000.000,00 sesuai putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 592 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Januari 2003 yang amar putusannya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK yakni Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Tanah Pasar Blauran dan sebagian Pasar Ikan Klandasan seluas 270.96 M² senilai Rp40.644.000.000,00 sesuai putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) Nomor 2204K/Pdt/2007 tanggal 2 Juni 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 639 PK/Pdt/2010 tanggal 11 April 2011. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Balikpapan telah menerbitkan SP2D untuk pembayaran ganti rugi tahap I sebesar Rp30.000.000.000,-

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 disusun berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016. Laporan keuangan dimaksud meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Neraca Daerah
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan SKPD dengan melalui proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana mestinya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan lagi dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan penerapan belanja daerah yang berprinsip pada pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut Ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SAP.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2016 ini, Pemerintah Kota Balikpapan bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah untuk terwujudnya Pemerintahan Kota Balikpapan yang sarat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya, dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang semakin sempurna dan melalui penyajian laporan keuangan yang semakin berkualitas, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.